

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kabupaten Karawang Kode Pos 41315 Telp. (0267) 429800, 429801, 429 802, 429803, Fax. (0267) 411923  
E-mail. [pemda.karawang@yahoo.com](mailto:pemda.karawang@yahoo.com), [pemda.karawang@gmail.com](mailto:pemda.karawang@gmail.com) Website. [www.karawangkab.go.id](http://www.karawangkab.go.id) SMS Gateway 085890624444



## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Wr.Wb*

**D**engan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2015. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi kami kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang dalam memenuhi harapan akan terwujudnya *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.



Dalam laporan ini kami menyajikan informasi terkait capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang ditetapkan untuk periode Tahun 2015, yang mencakup keberhasilan maupun hambatan yang kami alami, sebagai cerminan dari kesungguhan kami untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendukung perbaikan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang.

*Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.*

Karawang,                   Maret 2016

**BUPATI KARAWANG**

**dr. CELLICA NURRACHADIANA**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2015 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2015. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang selama tahun 2015 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2011-2015 dan telah memenuhi 20 (dua puluh) sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat pencapaian target dari 49 indikator kinerja, 1 indikator tidak dihitung karena masih dalam proses penilaian Pemerintah Pusat, yaitu indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) belum dapat terealisasi karena masih dalam proses audit pendahuluan. Sehingga ada 48 indikator sasaran strategis yang diukur capaian kinerjanya yaitu ada 34 indikator kinerja telah mencapai kategori berhasil baik (70, 83%), 6 indikator kinerja telah mencapai kategori baik (12,50%), 1 indikator kinerja mencapai kategori sedang (2,08%) dan 7 indikator kinerja mencapai kategori kurang baik (14,58%).

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.044.463.925.063,00 jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 3.603.924.144.290,97 atau 89,11%.



Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2015 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Karawang akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2015 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2015 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang.**

**D**alam dinamika perkembangan skala global, regional, maupun nasional, saat ini, setiap pemerintahan menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari semua pihak. Paradigma *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya pemerintahan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan dimasa yang akan datang.

Salah satu upaya pemerintah dalam memasyarakatkan penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan, antara lain dengan mengimplementasikan dengan prinsip-prinsip mendasarinya konsep *good governance* transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat secara transparan, partisipasi dan akuntabilitas kebijakan publik.

Selain implementasi *Good Governance*, tuntutan dalam era reformasi adalah mewujudkan reformasi birokrasi yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel serta masyarakat yang menuntut kesungguhan pemerintah dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik (*public goods* dan *public service*). Agar *Good Governance* dan reformasi birokrasi di atas menjadi kenyataan diperlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak terutama yaitu pemerintah yaitu menjalankan suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan integritas, akuntabilitas, transparansi serta profesionalitas, dan etos kerja (kinerja) yang tinggi. Untuk hal itu perlu dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata, sehingga

pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketetapan ini ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan Ketetapan MPR RI tersebut Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang salah satunya mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyusun Pelaporan Kinerja. Pada tingkat kebijakan pelaksanaan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Selanjutnya Sebagaimana pelaksanaan pada tahun sebelumnya, maka dokumen Laporan Kinerja yang tertuang dalam buku ini akan memuat berbagai informasi berkaitan dengan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama tahun anggaran 2015.

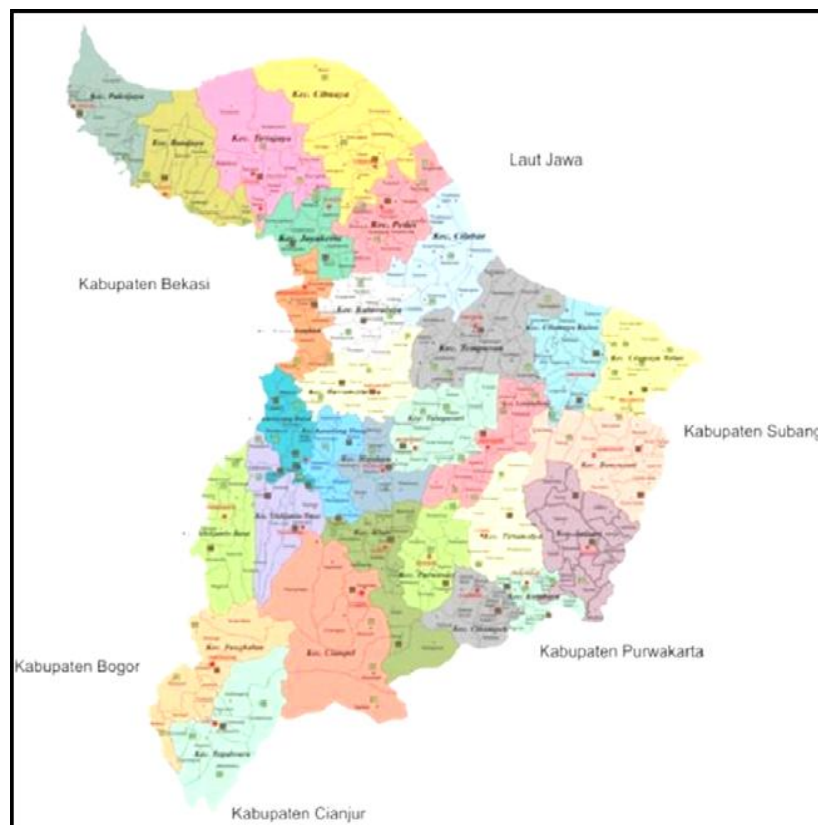
## 1.2 Gambaran Umum Kabupaten Karawang

### 1.2.1. Kondisi Geografis.

Secara geografis wilayah Kabupaten Karawang terletak diantara  $107^{\circ}02'$ - $107^{\circ}40'$  BT dan  $5^{\circ}56'$ - $6^{\circ}34'$  LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah  $0-2^{\circ}$ ,  $2^{\circ}-15^{\circ}$ ,  $15^{\circ}-40^{\circ}$ , dan di atas  $40^{\circ}$  dengan suhu rata-rata  $27^{\circ}\text{C}$ .

Luas wilayah Kabupaten Karawang  $1.753,27 \text{ Km}^2$  atau  $175.327 \text{ Ha}$ ,  $3,73\%$  dari luas Propinsi Jawa Barat dan memiliki laut seluas  $4 \text{ Mil} \times 84,23 \text{ Km}$ , dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Subang
- Sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Bogor dan Kab.Cianjur
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi



**Gambar 1.1**  
**Peta Kabupaten Karawang**

Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok, Kutawaluya, Tempuran, Cilamaya, Rawamerta, Telagasari, Lemahabang, Jatisari, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakarta, Majalaya, sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Golosur, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalonggong, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300 - 1.200 m dpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel.

Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, Sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang, sedangkan Sungai CiBeet yang menyatu dengan Sungai Citarum di Kecamatan Telukjambe Barat merupakan batas pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi dan Bogor di wilayah selatan. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik.

Sesuai dengan bentuk morfologinya Kabupaten Karawang memiliki temperatur udara rata-rata 27°C dengan tekanan udara rata-rata 0,01 milibar. Penyinaran matahari 66% dan kelembaban nisbi 80%. Curah Hujan tahunan berkisar antara 1.100 – 3.200 mm/tahun. Pada bulan Januari sampai dengan April bertiup angin Muson Laut dan sekitar bulan Juni bertiup angin Muson Tenggara. Kecepatan angin antara 30-350km/jam, lamanya tiupan rata-rata 5 - 7 jam.

## 1.2.2 Gambaran Umum Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Karawang sampai dengan bulan Juni 2015 mencapai 2.273.579 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,04 % dan tingkat kepadatan penduduknya terus menunjukkan trend meningkat, dari sebelumnya hanya 1.213 jiwa per Km<sup>2</sup> di tahun 2010 naik menjadi 1.296 jiwa per Km<sup>2</sup> pada tahun 2015.

### 1.2.2.1 Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 sebanyak 1.166.478 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.107.101 jiwa. Dengan demikian berdasarkan rasio jenis kelamin sebesar 105,36% artinya setiap 100 orang perempuan berbanding dengan 105 orang laki-laki.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 20011-2015**

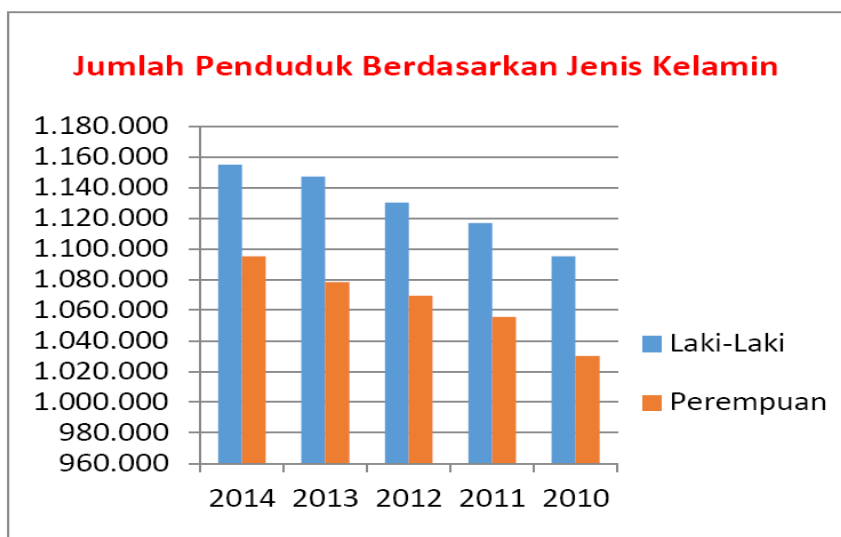
No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Penduduk	2.172.289	2.199.394	2.225.383	2.250.120	2.273.579
2.	Komposisi menurut jenis kelamin :					
	Pria	1.116.670	1.130.132	1.142.884	1.154.982	1.166.478
	Wanita	1.055.619	1.069.262	1.082.499	1.095.138	1.107.101
3.	Pertumbuhan (LPP %)	2,09	1,25	1,18	1,11	1,04
4.	Tingkat Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> )	1.239	1.254	1.269	1.283	1.297

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

### 1.2.2.2 Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia

Komposisi penduduk Kabupaten Karawang berdasarkan usia pada tahun 2015 terdiri atas penduduk berusia 5 – 9 tahun berjumlah 198.205 jiwa atau sekitar 8,72% dan 10 – 14 tahun berjumlah 201.390 jiwa atau sekitar 8,86 %. Penduduk Kabupaten Karawang usia produktif atau usia 15 – 64 tahun berjumlah 1.555.595 jiwa atau sekitar 68,42%. Berdasarkan komposisi penduduk dapat dilihat angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif. Pada tahun 2015 nilai *dependency ratio* menunjukkan angka 46,15% yang berarti bahwa dari 100 orang usia produktif menanggung beban sekitar 46 orang yang tidak produktif. Selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi trend penurunan angka beban

ketergantungan (*Dependency Ratio*), dari sebelumnya 48,68% di tahun 2010 berubah menjadi 46,15% di tahun 2015, Kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif karena kaum pendatang/migran relatif lebih besar dibandingkan dengan penambahan penduduk alamiah, sementara pada saat yang sama derajat kesehatan masyarakat pun semakin meningkat.



**Gambar 1.2**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang**

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Menurut Struktur Usia Tahun 2011-2015**

No.	Struktur Usia	2011	2012	2013	2014	2015
1.	5 – 9	189.467	191.804	194.046	195.207	198.205
2.	10 – 14	192.132	194.599	196.973	197.769	201.390
3.	15 – 64	1.487.215	1.505.545	1.523.097	1.541.809	1.555.595
4.	Angka Beban Ketergantungan ( <i>Dependency Ratio %</i> )	46,06%	46,09%	46,11%	45,94%	46,15%

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, Proyeksi Penduduk Kabupaten Karawang

### 1.2.2.3 Komposisi penduduk berdasarkan lapangan usaha

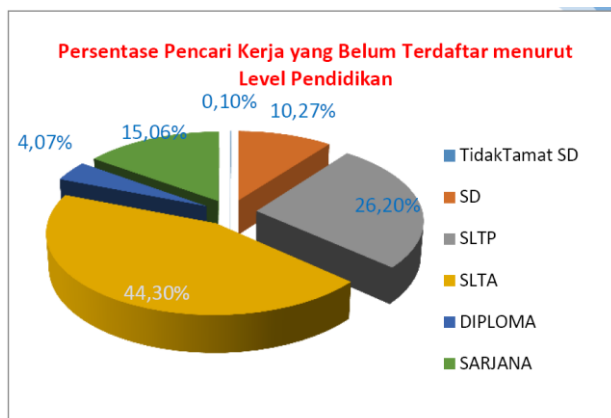
Jumlah penduduk bekerja berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 sebanyak 930.590 orang. Dari jumlah tersebut, sebesar 168.901 orang atau sekitar 18,15% bekerja pada lapangan usaha pertanian dan perikanan. Pada lapangan usaha perdagangan memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 287.986 orang atau sekitar 30,95%. Sedangkan pada lapangan usaha industri menyerap tenaga kerja sebesar 205.759 orang atau sekitar 22,11%.

Mencermati trend serapan tenaga kerja di sektor perdagangan cenderung terus menguat pada tahun 2015, yaitu dari 266.962 orang di tahun 2014 meningkat menjadi 287.985 orang di tahun 2015. Artinya, permintaan tenaga kerja sektor perdagangan telah menjadi salah satu kunci untuk mengurangi tingkat pengangguran masyarakat Karawang, pada saat sektor industri pengolahan mengalami pelambanan serapan tenaga kerja akibat melemahnya perekonomian global. Di sisi lain, serapan tenaga kerja sektor pertanian dan perikanan relatif stabil, yang menunjukkan transisi tenaga kerja pada sektor primer ke sektor-sektor lainnya tidak menunjukkan perubahan signifikan. Kondisi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan Kabupaten Karawang secara berkelanjutan karena minat tenaga kerja di sektor pertanian dan perikanan masih cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir

**Tabel 1.3**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015**

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Pertanian dan Perikanan	174.520	168.224	141.219	160.819	168.901
2.	Perdagangan	291.092	277.808	264.727	266.962	287.985
3.	Industri	186.203	242.865	214.259	227.295	205.759
4.	Seluruh Lapangan Usaha	880.087	917.556	875.213	912.864	930.590

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, Data Sakernas  
Keterangan : \*) = angka sementara



**Gambar 1.3**  
**Persentase Pencari Tenaga Kerja Menurut Pendidikan**

**Tabel 1.4**  
**Komposisi dan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Berumur 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Karawang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2015**

Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015	
	Jml Naker	%	Jml Naker	%	Jml Naker	%	Jml Naker	%
1. Pertanian	168.224	18,33%	141.219	16,14%	160.819	17,62%	168.901	18,15%
2. Pertambangan dan Penggalian	2.875	0,31%	156	0,02%	163	0,02%	159	0,02%
3. Industri Pengolahan	242.865	26,47%	214.259	24,48%	227.295	24,90%	205.759	22,11%
4. Listrik, Gas & Air	3.868	0,42%	1.047	0,12%	1.092	0,12%	2.092	0,22%
5. Konstruksi	31.738	3,46%	31.095	3,55%	32.033	3,51%	33.403	3,59%
6. Perdagangan, Hotel, Restoran	277.808	30,28%	264.727	30,25%	266.962	29,24%	287.985	30,95%
7. Pengangkutan dan Komunikasi	47.838	5,21%	52.335	5,98%	53.095	5,82%	54.586	5,87%
8. Jasa – Jasa	20.087	2,19%	12.780	1,46%	13.030	1,43%	13.330	1,43%
9. Lainnya	122.253	13,32%	157.595	18,01%	158.375	17,35%	164.375	17,66%
<b>TOTAL</b>	<b>917.556</b>	<b>100%</b>	<b>875.213</b>	<b>100%</b>	<b>912.864</b>	<b>100%</b>	<b>930.590</b>	<b>100%</b>

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, data Sakernas  
 Keterangan : \*) = angka sementara

#### 1.2.2.4 Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Karawang secara umum masih relatif rendah atau masih dalam taraf pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang, pada tahun 2015 jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan kurang atau setara SD berjumlah 1.094.940 orang, SMP sebanyak 345.634 orang, SMA sebanyak 383.233 orang dan Diploma sebanyak 66.619 orang.

**Tabel 1.5**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	≤SD	1.075.044	1.101.014	1.112.657	1.128.351	1.094.940
2.	SLTP	311.440	318.964	322.337	326.879	345.634
3.	SLTA	315.295	322.911	326.326	330.925	383.233
4.	Diploma	52.781	54.056	54.628	55.395	66.619

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : \*) = angka sementara

### 1.2.3 Perekonomian

#### 1.2.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah Indikator ekonomi yang paling sering digunakan untuk menggambarkan perekonomian suatu daerah. PDRB Kabupaten Karawang Tahun 2015 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp 164,05 trilyun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 131,2 trilyun, mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2014 dimana PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 155,07 trilyun dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 125,42 trilyun.

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat menggambarkan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (*engine growth*). Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, hal tersebut terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.6**  
**Peranan PDRB Kab. Karawang**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2011-2015 (juta rupiah/persen)**

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Primer (Pertanian dan Pertambangan)	10.594.579,1 (9,36%)	10.145.883,2 (8,16%)	10.907.477,2 (7,75%)	11.028.418,3 (7,11%)	11.055.714,7 (6,62%)
2.	Sekunder (Industri, Listrik, Air dan Bangunan)	82.924.172,4 (73,27%)	92.622.864,8 (74,53%)	105.591.909,1 (74,99%)	117.397.909,2 (75,71%)	128.210.984,6 (76,75%)
3.	Tersier (Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi dan Jasa)	19.662.061,7 (17,37%)	21.507.791,2 (17,31%)	24.316.666,9 (17,27%)	26.641.810,4 (17,17%)	27.786.007,4 (16,63%)
	PDRB	113.180.813,2 (100%)	124.276.539,3 (100,00%)	140.816.053,3 (100,00%)	155.068.137,9 (100,00%)	167.052.706,7 (100,00%)

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, PDRB

Keterangan : \*) = angka sementara

Kontribusi /pangsa sektor primer atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 relatif menurun, yaitu dari 7,11% pada tahun 2014 menjadi 6,62%. Untuk sektor sekunder justru terjadi peningkatan pangsa ekonomi yang cukup signifikan, dari 75,71% di tahun 2014 menjadi 76,75% pada tahun 2015. Untuk sektor tersier, relatif stabil dengan kecenderungan sedikit menurun, yaitu dari 17,17% pada tahun 2014, menjadi 16,63% pada tahun 2015. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi. Kontribusi sektor sekunder yang relatif terus membesar memperlihatkan bahwa Kabupaten Karawang telah berkembang menjadi salah satu daerah basis industri utama di Jawa Barat, sekaligus menjadi salah satu daerah yang mampu bertahan sebagai lumbung padi Nasional ditengah berbagai kemajuan ekonomi di sektor sekunder dan tersier perdagangan dan jasa

**Tabel 1.7**  
**Struktur Ekonomi Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (persen)**

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,44	4,22	4,38	4,16	4,05
2.	Pertambangan dan Pengecambahan	4,92	3,95	3,36	2,96	2,56
3.	Industri Pengolahan	69,18	70,20	70,75	70,99	71,82
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,90	0,99	0,97	1,09	1,07
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
6.	Konstruksi	3,13	3,29	3,21	3,57	3,81
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,34	10,16	10,28	10,02	9,59
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,60	1,60	1,49	1,54	1,64
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,85	0,86	0,83	0,83	0,80
10.	Informasi dan Komunikasi	0,78	0,76	0,73	0,78	0,74
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	0,97	1,02	1,04	1,00
12.	Real Estate	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20
13.	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,07	1,11	1,04	1,06	1,01
15.	Jasa Pendidikan	0,54	0,62	0,69	0,74	0,72
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26	0,25	0,23	0,24	0,23
17.	Jasa lainnya	0,70	0,72	0,73	0,70	0,67
	<b>PDRB DENGAN MIGAS</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, PDRB Menurut Lapangan Usaha

Keterangan : \*) = angka sementara

Analisis sektor menunjukkan bahwa peranan sektor industri pengolahan pada tahun 2015 tetap merupakan sektor (terunggul dan terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang), yaitu sebesar 70,99%. Disusul kemudian oleh sektor (perdagangan dan pertanian), yang masing-masing menyumbang sebesar 10,02% dan 4,16%. Sedangkan 2 sektor penyumbang terkecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang tahun 2015 adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sektor jasa perusahaan.

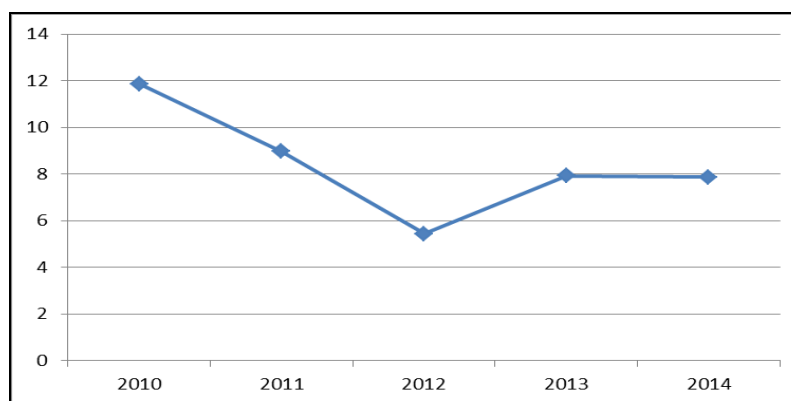
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro ekonomi yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga konstan. Dengan memperhatikan LPE dan sektor-sektor yang membentuk PDRB, dapat diketahui sektor atau lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cepat dalam suatu perekonomian daerah. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Karawang tahun 2015 dengan memperhitungkan kontribusi sektor migas diperkirakan mencapai angka 4,62% dengan tingkat inflasi tingkat produsen sebesar 2,97%.

**Tabel 1.8**  
**Angka Agregatif PDRB Kabupaten Karawang, PDRB Perkapita, LPE Sektor Migas, Tingkat Inflasi Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	113.180.813,2	124.276.539,3	140.816.053,3	155.068.137,9	167.052.706,7
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)	106.174.675,8	111.424.083,5	119.484.231,0	125.415.445,9	131.207.042,8
3.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	52.102.097,48	56.504.900,57	63.277.221,63	68.915.496,89	73.475.655,2
4.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp)	48.876.864,8	50.661.265,58	53.691.535,8	55.737.225,53	57.709.471,63
5.	LPE Migas (%)	6,56%	4,94%	7,23%	4,96%	4,62%
6.	Inflasi (%)	6,60%	4,63%	5,67%	4,91%	2,97%

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, PDRB

Keterangan : \*) = angka sementara



**Gambar 1.4**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karawang**

Bila dicermati secara lebih detail, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 hanya sedikit melambat dibandingkan keadaan tahun 2014, dengan seluruh sektor bertumbuh positif. Hal yang menggembirakan adalah terus bertumbuhnya sektor industri pengolahan di kisaran 4,41% di tahun 2015 atau hanya sedikit melambat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 4,55% sebagai akibat melemahnya perekonomian nasional maupun global. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan justru meraih pertumbuhan 1,74% di tahun 2015 jauh meningkat dibandingkan tahun 2014 yang hanya mencapai 0,41%.

Sektor yang mampu bertumbuh lebih dari 2 (dua) digit di tahun 2015 adalah sektor Informasi dan Komunikasi yang mencapai 17,27%, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 13,50% dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,19%. Sementara itu, sektor Jasa Perusahaan dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang masing-masing bertumbuh 7,78% dan 7,74%, diikuti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum bertumbuh 6,99%, dan sektor Konstruksi 6,33%. Sektor yang bertumbuh paling kecil adalah Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 1.23%.

**Tabel 1.9**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang**  
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Persen)**

No.	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,66	-4,22	4,07	0,41	1,74
2.	Pertambangan dan Penggalian	-8,14	-19,46	3,17	2,03	1,23
3.	Industri Pengolahan	8,51	6,79	7,59	4,55	4,41
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,66	5,09	3,90	6,04	4,75
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,16	6,00	10,45	3,54	7,74
6.	Konstruksi	5,35	10,38	6,03	14,58	6,33
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,24	2,85	8,45	4,33	4,06
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,06	7,23	2,63	8,39	10,19
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,18	7,91	8,09	6,38	6,99
10.	Informasi dan Komunikasi	10,56	3,56	9,38	18,06	17,27
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,87	3,88	10,79	9,17	6,14
12.	Real Estate	11,07	5,94	8,44	3,90	5,94
13.	Jasa Perusahaan	2,93	7,41	5,13	4,33	7,78
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,59	3,92	-1,13	2,51	4,77
15.	Jasa Pendidikan	11,03	15,71	14,83	17,63	9,96
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,71	2,99	2,88	8,65	13,50
17.	Jasa lainnya	9,17	10,15	7,49	6,07	7,98
	<b>LPE DENGAN MIGAS</b>	6,56	4,94	7,23	4,96	4,62
	<b>LPE TANPA MIGAS</b>	7,28	5,96	7,36	5,05	5,01

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, PDRB

Keterangan : \*) = angka sementara

Indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita (*percapita income*). Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk disuatu wilayah maka tingkat kemakmuran di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto penduduk secara nominal, sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah

nyata serta pertumbuhan nyata perkapita. Angka tersebut diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB perkapita Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari jumlah penduduk sebanyak 2.273.579 jiwa pada tahun 2015, PDRB perkapita berlaku Kabupaten Karawang sebesar Rp. 73.475.655,- hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 6,62% dibandingkan dengan PDRB perkapita di tahun 2014 yang berada pada nilai Rp. 68.915.496,-.

**Tabel 1.10**  
**Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015**

Tahun	Pendapatan perkapita ADHB	Perubahan ADHB(%)	Pendapatan perkapita ADHK	Perubahan ADHK(%)
2011	52.102.097,48	12,12%	48.876.864,80	5,18%
2012	56.504.900,57	8,45%	50.661.265,58	3,65%
2013	63.277.221,63	11,99%	53.691.535,80	5,98%
2014	68.915.496,89	8,91%	55.737.225,53	3,81%
2015*	73.475.655,23	6,62%	57.709.471,63	3,54%

sumber : BPS Kabupaten Karawang, PDRB

Keterangan : \*) = angka sementara

Kendati demikian peningkatan PDRB perkapita tersebut masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kabupaten Karawang secara umum, walaupun indeks daya beli menunjukkan peningkatan, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih mengandung faktor inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada tingkat menengah ke bawah.

### 1.2.3.2 Potensi Industri

Industri di Kabupaten Karawang dikembangkan di lahan seluas 13.718 Ha atau 7,85 % dari luas Kabupaten Karawang, terdiri atas :

- Kawasan Industri seluas 6.757,5 Ha (terdiri atas Kecamatan Teluk jambe Barat, Teluk Jambe Timur Ciampel, Klari dan Kecamatan Cikampek).
- Kawasan Industri Terpadu seluas 743 Ha di Kecamatan Telukjambe Barat,

- Kota Industri Seluas 1000 Ha di Kecamatan Cikampek
- Zona Industri seluas 5.217,6 Ha (Kecamatan Klari, Kecamatan Purwasari, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Ciampel, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Rengasdengklok).

Sampai saat ini pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Karawang dialokasikan pada bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Klari, Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Purwasari, Karawang, Jatisari, Pangkalan dan Cikampek. Walaupun begitu tidak semuanya berkembang, terutama yang diperuntukan untuk Kawasan Industri terpadu di Kecamatan Telukjambe Barat seluas Kurang Lebih 743 Ha, 2400 Ha fungsinya sudah dikembalikan pada semula sebagai lahan Perhutani. Lambatnya perkembangan kegiatan industri tersebut diakibatkan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Kegiatan industri yang relatif berkembang diantaranya Kota Industri di bagian timur (Kota Bukit Indah City) Kecamatan Cikampek, Kawasan Industri (Kecamatan Telukjambe Timur dan Pangkalan), Zona Industri (Kecamatan Telukjambe Timur, Klari, Cikampek dan Karawang).

**Tabel 1.11**  
**Nama Kawasan Industri di Kabupaten Karawang**

No.	Kawasan Industri
1.	PT. Mitra Karawang Jaya
2.	PT. Hutan Pertiwi Lestari
3.	PT. Pupuk Kujang
4.	PT. Maligi Permata Industrial Estate
5.	PT. Surya Cipta Swadaya
6.	PT. Karawang Jabar Industrial Estate
7.	PT. Hab & Son
8.	PT. Karawang Tata Bina
9.	PT. Sumber Airmas Pratama
10.	PT. Rasindo Perkasa
11.	PT. Pradi Dana Anugrah
12.	PT. Daya Kencanasia
13.	PT. Indotaisei Indah Development
14.	PT. Mandala Pratama Permai
15.	PT. Canggih Bersaudara Muliajaya
16.	PT. Bintang Puspita Dwikarya
17.	PT. Persada Nusa Makmurindo
18.	PT. Sejati Buana Jaya Darma
19.	PT. Innovindo Graha Lestari

20.	PT. Juishin Indonesia
21.	PT. Minriko Touvel
22.	PT. Mas Putih Belitung
23.	PT. Sejati Buana Jayadhama
24.	PT. Persadanusa Makmurindo
25.	PT. Karawang Sukses Makmur

Sumber : BPMPT dan Bappeda Kabupaten Karawang



**Gambar 1.5**  
**Kawasan Industri di Kabupaten Karawang**

Berdasarkan Keppres Nomor 53 Tahun 1989 tentang Pengembangan Kawasan Industri, Kabupaten Karawang telah ditetapkan sebagai daerah pengembangan kawasan industri. Jumlah Industri skala kecil dan besar di kabupaten karawang sampai dengan 2015 mencapai 10244 sebagaimana data sebagaiberikut :

**Tabel 1.12**  
**Data Perkembangan Industri di Kab. Karawang**  
**Tahun 2011-2015 (unit)**

No.	Jenis Industri	2011	2012	2013	2014	2015
<b>A.</b>	<b>Industri Besar</b>					
	1. PMA	371	486	495	540	511
	2. PMDN	213	213	226	237	226
	3. NON FASILITAS	179	207	217	224	217
	<b>Sub Total</b>	<b>763</b>	<b>906</b>	<b>938</b>	<b>1.001</b>	<b>954</b>
<b>B.</b>	<b>Industri Kecil</b>	9.001	9.014	9.025	9.025	9.290
	<b>Total</b>	<b>9.764</b>	<b>9.920</b>	<b>9.963</b>	<b>10.026</b>	<b>10244</b>

Sumber : Dinas Perindagtamben dan BPMPT Kabupaten Karawang



**Gambar 1.6**  
**Potensi Industri di Kabupaten Karawang**

**Tabel 1.13**  
**Data Perkembangan Investasi di Kab. Karawang**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Tahun	Jumlah Investasi (Rp)
1.	2011	98,784 Trilyun
2.	2012	14,253 Trilyun
3.	2013	40.924 Trilyun
4.	2014	25,722 Trilyun
5.	2015	25.453 Trilyun

Sumber : Dinas Perindagtamben dan BPMPT Kabupaten Karawang

### 1.2.3.3 Potensi Perikanan

Sumber perikanan di Kabupaten Karawang berasal dari :

- Perikanan tangkap Laut dengan produksi 8.499,75 Ton
- Perikanan budidaya (tambak, KAT, Mina padi dan KJA), dengan produksi 42.483,15 Ton
- Produk olahan hasil perikanan (pindang, ikan asin, terasi, krupuk dan Mini Plan (rajuangan) dengan produksi 35593,11 Ton.

Kegiatan perikanan tangkap di laut dan perairan umum (sungai, rawa dan waduk) pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Ikan laut, dengan jumlah produksi 8.499,87 Ton
- Ikan sungai, dengan jumlah produksi 29,61 Ton
- Ikan rawa, dengan jumlah produksi 7,96 Ton
- Ikan waduk/galian C, dengan jumlah produksi 54,55 Ton

Kegiatan perikanan perairan budidaya (tambak, kolam dan sawah/mina padi) pada tahun 2015 (adalah sebagai berikut :

- Ikan tambak, dengan jumlah produksi 39.113,65 Ton
- Ikan kolam (KAT), dengan jumlah produksi 2.806,09 Ton
- Ikan sawah (mina padi), dengan jumlah produksi 293,79 Ton
- Ikan jaring terapung (KJA), dengan jumlah produksi 269,62 Ton

Kegiatan pengolahan hasil perikanan (pindang, ikan asin, terasi dan krupuk) pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Pindang, dengan jumlah produksi 29.206,68 Ton.
- Ikan asin, dengan jumlah produksi 4.072,17 Ton
- Terasi, dengan jumlah produksi 293,92 Ton
- Krupuk dengan jumlah produksi 1.213,34 Ton

### 1.2.3.4 Potensi Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Karawang sangat potensial. Hanya saja potensi tersebut masih membutuhkan perhatian khusus. Pasalnya, hampir seluruh potensi tersebut belum mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap sektor perekonomian daerah. Bila dilihat dari jumlah objek wisata yang ada bukan tidak mungkin sektor pariwisata akan menjadi sektor andalan selain sektor industri dan pertanian.

Memperhatikan letak geografis Kabupaten Karawang dapat disimpulkan bahwa terdapat beragam objek wisata di Karawang. Keberagaman objek wisata tersebut terbagi menjadi 6 karakter wisata, yaitu : (1) pegunungan; (2) bahari; (3) sejarah (*heritage*); (4) religi; (5) purbakala; dan (6) buatan.

Daya tarik wisata berdasarkan karakter wisatanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Wisata alam (bahari dan pegunungan)	meliputi keindahan, banyaknya jenis sumber daya alam yang menonjol untuk wisata, keunikan sumberdaya alam, keutuhan sumberdaya alam, pilihan kegiatan, kebersihan udara, ruang gerak pengunjung, kepekaan sumberdaya alam
Wisata budaya (purbakala, <i>heritage</i> , dan religi)	meliputi karya yang unik, tua, tidak ada di tempat lain (artefak purbakala), mengandung peristiwa sejarah, memiliki warisan budaya yang sudah mengakar seperti tarian, dan ritual budaya lainnya, termasuk didalamnya berbagai kegiatan ritual atau situs keagamaan yang menarik orang untuk berziarah
Wisata buatan/ minat khusus	meliputi daya tarik dari objek wisata yang dibuat manusia tetapi sudah berpadu dengan alam sekitarnya sehingga menjadi sesuatu yang indah, tidak ada duanya, dan menunjukkan kehebatan pembuatan objek tersebut, misalkan bendungan, jembatan, danau buatan, dan lain-lain. Selain itu terdapat juga daya tarik wisata minat khusus, misalkan wisata kuliner yang khas hanya terdapat di daerah tersebut, olah raga khusus yang dapat dilakukan di daerah tersebut dan sejenisnya.

Jumlah ODTW (Objek Destinasi Tujuan Wisata) yang terdapat di Kabupaten Karawang tercatat kurang lebih 32 ODTW yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Karawang. Dari 30 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Karawang setiap kecamatan memiliki potensi dan produk yang diunggulkan mulai dari wisata alam, sejarah, budaya, buatan, kuliner dan lain-lain. Beberapa jenis dan sebaran ODTW yang ada di Kabupaten Karawang antara lain :

- a) Wisata Alam (pegunungan dan bahari) : Desa Wisata Mekarbuana, Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pakis, Buana Wisata Cikeong, Kawasan Wisata Pantai Tanjung Baru, Kawasan Wisata Pantai Samudra Baru Desa Sungaibuntu, Wisata Pantai Pasir Putih Desa Pasirjaya Kec. Cilamaya Wetan, Curug Cigentis, Curug Bandung, Curug Lalay, Curug Santri, Curug Cikolengkap dan Curug Cipanundaan
- b) Wisata Budaya (sejarah (*Heritage*), purbakala, religi) : Situs Purbakala Candi Jiwa, Candi Lanang, Candi Wadon, Situs Purbakala Kuta Tandingan, Petilasan Joko Tingkir, Makam Tubagus Rangin dan Makam Para Mantan Bupati Karawang, Tugu Proklamasi Rengasdengklok Monumen Rawagede, Monumen Resimen V Cikampek, Monumen Suroto Kunto dan Rumah Djiouw Ki Siong, Makam Syech Quro dan Vihara Sian Jin Kupoh
- c) Wisata Buatan/Minat Khusus : Bendungan Walahar/Parisdo, Danau Gempol Rawa, Situ Kamojing dan Bendungan Cibayat, Batu Tumpang *Adventure Camp* (BATAC).

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 terdapat 6 ODTW unggulan dan 4 ODTW lainnya yang memiliki nilai cukup tinggi dan dapat melengkapi ODTW unggulan yang sudah ada, ODTW unggulan tersebut tampak pada tabel berikut

**Tabel 1.14**  
**ODTW Unggulan di Kabupaten Karawang**

No.	ODTW	Lokasi	Karakter TW
1.	Pantai Samudera Baru	Desa Sungai Buntu, Kec. Pedes	Wisata Bahari
2.	Situs Candi Jiwa	Desa Segaran, Kec. Batujaya dan Desa Telagajaya, Kec. Pakisjaya	Wisata Purbakala
3.	Makam Syeck Quro	Berada di Kampung Pulobata, Desa Pulo Kec. Lemahabang	Wisata Religi
4.	Monumen Rawagede	Dusun Rawagede, Desa Rawagede, Kec. Rawamerta	Wisata Sejarah
5.	Curug Cigentis	Desa Mekarbuana, Kec. Tegalwaru	Wisata Pegunungan
6.	Danau Cipule	Desa Walahar, Kec. Ciampel	Wisata Buatan
7.	Pantai Tanjung Pakis	Kecamatan Pakisjaya	Wisata Bahari
8.	Candi Blandongan	Desa Segaran, Kec. Batujaya dan Desa Telagajaya, Kec. Pakisjaya	Wisata Purbakala
9.	Bendungan Parisdo (Walahar)	Desa Walahar, Kec. Klari	Wisata Buatan
10.	Curug Bandung	Desa Mekarbuana, Kec. Tegalwaru	Wisata Pegunungan

Sumber : Rippda Kabupaten Karawang



Gambar 1.7  
Potensi Pariwisata Kabupaten Karawang

### 1.3 Indikator Makro

Visi yang bersifat abstrak dijabarkan menjadi suatu yang konkrit melalui penetapan indikator makro. Pencapaian indikator makro merupakan sinergitas kinerja antara Pemerintah Kabupaten Karawang, Masyarakat dan Swasta dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karawang.

Berikut ini adalah target IPM yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2015 serta capaian indikator makro tahun 2015

**Tabel 1.15**  
**Proyeksi IPM Kabupaten Karawang Tahun 2015 dalam**  
**RKPD Kabupaten Karawang 2015**

No	Indikator Makro	Proyeksi 2015*
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,24
	• AHH (thn)	75,51
	• EYS (thn)	11,66
	• MYS/RLS (thn)	7,42
	• Pengeluaran (Rp 000/kapita)	9.908,95

Sumber: RKPD Kabupaten Karawang 2014

\*) = Proyeksi disusun menggunakan metode exponential smoothing dengan  $\alpha=5\%$

Tabel berikut ini mencantumkan capaian indikator makro hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang pada Tahun 2015 :

**Tabel 1.16**  
**Capaian Indikator Makro Kabupaten Karawang Tahun 2015**

1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,60
	• AHH (thn)	71,50
	• EYS (thn)	11,67
	• MYS/RLS (thn)	7,09
	• Pengeluaran (Rp 000/kapita)	9.818,38
2	LPE <sup>*)</sup>	4,62%
3	PDRB <sup>*)</sup>	
	• Harga Konstan (Juta Rp)	131.207.042,8
	• Per Kapita (ADHK)	57.709.471,6
4	Inflasi	3,2%
5	Jumlah Penduduk	2.273.579
6	LPP (%)	1,04%
7	Ketenagakerjaan	
	• Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	1.056.041
	• Jumlah penduduk yang bekerja (jiwa)	930.590
	• Pengangguran (%)	11,88%

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, Indikator Makro 2015

\*)= angka sementara

Berikut capaian indikator makro Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2015 :

## **1. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator pemantau pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM menjadi strategis sebagai indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang bersifat non fisik. IPM dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Hal ini selaras dengan tujuan utama pembangunan, yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Semenjak tahun 2015, penghitungan IPM di Indonesia mengalami perubahan metodologi, dengan beberapa keunggulan dibandingkan IPM metode lama, yaitu mampu digunakan sebagai indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Beberapa komponen IPM berubah, diantaranya angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling/EYS*) dan metode agregasi IPM diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Pencapaian pembangunan manusia yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat di Kabupaten Karawang menunjukkan kinerja yang terus membaik padatahun 2015. Selama periode 2011-2015, IPM menunjukan capaian progres kemajuan yang cukup baik, di tahun 2011 capaiannya sebesar 65,21meningkat jadi 65,97 pada tahun 2012 dan di tahun 2015 telah mencapai 67,60.Posisi IPM Kabupaten Karawang dengan metode baru berada pada 15 besar kabupaten/kota se Jawa Barat hingga tahun 2012, dan bergeser pada posisi 16 di tahun 2013-2015. Komponen penting yang menyebabkan IPM Kabupaten Karawang masih relatif rendah adalah capaian angka harapan hidup penduduk yang bergerak melambat, dan tingkat pendidikan masyarakat yang belum mampu naik secara akseleratif.

Secara rinci komponen IPM berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.17**  
**IPM dan Komponennya Tahun 2011-2015**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
<b>IPM</b>	65,21	65,97	66,61	67,08	67,60
<b>AHH (tahun)</b>	71,38	71,41	71,44	71,45	71,50
<b>EYS (tahun)</b>	10,92	11,08	11,31	11,64	11,67
<b>MYS/RLS (tahun)</b>	6,23	6,52	6,73	6,78	7,09
<b>Pengeluaran (Rp 000)</b>	9.524,89	9.671,03	9.755,43	9.768,31	9.818,38

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, IPM Metode Baru

\*)= angka sementara

Derajat kesehatan masyarakat Karawang terus membaik seiring meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) selama periode 2011-2015. Data BPS menunjukkan capaian AHH-nya sebesar 71,38 tahun pada 2011, terus membaik menjadi 71,41 tahun di 2012 dan 71,44 pada tahun 2013, sedangkan capaian pada tahun 2015 sebesar 71,50 tahun. Derajat kesehatan yang cukup tinggi ini menyebabkan peningkatannya relatif melambat setiap tahunnya, walaupun demikian tantangan besar yang masih dihadapi di masa-masa mendatang adalah mendorong perbaikan sanitasi dasar yang menyeluruh di wilayah Kabupaten Karawang.

Kabupaten Karawang yang berada di garis pantai utara Jawa Barat termasuk daerah dengan tingkat kualitas kesehatan masyarakat yang cukup rendah, dengan tingkat kematian bayi yang masih tinggi, sanitasi belum baik, dan penolong persalinan masih mengandalkan tenaga non medis, terutama di kalangan warga miskin. Hal inilah yang menjadi determinan utama relatif melambatnya capaian angka harapan hidup di Kabupaten Karawang.

Di bidang pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Karawang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat, walaupun selama 5 (lima) tahun terakhir telah mampu mempersempit jarak kesenjangannya. Begitu pula, pada capaian angka harapan lama sekolah Kabupaten Karawang kecenderungan lajunya tidak secepat rata-rata Jawa Barat, bahkan semakin tertinggal. Jika di tahun 2010, angka harapan lama sekolah Kabupaten Karawang yang sebesar 10,76 tahun sedikit lebih unggul dibandingkan rata-rata Jawa Barat yang hanya mencapai 10,69 tahun. Saat ini (2015), angka harapan hidup

Kabupaten Karawang justru menunjukkan laju yang melambat sehingga hanya mencapai 11,64 tahun di tahun 2014, tertinggal jauh dibandingkan rata-rata Jawa Barat yang telah mencapai 12,08 tahun.

Walaupun demikian, komponen IPM Kabupaten Karawang tidak seluruhnya tertinggal dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Dilihat dari sisi pengeluaran per kapita penduduk, Kabupaten Karawang mampu mengungguli kemampuan pengeluaran per kapita penduduk di Jawa Barat. Sebagai daerah sentra industri pengolahan yang unggul, pola konsumsi masyarakat Karawang relatif lebih baik, bahkan peningkatannya demikian pesat, jika di tahun 2010 pengeluaran per kapita penduduk baru sebesar Rp. 9.441,369,- naik menjadi Rp. 9.818,381,- di tahun 2015.

**Tabel 1.18**  
**IPM dan Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Daya Beli**  
**Tahun 2011-2015**

Indeks	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015*
IPM	65,21	65,97	66,61	67,08	67,60
Kesehatan	79,04	79,09	79,14	79,16	79,23
Pendidikan	51,09	52,52	53,84	54,92	56,05
Daya Beli	68,65	69,11	69,38	69,42	69,58

Sumber: BPS Kab. Karawang, IPM Metode Baru

\*)= angka sementara

## 1.4. Kedudukan, Kewenangan dan Struktur Organisasi

### 1.4.1 Kedudukan dan kewenangan

Semenjak digulirkannya kebijakan otonomi daerah kurang lebih 15 (Empat belas) tahun silam, yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, telah membawa perubahan yang cukup berarti bagi daerah-daerah dan juga bagi hubungan pusat dan daerah. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah memberi warna baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Melalui penitik-beratan otonomi daerah di level Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemberian kewenangan secara luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap pemerintah daerah diharapkan mampu menjadikannya sebagai dasar guna peningkatan keberdayaan, kesejahteraan dan daya saing daerahnya masing-masing. Dalam kaitan ini, untuk melaksanakan kewenangan tersebut perlu dibentuk organisasi perangkat daerah sesuai koridor hukum yang berlaku.

Di Kabupaten Karawang, berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sejak tahun 2011 hingga disusunnya dokumen ini, telah membentuk organisasi perangkat daerah Kabupaten Karawang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain serta Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, yang selanjutnya 3 (tiga) Peraturan Daerah di atas di satukan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Masing-masing perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi berbeda serta tidak tumpang tindih, namun memiliki keterkaitan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Keberadaan dan pembentukan organisasi perangkat daerah merupakan salah satu bentuk operasionalisasi pelaksanaan otonomi daerah yang pada hakekatnya adalah untuk menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan. Dalam konteks pelayanan sebagai salah satu fungsi hakiki pemerintahan, pelaksanaan asas desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah dapat membuat penyediaan pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat terjadi terutama karena melalui otonomi terjadi optimalisasi hirarkhi dalam penyampaian layanan akibat dari penyediaan pelayanan publik dilakukan oleh

institusi yang memiliki kedudukan lebih dekat dengan masyarakat sehingga keputusan-keputusan strategis dapat lebih mudah dibuat, juga karena adanya penyesuaian layanan terhadap kebutuhan dan kondisi yang ada di tingkat lokal sehingga alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di wilayahnya.

#### **1.4.2 Struktur Organisasi**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang, maka Kabupaten Karawang telah membentuk Kelembagaan dan telah melakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Karawang dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang, yang terakhir Peraturan Daerah dimaksud diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 dibuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 14 Dinas Daerah dan 12 Lembaga Teknis Daerah (7 Badan dan 3 Kantor, Inspektorat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan), 30 Kecamatan dan 12 Kelurahan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 juga dibentuk Lembaga Lain yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 rinciannya adalah sebagai berikut :

A. **Sekretariat Daerah.**

B. **Sekretariat DPRD.**

C. **Dinas Daerah** terdiri dari :

1. Dinas Bina Marga dan Pengairan.
2. Dinas Cipta Karya.
3. Dinas Kesehatan.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Dinas Perikanan dan Kelautan.
7. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan.
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.
10. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
13. Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana.
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

D. **Lembaga Teknis Daerah**, terdiri dari :

1. Inspektorat.
2. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah.
3. Badan Kepegawaian dan Diklat.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
6. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
8. Badan Ketahanan Pangan
9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Kantor Arsip dan Dokumentasi
11. Kantor Perpustakaan Daerah.
12. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan.



E. **Lembaga lain** terdiri dari:

1. Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Karawang
3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

F. **Kecamatan**, terdiri dari :

1. Kecamatan Karawang Barat;
2. Kecamatan Karawang Timur;
3. Kecamatan Pangkalan;
4. Kecamatan Tegalwaru;
5. Kecamatan Telukjambe Timur;
6. Kecamatan Telukjambe Barat;
7. Kecamatan Ciampel;
8. Kecamatan Klari;
9. Kecamatan Rengasdengklok;
10. Kecamatan Kutawaluya;
11. Kecamatan Batujaya;
12. Kecamatan Tirtajaya;
13. Kecamatan Pedes;
14. Kecamatan Cilebar;
15. Kecamatan Cibuaya;
16. Kecamatan Pakisjaya;
17. Kecamatan Cikampek;
18. Kecamatan Purwasari;
19. Kecamatan Jatisari;
20. Kecamatan Cilamaya Wetan;
21. Kecamatan Cilamaya Kulon;
22. Kecamatan Tirtamulya;
23. Kecamatan Telagasari;
24. Kecamatan Rawamerta;
25. Kecamatan Lemahabang;

26. Kecamatan Tempuran;
27. Kecamatan Majalaya;
28. Kecamatan Jayakarta;
29. Kecamatan Banyusari;
30. Kecamatan Kota Baru.

G. **Kelurahan**, terdiri dari :

1. Kelurahan Karawang Kulon
2. Kelurahan Adiarsa Barat
3. Kelurahan Tanjungpura
4. Kelurahan Tanjungmekar
5. Kelurahan Tunggakjati
6. Kelurahan Karangpawitan
7. Kelurahan Nagasari
8. Kelurahan Mekarjati
9. Kelurahan Karawang Wetan
10. Kelurahan Adiarsa Timur
11. Kelurahan Palumbonsari
12. Kelurahan Plawad

### 1.5. Isu – isu strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh dan perlu dilakukan penanganan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya aksesibilitas dan cakupan pelayanan sosial masyarakat terutama pelayanan pendidikan, kesehatan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.
- b. Kualitas pertumbuhan ekonomi (LPE) yang mencapai angka 4,62% (tingkat inflasi produsen 2,97%) dengan memeperhitungkan kontribusi migas, secara riil belum terdukung dengan kekuatan potensi ekonomi lokal. Kontribusi PDRB terbesar disumbang dari sektor industri 70,99%, perdagangan 10,02% dan sektor pertanian hanya 4,16%. Isu lainnya adalah ketersediaan sumberdaya tenaga kerja yang kompeten, kelembagaan usaha ekonomi masyarakat yang

tidak bankable, keterkaitan IKM dalam posisi rantai nilai industri dan kapasitas inovasi serta kewirausahaan para pelaku usaha KUKM.

- c. Masih belum optimalnya rendahnya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur wilayah.
- d. Belum optimalnya dalam aspek efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan publik, penumbuhkembangan modal sosial di masyarakat serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang didukung dengan profesionalisme dan akuntabilitas birokrasi.
- e. Belum optimalnya implementasi kualitas lingkungan hidup dan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- f. Masih rendahnya daya beli masyarakat masih rendah, ini dapat dilihat dari IPM komponen indeks daya beli (PPP) sebesar 69,58.
- g. Belum memadainya sarana dan prasarana dasar. Hal tersebut dapat dilihat dari program infrastruktur yang belum optimal, serta kondisi jalan yang sudah rusak dan berlubang. Selain itu, kondisi saluran irigasi pun masih sering menghambat para petani dan pelaku jasa perdagangan dalam melakukan proses kegiatan usaha.
- h. Di bidang kesehatan, yang masih menjadi isu utama adalah persoalan yang ada adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak serta masih adanya angka status gizi buruk. Persoalan lain adalah menyangkut sanitasi lingkungan (kesehatan lingkungan) yang masih jauh dari layak. Terutama di wilayah pesisir yang sering mengalami kesulitan terhadap akses ketersediaan air bersih.
- i. Disparitas antara wilayah pesisir dan daratan (daerah industri dan perdagangan) merupakan persoalan tersendiri yang memerlukan tindakan berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan sistem sosial budaya yang terdapat di wilayah pesisir. Berdasarkan data IPM per kecamatan dapat terlihat bahwa sebagian besar IPM dengan nilai terendah terdapat di wilayah-wilayah pesisir. Sektor perikanan laut dan budidaya yang merupakan kegiatan utama masyarakat pesisir belum mampu bertindak sebagai prime mover dalam memberikan efek pengganda

- pendapatan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari kontribusi sub sektor perikanan yang masih rendah.
- j. Masih belum optimalnya hubungan antara sektor pertanian dan sektor industri. Perubahan struktur perekonomian Kabupaten Karawang belum didukung oleh proses yang dinamis dalam bentuk keterkaitan (hubungan input-ouput) yang mantap antara sektor industri (sektor hilir) dengan sektor pertanian (sektor hulu). Sektor pertanian belum dikelola secara baik dalam bentuk usaha tani (*farm enterprise*) dan masih bersifat subsisten. Konsep agribisnis masih menjadi wacana yang sulit diaplikasikan. Bahkan kebijakan di bidang agraria sepertinya kurang memberi tempat pada sektor pertanian. Hal tersebut terlihat dari perubahan fungsi lahan dari sawah teknis menjadi kawasan perdagangan. Di lain pihak, petani masih sering mengeluhkan masalah ketersediaan input produksi yang murah seperti pupuk dan bibit serta persoalan harga gabah. Sektor KUKM pun belum berperan sebagai sokoguru perekonomian lokal Kabupaten Karawang karena masih menyimpan berbagai kelemahan, baik SDM dan Iptek yang rendah, sulitnya akses untuk mendapatkan kemudahan skim kredit perbankan, jangkauan pemasaran, bahan baku input, serta kualitas mutu produk yang rendah.
  - k. Di bidang administrasi pemerintahan dan pembangunan masih belum didukung oleh profesionalisme yang optimal sumberdaya aparatur baik segi kompetensi maupun integritas moral, sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal serta menyikapi penggunaan anggaran publik secara efektif, efisien dan ekonomis.
  - l. Belum optimalnya kemandirian fiskal Kabupaten Karawang yang tergambar masih tergantung dari DAU, serta masih belum optimalnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menjadi kontribusi dalam pembiayaan APBD.
  - m. Pertambahan penduduk (laju pertumbuhan Penduduk 1,04%) disertai tingginya arus urbanisasi ke perkotaan dan tingginya aktivitas masyarakat dapat meningkatkan limbah padat baik yang dihasilkan oleh rumah tangga, aktivitas kegiatan ekonomi maupun industri. Hal tersebut bertambah sulit, karena keterbatasan lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pengangkutan sampah ke TPA juga menyimpan kendala, karena jumlah

kendaraan yang kurang mencukupi dan kondisi peralatan yang telah tua. Masalah lainnya adalah pengelolaan TPA yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, jumlah volume sampah 960 M<sup>3</sup>, sedangkan yang telah dikelola hanya 732 M<sup>3</sup>. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsung diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai.

- n. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang menuntut adanya penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berakibat adanya perubahan terhadap kondisi alam baik daratan, perairan maupun udara. Tingginya permintaan sumberdaya alam yang tidak didukung oleh ketersediaan dan suplai akan menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap lingkungan yang berlebihan yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Buruknya kualitas lingkungan yang menyebabkan adanya pencemaran maupun kerusakan lingkungan ditandai oleh adanya, antara lain : peningkatan kerusakan lahan kritis, menurunnya kualitas udara, terjadinya pencemaran air, berkurangnya ketersediaan air bersih, kerusakan hutan dan lain-lain. Permasalahan lingkungan dari tahun ke tahun terus berlangsung. Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan tidak hanya akan menurunkan kondisi kualitas lingkungan saja tetapi dapat memberikan dampak yang serius terhadap kesehatan jiwa manusia. Kondisi tersebut terjadi karena berbagai faktor diantaranya adanya penyimpangan terhadap tata ruang, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, migrasi penduduk, kemiskinan, maraknya industrialisasi, tingkat kebutuhan yang semakin meningkat terutama terhadap pangan dan energi serta adanya bencana alam. Kompleksnya permasalahan lingkungan tersebut membutuhkan pemecahan masalah dengan pendekatan yang integratif dan komprehensif atau holistik antar disiplin ilmu maupun antar pihak-pihak institusi terkait (pemerintah) serta partisipasi masyarakat luas.

- o. Tingkat kerusakan jalan akibat *over loading* dan sistem penanganan yang belum memadai, berakibat pada hancurnya jalan sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai, sehingga diperlukan biaya tambahan untuk mempertahankan fungsi suatu jalan. Hal tersebut akan berpengaruh pada berkurangnya alokasi untuk jalan yang lain sehingga pada akhirnya pengelolaan seluruh jaringan jalan akan terganggu. Selain itu, kerugian paling besar secara langsung akan dialami oleh pengguna jalan, yaitu bertambahnya waktu tempuh perjalanan sehingga biaya operasional kendaraan akan semakin tinggi, serta akibat tak langsung komponen biaya transport pada proses distribusi barang semakin bertambah. Kerusakan prasarana jalan yang merupakan lintas ekonomi telah meningkatkan secara drastis biaya sosial ekonomi yang diderita oleh pengguna jalan. Apabila hal tersebut terus berlanjut dan tidak segera diatasi, diperkirakan dapat mengganggu kegiatan investasi di sektor ekonomi lainnya yang memerlukan dukungan jasa prasarana, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

#### **1.6. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2014 adalah :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Karawang Tahun 2011-2015;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2015;
31. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
32. Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;



## **1.7. Sistematika Pelaporan**

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2015 ini terdiri dari :

BAB I Pendahuluan ; berisi tentang Latar Belakang, Gambaran Umum Kabupaten Karawang, Indikator Makro, Struktur organisasi, Isu-isu strategis yang berpengaruh, Dasar Hukum serta Sistematika Pelaporan.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ; berisi Indikator Kinerja Utama, Visi dan Misi, Perjanjian Kinerja tahun 2015, Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2015, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015.

BAB III Akuntabilitas Kinerja ; berisi Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2015 (hasil pelaksanaan pembangunan tahun 2015), akuntabilitas keuangan.

BAB IV Penutup.

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menyusun Laporan Kinerja Tahun 2015 ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 Indikator Kinerja Utama**

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang lebih akuntabel dan terukur, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama untuk diterapkan di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Instansi Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor 060/Kep.355-Huk/2010 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang telah diperbaharui melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Karawang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2015 adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
**Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang Tahun 2015**

<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>KONDISI AWAL (2010)</b>	<b>TARGET 2015</b>	<b>KONDISI AKHIR (2015)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>URUSAN WAJIB</b>					
<b>PENDIDIKAN</b>					
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	1	APK SD sederajat	108.80%	119,10%	119.10%
	2	APM SD sederajat	96.85%	96,85%	96.85%
	3	APK SMP sederajat	88.73%	110,00%	110.00%
	4	APM SMP sederajat	65.76%	76.80%	76.80%
	5	Persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan	93.0%	97%	97%
	6	Persentase lulusan SMP/MTs yang melanjutkan	71.45%	97%	97%
	8	Persentase SD/MI terakreditasi	95%	100%	100%
	9	Persentase SMP/MTs terakreditasi	78%	100%	100%
	10	Persentase guru bersertifikat	30%	90%	90%
	11	Persentase putus sekolah SD/MI	0.12%	0,02%	0%
	12	Persentase putus sekolah SMP/MTs	0.57%	0,13%	0%
	Program Pendidikan Menengah	13	APK SMA sederajat	52.53%	85%
14		APM SMA sederajat	37.04%	60%	60%
15		Persentase lulusan SMA/SMK/MA yang melanjutkan	20%	60%	60%
Program Pendidikan Non Formal	16	Angka Melek Huruf (%)	93.14%	100%	100%
<b>KESEHATAN</b>					
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	17	Jumlah desa siaga aktif	40 %	100 %	100 %
	18	Prosentase rumah tangga yang ber PHBS	30 %	100 %	100 %
	19	Persentase sekolah yang ber PHBS	30%	100%	100%
	20	Persentase fasilitas umum yang ber PHBS	50%	100%	100%
	21	Jumlah Poskesdes aktif	40%	100%	100%
	22	Jumlah Posyandu Purnama	40%	100%	100%
	23	Jumlah Posyandu Mandiri	70%	100%	100%
Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	24	Peserta Jamkesmas mendapat jaminan pelayan kesehatan	90%	100 %	100 %
	25	Peserta Jamkesda mendapat jaminan pelayan kesehatan	90 %	100 %	100 %
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	26	Prosentase Bumil resti yang tertangani	90 %	100%	100%
	27	Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	100%	100%



<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>KONDISI AWAL (2010)</b>	<b>TARGET 2015</b>	<b>KONDISI AKHIR (2015)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	28	Prosentase Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80 %	100 %	100 %
	29	Persentase pelayanan ibu nifas	80%	100%	100%
	30	Persentase noeonatus dengan komplikasi yang ditangani	70%	100%	100%
	31	Persentase KN1 (kunjungan neonatal 1)	80%	100%	100%
	32	Persentase kunjungan bayi	80%	100%	100%
	33	Persentase pelayanan kesehatan anak balita	80%	100%	100%
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	34	Bayi usia 0-9 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	80 %	100 %	100 %
Program obat dan perbekalan kesehatan	35	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas dan jaringannya	90 %	100%	100%
Program perbaikan gizi masyarakat	36	Balita yang ditimbang berat badannya	80 %	100 %	100 %
	37	Balita gizi kurang ditangani	90 %	100 %	100 %
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	38	Puskesmas Prestasi dan terakreditasi	9 Pkm	100 %	100 %
Program standarisasi pelayanan kesehatan	39	Sarana kesehatan yang memenuhi standar pelayanan	80%	100%	100%
<b>PEKERJAAN UMUM</b>					
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	40	Panjang Peningkatan Jalan	Rusak Berat : 898 Km	896 Km	896 Km
	41	Jumlah Pembangunan Jembatan / Fly Over			
	42	Peningkatan Jembatan / Fly Over			
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	43	Panjang Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	13,211 km	20.711 km	20.711 km
Program pembangunan turap/talud/bronjong	44	Pembangunan turap/talud/bronjong	17,838 km	22,838 km	22,838 km
Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	45	Panjang pemeliharaan periodik jalan	385 km	388 km	388 km
	46	Panjang pemeliharaan rutin jalan	925 km	660 km	660 km
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya	47	Panjang jaringan irigasi	irigasi = 165 Km	165,00 Km	165,00 Km



<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>KONDISI AWAL (2010)</b>	<b>TARGET 2015</b>	<b>KONDISI AKHIR (2015)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>PERUMAHAN</b>					
Program Pengembangan Perumahan	48	Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni (rumah sederhana sehat)	0	150 Dusun	150 Dusun
Program lingkungan sehat perumahan	49	Jumlah pemeliharaan jalan lingkungan dan jalan setapak	-	150 Dusun	150 Dusun
	50	Jumlah penanganan air bersih	-	150 Dusun	150 Dusun
<b>PENATAAN RUANG</b>					
Program Perencanaan Tata Ruang	51	Jumlah Produk kebijakan tata ruang daerah	1	22	22
<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>					
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	52	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	4	5 Dokumen	5 Dokumen
<b>PERHUBUNGAN</b>					
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	53	Jumlah jaringan trayek yang dioperasikan	55	65 jaringan trayek	65 jaringan trayek
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	54	Jumlah fasilitas dan rambu jalan	Traffic light 6, rambu lalin 691 unit, marka jalan 23,767 ml	Rambu lalin 1.991 unit, RPPJ 400 unit, Guard rail 10.000m/l marka jalan 223.767 m/l	Rambu lalin 1.991 unit, RPPJ 400 unit, Guard rail 10.000m/l marka jalan 223.767 m/l
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>					
Program pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan	55	Volume sampah terangkut	175.200	385.440	385.440
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	56	Tersedianya peta rawan bencana	-	1 jenis kegiatan	1 jenis kegiatan
	57	Jumlah penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan	15 penanganan	60 penanganan	60 penanganan
	58	Terlaksananya koordinasi adipura	20 kali koordinasi	20 kali koordinasi	20 kali koordinasi
	59	Tersedianya Perda PPLH	-	1 dokumen	1 dokumen
	60	Jumlah industry yang dipantau	160 perusahaan		
	61	Jumlah perusahaan penghasil, pengumpul, dan pengelola limbah B3	50 perusahaan		
	62	Jumlah industry yang telah melaksanakan EPCM	50 perusahaan		
63	Jumlah kader lingkungan	30 kec			



<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>KONDISI AWAL (2010)</b>	<b>TARGET 2015</b>	<b>KONDISI AKHIR (2015)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>PERTANAHAN</b>					
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	64	Jumlah kecamatan yang diinventarisasi tanah-tanah garapan dan tanah kosong	0	10 Kec.	10 Kec.
<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>					
Program Penataan Administrasi Kependudukan	65	Tingkat pelayanan pendaftaran penduduk ( eKTP dan KK)	84%	94.00%	94.00%
	66	Tingkat pelayanan pencatatan sipil	33%	34.00%	34.00%
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>					
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	67	Jumlah PEKKA	23 Kelompok	45 kelompok	45 kelompok
	68	Jumlah kota layak anak	1	1	1
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Jumlah pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	0	1	1
<b>KELUARGA BERENCANA</b>					
Program keluarga berencana	69	Jumlah peserta KB aktif	344.555	624,496	624,496
	70	Jumlah peserta KB baru	122.234	100.875	100.875
<b>SOSIAL</b>					
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	71	Prosentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan serta perlindungan dan jaminan sosial	50%	70%	70%
<b>KETENAGA-KERJAAN</b>					
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	72	Peningkatan sarana pelatihan lembaga swasta	40%	70%	70%
	73	Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)	65%	80%	80%
	74	Pembinaan LKS Bipatrit dan verifikasi organisasi pekerja	70%	90%	90%
	75	Sosialisasi dan penyelesaian kasus PHI dan pemogokan	70%	90%	90%
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	76	Pembinaan dan peningkatan kualitas Lembaga Latihan kerja milik pemerintah/swasta dan perusahaan	40%	70%	70%



<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>KONDISI AWAL (2010)</b>	<b>TARGET 2015</b>	<b>KONDISI AKHIR (2015)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>					
Program Penciptaan Iklim usaha yang kondusif	77	Jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi SP Kesehatan	118 UMKM	239 UMKM	239 UMKM
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	78	Jumlah fasilitasi kemitraan UMKM	840 keg	1.040	1.040
Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha MKM	79	Promosi produk KUMKM per tahun melalui jaringan dan pameran UMKM	50 kali	70 kali	70 kali
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	80	Jumlah koperasi yang dibina	1317	1437	1437
	81	Jumlah koperasi sehat	110	260	260
<b>KEBUDAYAAN</b>					
Program Pengembangan Nilai Budaya	82	Persentase jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya	51%	100%	100%
	83	Jumlah grup kesenian dan pelaku seni budaya yang dibina	75%	100%	100%
<b>PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>					
Program peningkatan peran serta kepemudaan	84	Jumlah organisasi pemuda yang dibina	44 organisasi		
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	85	Jumlah cabang olahraga yang dibina	33 cabang		
<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>					
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	86	Jumlah Ormas dan LSM yang dibina			
Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal	87	Jumlah penegakan Perda yustisial	15	75	75
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	88	Jumlah operasi PEKAT	32	160 keg	160 keg
<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>					
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	89	Jumlah PERDA yang disetujui			
	90	Jumlah PERDA inisiatif			



<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>KONDISI AWAL (2010)</b>	<b>TARGET 2015</b>	<b>KONDISI AKHIR (2015)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	91	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebesar 65% dalam 5 tahun	162 Milyar	65%	65%
	92	Meningkatkan proporsi PAD terhadap seluruh pendapatan menjadi 23,13%	11,8%		
	93	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah adalah WTP			
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala daerah	94	Pemeriksaan khusus terhadap kasus pengaduan	80 kasus	100 kasus	100 kasus
	95	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	64 OPD	64 OPD	64 OPD
	96	Evaluasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan berkala	61 OPD	61 OPD	61 OPD
	97	Pembinaan dan Pemantauan kinerja SKPD	15 OPD	61 OPD	61 OPD
	98	Pembinaan dan pengembangan parat pengawas interbal pemerintah (APIP)	8 auditor	20 auditor	20 auditor
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	99	Jumlah produk hukum daerah		4295	4295
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	Evaluasi OPD	1	1	1
<b>KEPEGAWAIAN</b>					
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	101	Tersedianya Bezeting Formasi	1 Jenis	35 buku	35 buku
	102	Terselenggaranya tes CPNS tenaga honorer Kategori II	3000 tenaga honorer		
	103	Terbitnya SK perpanjangan dan pemutusan tenaga kontrak kerja (TKK)	202 TKK		
Program Peningkatan Kapasitas SDM aparatur	104	Meningkatnya kualitas Aparatur melalui Diklat			
		a. Diklatpim II	0	20	20
		b. Diklatpim III	0	200	200
		c. Diklatpim IV	0	360	360
		d. Prajabatan	0	2035	2035
	e. Diklat Teknis/ Fungsional	0	32	32	
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>					
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	105	Jumlah Swadaya Masyarakat Dalam Membangun Desa	10%	100%	100%
	106	Tingkat gotong royong masyarakat dalam membangun desa	5%	75%	75%



<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>KONDISI AWAL (2010)</b>	<b>TARGET 2015</b>	<b>KONDISI AKHIR (2015)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>STATISTIK</b>					
Program Pengembangan Data/ informasi/statistik Daerah	107	Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah	42%	80%	80%
<b>KEARSIPAN</b>	108	Tingkat Pelayanan informasi kearsipan daerah			
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	109	Jumlah ketersediaan jaringan dan cakupan pelayanan komunikasi informatika	Hardware Sisco Router dari DISKOMINFO Prop. Jabar	Tercapainya : Media komunikasi Interaktif Publik (G2C), Media Komunikasi Bisnis (G2B), Media Komunikasi Intra dan antar lembaga (G2G)	Tercapainya : Media komunikasi Interaktif Publik (G2C), Media Komunikasi Bisnis (G2B), Media Komunikasi Intra dan antar lembaga (G2G)
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	110	Jumlah Mass Media yang dibina		1860	1860
<b>PERPUSTAKAAN</b>					
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	111	Jumlah perpustakaan desa	178	1036	1036
<b>URUSAN PILIHAN</b>					
<b>PERTANIAN</b>					
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani					
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	112	Prosentase Produksi			
		a. Padi	80	96	96
		b. Palawija	70	95	95
		c. Hortikultura	75	95	95
Program pemberdayaan Penyuluh Pertanian	113	Pembinaan penyuluh Pertanian		250 gapoktan	250 gapoktan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	114	Produksi daging	10.150,1	10.630,31	10.630,31
	115	Produksi telur	4450,20	4550,16	4550,16
	116	Produksi susu	52.0	60,28	60,28
Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak	117	Peningkatan Pengendalian Penyakit Hewan Menular			
		a. Vaksin anthrax (dosis)		40000	40000
		b. Vaksin Rabies (dosis)		2000	2000



<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		<b>KONDISI AWAL (2010)</b>	<b>TARGET 2015</b>	<b>KONDISI AKHIR (2015)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		c. Desinfektan (liter)		1500	1500
		d. Vaksin flu burung (dosis)		1200.000	1200.000
<b>KEHUTANAN</b>					
Program Rehabilitasi hutan dan Lahan	118	Luas areal lahan kritis darat (ha)	3.279	0	0
	119	Luas lahan kritis pantai (ha)	5.615	0,553	0,553
<b>ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>					
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	120	Penyambungan listrik desa (lides) pada masyarakat kurang mampu	0%	40320 SR	40320 SR
<b>PARIWISATA</b>					
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	121	Jumlah kunjungan wisatawan per Tahun	287046	430,569	430,569
<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	122	Produksi ikan Tambak (ton)	35.101,19	39.760,93	39.760,93
	123	Produksi ikan Kolam (ton)	2.22,35	2.642,47	2.642,47
	124	Produksi ikan Minapadi (ton)	611,92	735,25	735,25
	125	Produksi ikan KJA (ton)	165,17	42,22	42,22
Program pengembangan Perikanan Tangkap	126	Produksi ikan Laut (ton)	7.616,73	8.274,79	8.274,79
	127	Produksi ikan Perairan Umum pada :			
		- sungai (ton)	66,57	12.76	12.76
		- rawa (ton)	41,06	10.51	10.51
		- bekas galian C (ton)	88,59	66.22	66.22
<b>PERDAGANGAN</b>					
Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri	128	Pegawasan penyaluran barang beredar kebutuhan pokok masyarakat	10 pasar	10 pasar	10 pasar
	129	Pengawasan dan Pembinaan distributor / penyalur	1 keg	1 keg	1 keg
<b>INDUSTRI</b>					
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	130	Penerapan dan partisipasi konveksi Gugus Kendali Mutu (GKM)	5 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan
	131	Fasilitasi pembuatan desain kemasan produk industri kecil Agro	40 Perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan
Program peningkatan kemampuan teknologi industri	132	Restrukturisasi peralatan IKM	20	150	150
<b>TRANSMIGRASI</b>					
Program Transmigrasi Regional	133	Pengerahan dan pengiriman transmigran	70%	90%	90%

\*) RPJMD Kab. Karawang 2011 -2015

## 2.2 Visi dan Misi Kabupaten Karawang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Organik Otonomi Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, daerah yang telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung harus menyusun dokumen perencanaan jangka menengah atau yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2015 telah ditetapkan sebagai pedoman/acuan bagi penyelenggaraan pembangunan pada tanggal 5 Agustus 2011 melalui Perda Nomor 8 Tahun 2011. Visi Kabupaten Karawang selama kurun waktu tersebut adalah : **"KARAWANG SEJAHTERA BERBASIS PEMBANGUNAN BERKEADILAN DILANDASI IMAN DAN TAQWA"**.

Dalam rangka mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 5 (lima) Misi yang memuat tujuan sasaran strategi pembangunan sebagai berikut :

**MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT, BERBUDAYA DAN RELIGIUS YANG HARMONIS.**

**Tujuan :**

Yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga secara terencana.
5. Meningkatkan kehidupan yang dinamis dan harmonis antar dan inter umat beragama.
6. Meningkatkan upaya-upaya pelestarian nilai-nilai tradisi, budaya dan kearifan lokal.

**Sasaran :**

1. Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun.
2. Tersedianya layanan pendidikan non formal.
3. Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima.
4. Meningkatnya minat baca masyarakat.
5. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga.

6. Berkembangnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
7. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan.
8. Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian PMKS penerima manfaat pelayanan kesejahteraan sosial.
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepesertaan KB dan penyelenggaraan kesehatan reproduksi.
10. Meningkatnya kesetaraan gender.
11. Terbangunnya kesholehan sosial, individu, keluarga dan masyarakat yang berkontribusi kebaikan bagi lingkungan.
12. Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai tradisi, budaya dan kearifan lokal karawang.

## **Kebijakan :**

### **1. Bidang Pendidikan.**

- a. Mengalokasikan anggaran untuk meringankan beban biaya pendidikan.
- b. Peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berstandar.
- d. Pengembangan layanan perpustakaan.
- e. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan luar sekolah.
- f. Penguatan dan pelaksanaan regulasi, pranata serta norma standar pedoman dan ketentuan (NSPK) bidang pendidikan.
- g. Penguatan kelembagaan dan manajemen sumberdaya manusia.
- h. Penguatan fungsi perencanaan, evaluasi dan pengendalian program kerja penyelenggaraan pendidikan yang berbasis data dan informasi.
- i. Pembangunan Institut Kelautan dan Perikanan Nasional (IKPN).

### **2. Bidang Perpustakaan.**

Pengembangan layanan perpustakaan.

### **3. Bidang Kesehatan.**

- a. Pengembangan desa siaga menuju desa sehat.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan asuransi semesta (Universal Coverage).
- c. Penurunan resiko kematian ibu, bayi dan balita.
- d. Pelayanan vaksinasi dasar lengkap.
- e. Mewujudkan sistem surveillans dan monitoring.

- f. Pengadaan dan pemerataan obat serta perbekalan kesehatan.
- g. Menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih.
- h. Penanggulangan gizi kurang.
- i. Peningkatan sarana kesehatan kesehatan yang terstandar dan terakreditasi.
- j. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.
- k. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

#### **4. Bidang Keluarga Berencana.**

Penyediaan pelayanan, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi.

#### **5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

- a. Meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan.
- b. Penyediaan pelayanan rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi terhadap tindak kekerasan dan trafficking.

#### **6. Bidang Sosial.**

- a. Meningkatkan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat.
- b. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

#### **7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga.**

- a. Pembinaan kelembagaan kepemudaan.
- b. Pengembangan prestasi atlet daerah dan pembangunan sarana olahraga.
- c. Peningkatan prestasi olahraga.

#### **8. Bidang Kebudayaan.**

- a. Pengembangan kapasitas pelaku budaya.
- b. Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
- c. Pelestarian situs sejarah dan budaya.

#### **9. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan.**

- a. Pembinaan kehidupan antar dan inter umat beragama.
- b. Fasilitasi dan pembinaan aktifitas kehidupan keagamaan.

#### **Program :**

- 1. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
- 2. Pendidikan menengah.
- 3. Pendidikan non formal.



4. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Manajemen pelayanan pendidikan.
6. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
7. Peningkatan peran serta pemuda dan olahraga.
8. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
9. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
11. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
12. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.
13. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
14. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
15. Pengendalian penyakit tidak menular.
16. Surveillance epidemiologi, imunisasi dan kesehatan matra.
17. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
18. Upaya kesehatan masyarakat.
19. Peningkatan manajemen kesehatan.
20. Pengembangan lingkungan sehat.
21. Obat dan perbekalan kesehatan.
22. Pengawasan obat dan makanan.
23. Perbaikan gizi masyarakat.
24. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan jaringannya.
25. Standarisasi pelayanan kesehatan.
26. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya.
27. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya).
28. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
29. Peningkatan Pelayanan Sosial.
30. Keluarga berencana.
31. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

32. Pelayanan Kontrasepsi.
33. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
34. Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan.
35. Peningkatan Kualitas data dan Jaringan Informasi.
36. Pengembangan nilai-nilai budaya.
37. Pengembangan Pemasaran Wisata.
38. Pengembangan Destinasi Pariwisata.

## **MISI 2 : Penguatan Struktur dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.**

### **Tujuan :**

Yang ingin dicapai adalah :

Meningkatkan daya beli masyarakat dan ketahanan pangan daerah.

### **Sasaran :**

1. Meningkatnya nilai produksi ekonomi daerah.
2. Perluasan kesempatan kerja dan menurunkan angka pengangguran.
3. Meningkatnya peran kelembagaan dan akses koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
4. Mendorong peningkatan investasi.
5. Terpenuhinya ketersediaan pangan bagi konsumsi masyarakat.
6. Membangun dan meningkatkan lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan sistem bagi hasil yang proporsional.

### **Kebijakan :**

#### **1. Bidang Pertanian.**

- a. Pengembangan usaha-usaha agribisnis pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan kelembagaan, penerapan inovasi dan teknologi pertanian, pengembangan industri pengolah hasil pertanian.
- b. Pengembangan sistem dan sumberdaya penyuluh pertanian.
- c. Pengembangan sektor peternakan diarahkan pada peningkatan skala usaha melalui rintisan pola agribisnis, fasilitasi desain produk, penanganan produksi dan pengendalian penyakit ternak.

- d. Rintisan pengembangan one village one product sektor pertanian.
- e. Pembangunan terminal agribisnis daerah.

## **2. Bidang Kelautan dan Perikanan.**

- a. Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan menuju pengembangan kawasan minapolitan.
- b. Pembangunan rumah potong hewan berbasis tata ruang.

## **3. Bidang Industri.**

- a. Pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha bagi masuknya investor sektor industri.
- b. Pengembangan industri kecil dan menengah yang mampu memanfaatkan posisi dalam rantai nilai industri dan potensi sumber daya lokal melalui pengembangan sentra IKM, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan IKM.
- c. Rintisan pengembangan one village one product sektor industri.

## **4. Bidang Perdagangan.**

- a. Pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha serta sarana dan prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi barang produksi dan konsumsi.
- b. Pengembangan kerjasama perdagangan dalam rangka mendukung promosi produk unggulan daerah.

## **5. Bidang Pariwisata.**

- a. Penyediaan fasilitasi, regulasi dan iklim usaha kepariwisataan daerah.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW).
- c. Pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha serta kemitraan sektor pariwisata daerah.

## **6. Bidang Ketenagakerjaan.**

- a. Peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja.
- b. Penyediaan informasi ketenagakerjaan.
- c. Pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi bidang ketenagakerjaan.

## **7. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.**

- a. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan UMKM dan sistem kelembagaan koperasi.
- b. Meningkatkan skala usaha KUMKM melalui fasilitasi pembiayaan, pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk.
- c. Membangun dan meningkatkan lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan system bagi hasil yang proporsional. Strategi yang direncanakan adalah membangun lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan sistem bagi hasil.

### **Program :**

1. Peningkatan ketahanan pangan.
2. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
3. Peningkatan kesejahteraan petani.
4. Pemberdayaan penyuluh pertanian.
5. Peningkatan produksi pertanian.
6. Rehabilitasi hutan dan lahan.
7. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.
8. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan.
9. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.
10. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
11. Pengembangan budidaya perikanan.
12. Pengembangan perikanan tangkap.
13. Peningkatan sistem informasi perikanan dan kelautan.
14. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi perikanan.
15. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
16. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan dan kelautan.
17. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.
18. Peningkatan pemasaran hasil produk pertanian.
19. Pengembangan industri kecil, menengah dan besar.
20. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
21. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

22. Peningkatan dan pengembangan ekspor.
23. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
24. Pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenagalistrikan.
25. Peningkatan kemampuan teknologi industri.
26. Pengembangan dan pembinaan usaha daerah.
27. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
28. Peningkatan kesempatan kerja.
29. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
30. Transmigrasi regional.
31. Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.
32. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
33. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
34. Penciptaan iklim usaha-usaha kecil, menengah yang kondusif.
35. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
36. Peningkatan promosi dan kerja sama investasi.
37. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

**MISI 3 : MENINGKATKAN PELAYANAN KETERSEDIAAN  
INFRASTRUKTUR WILAYAH.**

**Tujuan :**

Yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas ketersediaan kebijakan.
2. Meningkatkan keandalan infrastruktur daerah yang mendukung perkembangan wilayah dan aktifitas sosial ekonomi masyarakat.
3. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana dan keterpaduan antar moda dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa.

**Sasaran :**

1. Tersedianya kebijakan penataan ruang daerah.
2. Meningkatnya kualitas sistem infrastruktur jaringan jalan.
3. Tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan irigasi.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman dan perumahan.
5. Meningkatkan akses dan ketersediaan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.
6. Meningkatkan keterjangkauan dan kelancaran pelayanan transportasi.

## **Kebijakan :**

### **1. Bidang Tata Ruang.**

- a. Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah, standar dan pedoman bidang penataan ruang.
- b. Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan pemanfaatan serta pengendalian ruang wilayah yang selaras dengan pola dan struktur ruang wilayah.
- c. Menetapkan kawasan rawan bencana dan pengembangan sistem penanganan bencana.
- d. Jalan antar kawasan.

### **2. Bidang Pekerjaan Umum.**

- a. Mengembangkan ruas jalan kolektor primer penghubung antar pusat kegiatan (PKW-PKL dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten diarahkan pada :
  - 1) Meningkatkan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsi jalan (persyaratan lebar minimal perkerasan 7 m, bahu jalan 1,5 m, drainase 1 m).
  - 2) Meningkatkan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan nasional.
  - 3) Membangun ruas jalan baru yang mendukung pengembangan wilayah, sesuai ketentuan teknis, kelas dan fungsi jalan yang direncanakan.
  - 4) Meningkatkan segmen jalan lintas yang masih di bawah standar untuk memenuhi persyaratan lebar minimum (6 m dengan memperhatikan kondisi lokasi).
- b. Meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten :
  - 1) Meningkatkan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsi jalan (persyaratan lebar minimal perkerasan 4 m, bahu jalan 1 m, drainase 1 m).
  - 2) Meningkatkan segmen jalan lintas yang masih di bawah standar untuk memenuhi persyaratan lebar minimum (4 m dengan memperhatikan faktor lokasi).

- c. Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa, diarahkan pada peningkatan kemantapan struktur konstruksi jalan rigid/hotmix (persyaratan lebar minimal perkerasan 3,5 m, bahu jalan 0,75 m, drainase 0,5 m).
- d. Mempertahankan kondisi konstruksi jembatan sesuai rencana umur teknis yang telah ditetapkan :
  - 1) Membangun jembatan penghubung pada lokasi strategis.
  - 2) Optimalisasi manajemen pemeliharaan konstruksi jembatan.
- e. Meningkatkan koordinasi pemanfaatan, efisiensi penyaluran, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas aliran.
- f. Meningkatkan upaya-upaya konservasi sumberdaya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai.
- g. Mengembangkan sistem prasarana pengendalian banjir dan penanganan abrasi pantai.
- h. Kajian data teknis jalan, jembatan dan pengairan.
- i. Mengembangkan pelayanan jaringan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah rawan air bersih.
- j. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan air bersih.
- k. Mengembangkan kebijakan pengolahan air limbah secara partisipatif.
- l. Mengembangkan sistem regulasi, manajemen dan sarana prasarana pelayanan persampahan.
- m. Pengembangan kebijakan dan penataan lingkungan kumuh pemukiman.
- n. Penataan taman kota dengan memperhatikan aspek estetika, fungsi dan nilai arsitektural.
- o. Penyediaan lapang olahraga masyarakat di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- p. Penataan bangunan publik yang memiliki nilai historis, religi dan fungsi sosial lainnya.
- q. Menyediakan instrumen kebijakan, kemandirian dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang terjangkau baik melalui mekanisme pasar maupun mekanisme yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat.

- r. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan saluran irigasi berbasis partisipasi masyarakat.

### **3. Bidang Perhubungan.**

- a. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi.
- b. Mengembangkan kebijakan sistim jaringan transportasi daerah.
- c. Penegakan hukum dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan.

#### **Program**

1. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam.
2. Perencanaan tata ruang.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintah dan fasilitas umum.
4. Pengelolaan areal pemakaman.
5. Pembangunan jalan dan jembatan.
6. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya.
7. Lingkungan sehat perumahan.
8. Pemanfaatan ruang.
9. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.
10. Pengembangan prasarana penyiaran informasi dan media massa.
11. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
12. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
13. Peningkatan pelayanan angkutan.
14. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
15. Keselamatan transportasi darat.
16. Pembuatan sarana informasi media luar ruang.

#### **MISI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH.**

##### **Tujuan :**

Yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan.
2. Meningkatkan kamandirian desa.

## **Sasaran :**

1. Terwujudnya birokrasi daerah yang profesional dan proporsional.
2. Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan publik.
3. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
4. Terlaksananya pengawasan pada SKPD dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
5. Berkembangnya nilai-nilai demokrasi lokal dan wawasan kebangsaan.
6. Meningkatnya kemampuan keuangan, kelembagaan dan administrasi desa.
7. Terciptanya kondisi aman lingkungan masyarakat.

## **Kebijakan :**

### **1. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas SDM aparatur.
- b. Pengembangan kebijakan, penataan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan sistim prosedur kerja berbasis Teknologi Informasi (TI).
- c. Pengembangan kebijakan dn pengelolaan pendapatan dan pembiayaan daerah.
- d. Pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah yang akuntabel.
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan dan standarisasi yang ditetapkan.
- f. Pengembangan kebijakan dan pengelolaan barang milik daerah.
- g. Pengembangan kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- h. Melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan secara komprehensif serta penilaian terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD.
- i. Peningkatan kapasitas legislatif.
- j. Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi parpol serta orsos/ormas.

### **2. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.**

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

### **3. Bidang Perencanaan Pembangunan.**

- a. Pengembangan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis data.
- b. Pembuatan master plan sistrm penyediaan air Tinum se Kabupaten Karawang.

- c. Pembuatan master plan pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Karawang dari jalan-jalan batang-cabang sampai jalan-jalan ranting.
- d. Pembuatan master plan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi yang sistematis.

#### **4. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.**

- a. Pembinaan, pendidikan politik dan bela negara.
- b. Koordinasi dan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### **5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.**

- a. Pengembangan kebijakan, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- b. Pengembangan kebijakan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Penguatan pembiayaan pembangunan desa.

#### **Program :**

1. Pembinaan dan pengembangan aparatur.
2. Pendidikan kedinasan.
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
4. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
5. Pengembangan sistem diklat.
6. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
7. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
8. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
9. Penataan peraturan perundang-undangan.
10. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
11. Pengkoordinasian dan informasi pelaksanaan pembangunan.
12. Pengkajian dan evaluasi kebijakan pembangunan.
13. Pengendalian dan monitoring pembangunan.
14. Kerjasama informasi dengan mass media.
15. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
16. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
17. Penataan administrasi kependudukan.

18. Perencanaan data/informasi/statistik daerah.
19. Perencanaan pembangunan daerah.
20. Perencanaan pembangunan ekonomi.
21. Perencanaan sosial dan budaya.
22. Pendidikan politik masyarakat.
23. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
24. Pengembangan wawasan kebangsaan.
25. Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pencegahan tindakan kriminal.
26. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).
27. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
28. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
29. Pembangunan desa/kelurahan.
30. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
31. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
32. Penataan daerah otonomi baru.
33. Perbaikan sistem administrasi kearsipan.
34. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
35. Peningkatan kualitas pelayanan informasi.
36. Peningkatan mutu pelayanan perizinan.

**MISI 5 : MENINGKATKAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.**

**Tujuan :**

Yang ingin dicapai adalah :

Terjaganya kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta fungsi ekosistem wilayah secara berkelanjutan.

**Sasaran :**

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan sumber daya air, fungsi lahan dan kualitas udara.
2. Berkurangnya volume dan dampak gangguan akibat timbunan sampah.

## **Kebijakan :**

### **Bidang Lingkungan Hidup.**

- a. Meningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan udara.
- b. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- c. Meningkatkan upaya-upaya koordinasi dan penegakan hukum, pengawasan AMDAL, UPL/UKL, pelaksanaan penyusunan KLHS.
- d. Mengembangkan sistem informasi manajemen lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup.
- f. Mengembangkan sistem regulasi, metode dan sarana prasarana pelayanan persampahan.
- g. Mengembangkan penerapan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat.
- h. Peningkatan kapasitas SDM terutama PPNS bidang lingkungan hidup.
- i. Penanganan lahan kritis dan pesisir pantai.

## **Program :**

1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
3. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
4. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
5. Pengelolaan dan ekosistem pesisir dan laut.
6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

### **2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015**

Program dan kegiatan dalam RPJM Kabupaten Karawang tahun 2011 – 2015 masih bersifat indikatif, oleh sebab itu setiap tahun berdasarkan hasil Musrenbang disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang yang selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Kerja SKPD dan Perjanjian Kinerja SKPD.

Dalam konteks akuntabilitas kinerja, Perjanjian Kinerja SKPD mencantumkan sasaran strategis berikut indikator kinerja dan target tahun 2015, yaitu :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Kabupaten Karawang Tahun 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM		
1	Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun.	1	Angka Partisipasi Kasar			
		a.	SD sederajat	119,10%	Program wajar dikdas	
		b.	SMP sederajat	110%		
		c.	SMA Sederajat	85%		Program Pendidikan Menengah
		2	Angka Partisipasi Murni			
		a.	SD sederajat	96,85%	Program wajar dikdas	
		b.	SMP sederajat	76%		
		c.	SMA sederajat	60%		Program Pendidikan Menengah
		3	Prosentase guru berkualifikasi S1		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		a.	Guru SD	100%		
		b.	Guru SMP	80%		
		c.	Guru SMA	90%		
2	Tersedianya layanan pendidikan non Formal	1	Angka Melek Huruf	90%	Program Pendidikan Non Formal	
		2	Prosentase PKBM yang terakreditasi	50%		
3	Berkembangnya perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1	Jumlah Desa Siaga Aktif	100%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
		2	Prosentase Poskesdes aktif	60%		
		3	Prosentase posyandu aktif	60%		
		4	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
		5	Prosentase K4	80%	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	
		6	Prosentase Puskesmas DTP PONE	100%		
		7	Prosentase Balita gizi kurang yang tertangani	90%	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
4	Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian PMKS penerima Manfaat pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Prosentase PMKS penerima manfaat yang mampu mandiri	40%	Program Peningkatan Pelayanan Sosial	
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kepesertaan KB dan penyelenggaraannya	1	Prosentase Peningkatan Peserta KB PUS	50%	Program keluarga berencana	
6	Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai tradisi, budaya dan kearifan lokal karawang	1	Cakupan Organisasi seni yang dibina dan difasilitasi	50%	Program Pengembangan Nilai budaya	
7	Meningkatnya nilai produksi ekonomi daerah	1	Prosentase Peningkatan Produksi :			
		a.	Padi	3%	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi	
		b.	Palawija	5%	Program Pengembangan Palawija	
		c.	Hortikultura	2%	Program Pengembangan sentra jamur merang dan sayuran dataran rendah	



NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	
		2	Prosentase Peningkatan Produksi Peternakan		Program Peningkatan Produksi dan pemasaran hasil peternakan
		a. Daging		5%	
		b. Telur		5%	
		3	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan		Program Pengembangan Perikanan Tangkap
		a. Perikanan Tangkap		1%	
		b. Perikanan Budi Daya		4%	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		4	prosentase peningkatan pendapatan		Program Peningkatan Produksi dan pemasaran hasil pertanian
		a. Petani		15%	
b. Peternak		15%			
5	Prosentase peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah		1%	Program Pengembangan Industri kecil, menengah dan besar	
8	Mendorong peningkatan Investasi	1	Prosentase peningkatan investasi PMDN	5%	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
9	Perluasan Kesempatan Kerja dan menurunkan angka pengangguran	1	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri	30%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		2	Prosentase Penurunan angka pengangguran	20%	
		3	Prosentase penyelesaian Kasus PHI dan Pemogokan	90%	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
10	Meningkatnya Peran kelembagaan dan akses koperasi dan UMKM	1	Prosentase peningkatan koperasi sehat	50%	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
		2	Prosentase peningkatan UMKM yang memiliki sertifikasi SP Kesehatan	20%	
11	Meningkatnya kualitas sistem infrastruktur jaringan jalan	1	Prosentase Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik	50%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
					Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		2	Prosentase peningkatan drainase kawasan perkotaan	15%	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
12	Tersedianya Infrastruktur sumberdaya air dan irigasi	1	Prosentase Saluran irigasi dalam kondisi baik	50%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan Lainnya
13	Meningkatnya keterjangkauan dan kelancaran pelayanan transportasi	1	prosentase jaringan trayek tersedia	50%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		2	Prosentase jalan kabupaten yang dipasang rambu	50%	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
					Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan



NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	
14	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah	1	prosentase kesesuaian pelaksanaan program / kegiatan dengan perencanaan tahunan/RKPD	90%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		2	prosentase peningkatan PAD	15%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		3	Prosentase Proporsi PAD terhadap seluruh pendapatan	20%	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
		4	Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
15	Terwujudnya birokrasi daerah yang profesional dan proporsional	1	Prosentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	60%	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
16	Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan publik	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan		Program Penataan Administrasi Kependudukan
		a.	KTP elektronik	5%	Program Pencatatan Sipil
		b.	KK	30%	
		c.	Kutipan Akta Kelahiran	50%	
17	Terciptanya Kondisi aman lingkungan masyarakat	1	Cakupan Penegakan Perda dan Perbup	40%	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
		2	Cakupan Rasio Petugas Linmas	50%	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
18	Meningkatnya Kemandirian desa	1	Prosentase peningkatan Alokasi Dana Desa	5%	Program Pembangunan Desa/Kelurahan
19	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan sumberdaya air, fungsi lahan dan kualitas udara	1	Prosentase jumlah eco industrial	10%	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
20	Berkurangnya Volume dan dampak akibat timbunan sampah	1	Prosentase volume sampah yang mampu diangkat	60%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemkab Karawang 2015

## 2.4 Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahun 2015

Dalam rangka pencapaian pada masing-masing misi, sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2014, prioritas pembangunan, difokuskan melalui beberapa agenda prioritas, yaitu :

Agenda prioritas Misi Pertama, **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Berbudaya dan Religius yang Harmonis**, diarahkan sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3**  
**Agenda Prioritas 1.1.**  
**Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan**

No	Tematik	Fokus
1	Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Rintisan Wajar Dikdas 12 Tahun	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten sinergi dengan BOS Pusat dan Provinsi</li><li>2. Subsidi biaya operasional SMA</li><li>3. Pembangunan Ruang Kelas Baru</li><li>4. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan</li><li>5. Peningkatan sarana belajar sesuai standarisasi yang ditetapkan (Laboratorium, perpustakaan, ruang guru, ruang penjaga, ruang TU, WC, lapangan olah raga, Prasarana lingkungan sekolah)</li></ol>
2	Pengembangan pendidikan kejuruan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis kebutuhan dunia usaha/ dunia industri</li><li>2. Peningkatan sarana dan prasarana SMK yang terstandar</li><li>3. Subsidi SMK</li></ol>
3	Peningkatan Mutu pendidikan dan kesejahteraan Guru	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian beasiswa tugas belajar</li><li>2. Fasilitasi sertifikasi standar kompetensi guru</li><li>3. Peningkatan kemampuan guru bidang studi</li><li>4. Peningkatan mutu peserta didik</li></ol>

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2015

**Tabel 2.4**  
**Agenda Prioritas 1.2.**  
**Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan**

No	Tematik	Fokus
1	Pengembangan sistem jaminan kesehatan ( <i>Universal coverage</i> )	Penyediaan dana dan peningkatan sistem pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat
2	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanggulangan gizi buruk</li><li>2. Pemberdayaan Posyandu</li><li>3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (terutama bidan desa)</li></ol>
3	Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan primer	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap; dan puskesmas rawat inap mampu PONEC secara bertahap sesuai standar yang berlaku</li><li>2. Optimalisasi kinerja pelayanan Poskesdes</li></ol>
4	Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan vaksinasi dasar lengkap</li><li>2. Pencegahan dan penanggulangan KLB Penyakit</li><li>3. Pengembangan <i>system surveillance</i></li></ol>
5	Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan</li><li>2. Peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan</li></ol>

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2015

**Tabel 2.5**  
**Agenda Prioritas 1.3.**  
**Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama yang Harmonis**

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan kerukunan hidup antar dan inter	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan komunikasi antar dan inter umat beragama</li><li>2. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan</li></ol>



No	Tematik	Fokus
	umat beragama	bermasyarakat
2	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial keagamaan	1. Pembinaan kelembagaan sosial keagamaan 2. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2015

**Tabel 2.6**  
**Agenda Prioritas 1.4.**  
**Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	1. Optimalisasi kinerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 2. Penyusunan dan Evaluasi pelaksanaan RPJM Penanggulangan kemiskinan
2	Peningkatan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Penyediaan dan pemberdayaan panti rehabilitasi sosial 2. Advokasi, fasilitasi penanganan dan perlindungan anak dan perempuan 3. Penanganan masyarakat korban bencana

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2015

Agenda prioritas Misi Kedua **Penguatan Struktur dan Kelembagaan Ekonomi Daerah**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7**  
**Agenda Prioritas 2.1.**  
**Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan Daerah**

No	Tematik	Fokus
1	Revitalisasi sektor pertanian	1. Pengembangan komoditas unggulan sebagai rintisan <i>one vilage one product</i> Pengembangan varietas benih adaptif 2. Optimasi lahan dan sumberdaya air bagi pertanian 3. Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam bentuk Koperasi Tani yang <i>bankable</i> 4. Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian 5. Pengembangan desain dan standar mutu beras karawang 6. Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida 7. Fasilitasi teknologi dan mekanisasi pertanian
2	Pengembangan sentra produksi perikanan (mina bisnis)	1. Pengembangan sentra produk-produk olahan hasil perikanan 2. Peningkatan sarana dan prasarana TPI, TPHT 3. Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya dalam bentuk Koperasi nelayan dan pembudidaya yang <i>bankable</i> 4. Pengembangan desain dan standar mutu hasil perikanan
3	Pengembangan IKM	1. Penataan sentra IKM Unggulan menuju <i>one vilage one product</i> sektor industri.
4	Pengembangan pasar	1. Penataan pasar milik pemerintah 2. Fasilitasi pengembangan pasar desa 3. Terminal agribisnis (diutamakan Pasar Induk Beras) 4. Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) berbasis tata ruang



No	Tematik	Fokus
5	Penguatan kapasitas usaha KUMKM	1. Pengembangan kebijakan, fasilitasi dan penyediaan skema pembiayaan KUMKM 2. Pembinaan kelembagaan dan kewirausahaan KUMKM
6	Penyediaan fasilitas, regulasi dan iklim usaha kepariwisataan daerah	1. Pemantapan manajemen perencanaan ODTW 2. Pembuatan RIPPDA
7	Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata ( ODTW )	1. Pembuatan dan peningkatan sarana dan prasarana kampung budaya dan wisata gerbang Karawang ( 3 tahun ) 2. Peningkatan sarana dan prasarana ODTW bukit Sanggabuana ( 4 tahun )

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2015

**Tabel 2.8**  
**Agenda Prioritas 2.2**  
**Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan Ketenagakerjaan**

No	Tematik	Fokus
1	Perluasan Kesempatan Kerja	1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja 2. Penyediaan Sistem Informasi Bursa Tenaga Kerja 3. Pengembangan Regulasi Penempatan Tenaga Kerja
2	Perlindungan Ketenagakerjaan	1. Penerapan Sistem Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Kerja 2. Pengembangan Regulasi dan Pengawasan Kebijakan UMK 3. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) 4. Perlindungan TKI

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2014

Agenda prioritas Misi Ketiga **Meningkatkan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.9**  
**Agenda Prioritas 3.1**  
**Pengembangan Sistem Transportasi Kabupaten**

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan Jaringan Jalan dan Jembatan	1. Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer penghubung antar pusat kegiatan (PKW - PKL, dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten 2. Meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten 3. Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa 4. Pembangunan Jembatan Penghubung Strategis 5. Jalan antar kawasan
2	Pengembangan Sistem Moda Transportasi	1. Pengembangan Regulasi sistim transportasi Kabupaten 2. Pembangunan Terminal 3. Peningkatan sarana prasarana transportasi

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2015

**Tabel 2.10**  
**Agenda Prioritas 3.2**  
**Pengelolaan Sumberdaya Air**

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan upaya upaya pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi masyarakat</li><li>2. Perlindungan sumber daya air</li></ol>
2	Pengembangan sistem prasarana pengendalian banjir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan <i>master plan</i> mitigasi bencana</li><li>2. Penanganan abrasi pantai</li><li>3. Koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)</li></ol>

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2015

**Tabel 2.11**  
**Agenda Prioritas 3.3**  
**Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman dan Perumahan**

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan air minum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)</li></ol>
2	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Penataan Kampung Layak Huni, meliputi Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan )</li></ol>

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2015

**Tabel 2.12**  
**Agenda Prioritas 3.4**  
**Penyediaan Prasarana Bangunan Pemerintahan dan Ruang Publik**

No	Tematik	Fokus
1	Penyediaan bangunan Pemerintahan dan ruang publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan Gedung Kantor Pemerintah</li><li>2. Pembangunan <i>Public Space (prototype Karangpawitan)</i> di Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</li><li>3. Penataan Taman Kota</li></ol>

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2015

Agenda prioritas Misi Keempat **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.13**  
**Agenda Prioritas 4.1**  
**Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

No	Tematik	Fokus
1	Pengembangan sistem Administrasi pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penataan sistem dan prosedur kerja pelayanan publik (PTSP, LPSE, <i>e-KTP</i>)</li><li>2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang terstandar</li></ol>
2	Peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur (formal, teknis dan fungsional)</li><li>2. Penyusunan regulasi dan penerapan penilaian kinerja</li><li>3. Peningkatan tunjangan kesejahteraan pegawai</li></ol>

No	Tematik	Fokus
3	Peningkatan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan PAD</li><li>2. Pengembangan sistem manajemen aset daerah</li><li>3. Pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah</li><li>4. Peningkatan sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data</li><li>5. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal</li></ol>
4	Meningkatkan upaya-upaya terciptanya masyarakat tertib sosial dan tertib hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan sistem regulasi dan penegakan peraturan daerah</li><li>2. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif</li><li>3. fasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan</li><li>4. Meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya</li></ol>

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2015

**Tabel 2.14**  
**Agenda Prioritas 4.2**  
**Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

No	Tematik	Fokus
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan sistem dan penerapan regulasi, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa</li><li>2. Fasilitasi peningkatan kemampuan keuangan, perangkat, kelembagaan dan administrasi desa</li><li>3. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa</li></ol>

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2015

Agenda prioritas Misi Kelima **Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 2.15**  
**Agenda Prioritas 5.1**  
**Peningkatan Upaya Penanganan Bidang Lingkungan Hidup**

No	Tematik	Fokus
1	Upaya perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan sarana prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup</li><li>2. Peningkatan kapasitas SDM (diutamakan PPNS Bidang LH)</li><li>3. Penegakan peraturan bidang LH</li><li>4. Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara</li></ol>
2	Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyediaan ruang terbuka hijau</li><li>2. Pengembangan area mangrove di pesisir pantai (<i>green belt area</i> dan <i>silvo fishery</i>)</li><li>3. Penanganan lahan kritis (vegetasi DAS)</li></ol>

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2015

**Tabel 2.16**  
**Agenda Prioritas 5.2**  
**Pelayanan Persampahan**

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan kualitas cakupan pelayanan persampahan	1. Peningkatan penyediaan sarana prasarana (TPSS, TPS) dan metoda pengolahan sampah di TPA menggunakan sistem <i>sanitary landfill</i> 2. Pengembangan sistem pengolahan sampah 3R ( <i>Recycle, Reduce, Reuse</i> ) berbasis masyarakat

Sumber : RKPD Kab. Karawang 2015

## 2.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2015 menetapkan bahwa Tema Pembangunan Nasional adalah "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan".

Pada RKP 2015 ditetapkan 5 (lima) arah pembangunan, yaitu :

1. Menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam
2. Mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku Reformasi birokrasi dan tata kelola:
3. Meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Pendidikan;
4. Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan Iptek yang terus meningkat.
5. Berkeadilan: pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan.

Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang tahun 2015 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap :

- A. Identifikasi target-target pembangunan RPJMD 2011-2015 yang belum tercapai;
- B. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2015;
- C. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Pada RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2015 Prioritas Pembangunan tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015.

Berdasarkan isu strategis tersebut maka pada tahun 2015 ditetapkan kebijakan umum pembangunan ditekankan pada :

1. Efisiensi dan efektifitas program pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Keberlanjutan pembangunan bidang infrastruktur dengan fokus 5 batang 12 cabang;
3. Pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas ekonomi lokal;
4. Penanganan Pengangguran, Penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;
5. Penanggulangan bencana alam, peningkatan daya dukung lingkungan melalui konservasi serta perbaikan lingkungan dan penanganan persampahan;
6. Penguatan kelembagaan desa dan masyarakat termasuk pengarusutamaan gender;
7. Penguatan kapasitas kelembagaan sebagai optimalisasi tata kelola pemerintahan yang *good governance*;

Disamping itu perlu ditingkatkan kinerja pembangunan secara menyeluruh lintas bidang/sector dan lintas wilayah dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian dengan mempercepat pencapaian keunggulan sarana/prasarana pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah. Pembenahan kinerja Aparatur Pemerintah yang meliputi 8 (delapan) aspek merupakan faktor kunci keberhasilan pencapaian target-target pembangunan tahun 2015. Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi di atas, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, akan terus diupayakan untuk melakukan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspek-aspek *rethinking*, restrukturisasi, revitalisasi, dan *renewal*. Aspek *rethinking* sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan analisa faktor-faktor tersebut, maka pada RKPD 2015 ditetapkan dengan tema :**“PENGUATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG MENUJU TAHAP KEMANDIRIAN MELALUI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS DALAM RANGKA PENCAPAIAN VISI DAN MISI KABUPATEN KARAWANG 2011-2015”**

Prioritas pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2015 masih tetap ditujukan kearah peningkatan angka IPM Kabupaten Karawang dengan fokus kepada :

1. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pembangunan pendidikan menengah untuk semua dan kualitas layanan kesehatan melalui Kartu Karawang Sehat;
2. Pemantapan pembangunan infrastruktur wilayah melalui pembangunan berkeadilan dengan fokus penyelesaian 5 batang 12 cabang;
3. Pertumbuhan ekonomi regional yang kuat berbasis komoditas lokal melalui pendekatan manajemen one village one product;
4. Pembukaan kesempatan kerja, Penanganan Pengangguran, Penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;
5. Penguatan antisipasi bencana alam beserta dampaknya melalui Penanganan yang komprehensif dari hulu sampai hilir
6. Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, konservasi alam dan penanganan persampahan;
7. Penguatan kelembagaan desa pada aspek sarana dan prasarana serta penguatan SDM dan masyarakat termasuk pengarusutamaan gender;
8. Penguatan kapasitas kelembagaan sebagai optimalisasi tata kelola pemerintahan yang *good governance*.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

**A**kuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Karawang selaku pengemban amanah masyarakat Karawang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kabupaten Karawang memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja, Program/Kegiatan serta Indikator Makro sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 serta Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

#### **3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

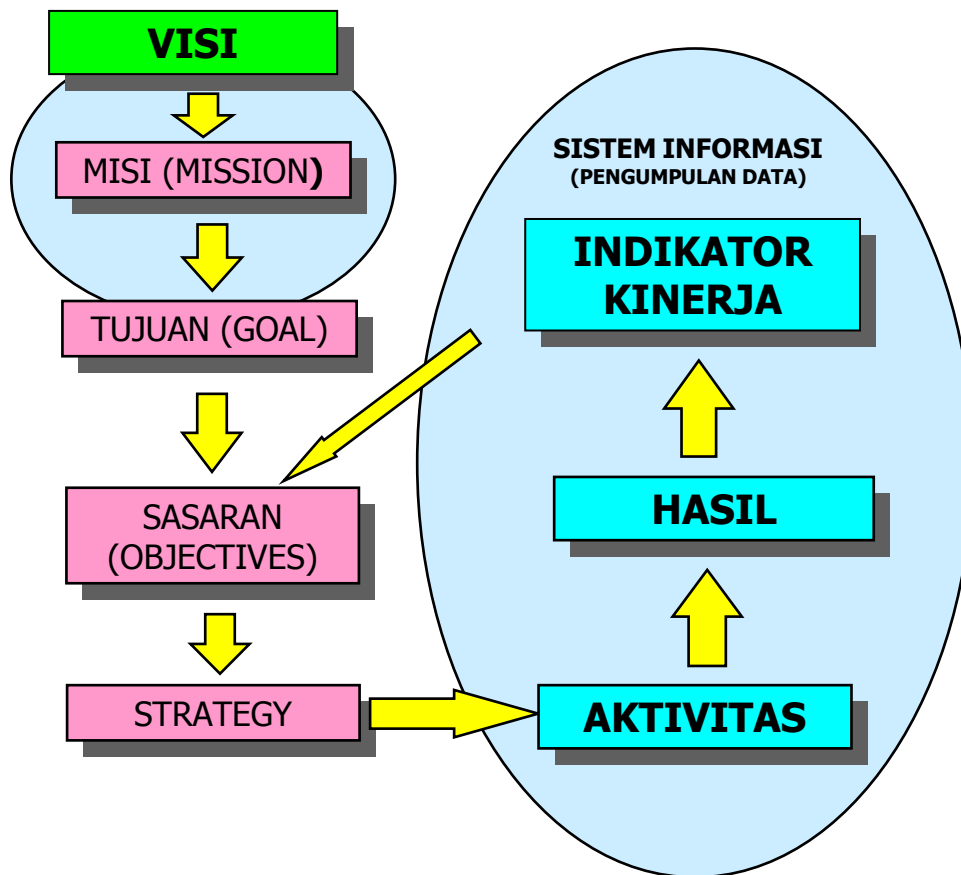
Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2010 yang telah diperbaharui oleh PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008, Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja, program/kegiatan serta Indikator Makro. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja, dilakukan pengukuran melalui media perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) yang kemudian

dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014. Sedangkan pencapaian kinerja sasaran dan program/ kegiatan diperoleh dengan membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja sasaran, program/kegiatan dan pencapaian indikator makro dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi indikator makro.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategik Pemerintah Kabupaten Karawang dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan penggunaan skala pengukuran ordinat kinerja untuk memberi makna atas nilai yang diperoleh sebagai berikut :

1. Nilai Capaian Kinerja dari 85% - 100% adalah berhasil baik atau sangat berhasil.
2. Nilai Capaian Kinerja dari 70% - 80% adalah sedang, baik atau berhasil.
3. Nilai Capaian Kinerja dari 55% - 70% adalah kurang, sedang atau cukup berhasil.
4. Nilai Capaian Kinerja 55% ke bawah sangat kurang, kurang baik atau tidak.

## SISTEM AKIP & POLA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA



Gambar 3.1  
Sistem AKIP dan Pola Penetapan Indikator Kinerja

**Pengukuran Kinerja dalam persentase dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :**

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

## **Indikator RPJMD**

Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 Makro berfungsi sebagai indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Karawang, sebagai ukuran capaian Visi dan Misi. Indikator kinerja tersebut terdiri dari 13 Tujuan dan 34 Sasaran yang seluruhnya bermuara pada indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang merupakan dampak menyeluruh dari upaya pembangunan yang dilaksanakan.

### **3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama**

Untuk mengukur dan dalam upaya peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor 060/Kep.355-Huk/2010 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Karawang juga melakukan kajian ulang (*review*) terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dalam melakukan *review* dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2015 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karawang Tahun 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	
1	Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun.	1	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
			a. SD sederajat	119,10%	107,24%	Program wajar dikdas
			b. SMP sederajat	110%	96,72%	
			c. SMA Sederajat	85%	68,36%	Program Pendidikan Menengah
		2	Angka Partisipasi Murni			
			a. SD sederajat	96,85%	96,02%	Program wajar dikdas
			b. SMP sederajat	76%	69,81%	
			c. SMA sederajat	60%	53,13%	Program Pendidikan Menengah
		3	Prosentase guru berkualifikasi S1			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
			a. Guru SD	75%	69%	
			b. Guru SMP	50%	42%	
			c. Guru SMA	35%	29%	
2	Tersedianya layanan pendidikan non Formal	1	Angka Melek Huruf	90%	93,45%	Program Pendidikan Non Formal
		2	Prosentase PKBM yang terakreditasi	50%	82%	
3	Berkembangnya perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1	Jumlah Desa Siaga Aktif	100%	100% (309 desa/kel)	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		2	Prosentase Poskesdes aktif	60%	100% (102 poskesdes)	
		3	Prosentase posyandu aktif	60%	Posyandu aktif 2.271 posyandu (100%) kategori posyandu 656 purnama, 136 mandiri (35%)	
		4	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	90%	80,60%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		5	Prosentase K4	80%	Realisasi 54.175 (89,20)%	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
		6	Prosentase Puskesmas DTP PONED	100%	Puskesmas DTP+PONED 12 dari 13 puskesmas (92,3%)	
		7	Prosentase Balita gizi kurang yang tertangani	90%	7.477 kasus (100%)	Program Perbaikan Gizi Masyarakat



NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	
4	Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian PMKS penerima Manfaat pelayanan Kesejahteraan Sosial	1 Prosentase PMKS penerima manfaat yang mandiri	10%	3,16% (70,04% Tahun 2015 dari 66,88% tahun 2014)	Program Peningkatan Pelayanan Sosial	
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kepesertaan KB dan penyelenggaraannya	1 Prosentase Peningkatan Peserta KB PUS	50%	74,55% (jumlah peserta KB 375.606 jumlah PUS 503.809)	Program keluarga berencana	
6	Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai tradisi, budaya dan kearifan lokal karawang	1 Cakupan Organisasi seni yang dibina dan difasilitasi	50%	37,5% (8 kelompok budaya 2014 menjadi 11 kelompok budaya 2015)	Program Pengembangan Nilai budaya	
7	Meningkatnya nilai produksi ekonomi daerah	1 Prosentase Peningkatan Produksi :				
		a. Padi	3%	Realisasi 2.20% produksi 2015 : 1.531.104,5 ton, 2014 : 1.498.502 ton Produktivitas naik 5% dari 76.05 menjadi 79,95 Kw/ha	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi	
		b. Palawija	5%	Realisasi : turun - 36.70%, 2014 : 12.651 ton, 2015 : 8.004,04 ton Produktivitas menurun dari 51,13 menjadi 27,11 Kw/ha	Program Pengembangan Palawija	
		c. Hortikultura	30%	Realisasi 31,50% Sayuran naik 36,72%, jamur naik 1,36% Produktivitas jamur naik 4% dari 2.3 menjadi 2,4 kw/kubung	Program Pengembangan sentra jamur merang dan sayuran dataran rendah	
		2 Prosentase Peningkatan Produksi Peternakan				Program Peningkatan Produksi dan pemasaran hasil peternakan
		a. Daging	5%	Realisasi turun: - 1,40% Menurun dari 9.116,25 ton menjadi 8.988 ton		
b. Telur	5%	Menurun -1,20% dari 4.023 ton menjadi 3.974 ton				



NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	
		3	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan			
			a. Perikanan Tangkap	1%	Menurun 1% (174,56 ton) dari 8.766,55 menjadi 8.591,99 ton	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
			b. Perikanan Budi Daya	4%	Naik 3% (1.326,15 ton) dari 41.157 menjadi 42.483,15 ton	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		4	prosentase peningkatan pendapatan			Program Peningkatan Produksi dan pemasaran hasil pertanian
			a. Petani	30%	Naik 47% dari 18,532 menjadi 27,275 jt	
			b. Peternak	15%	Peternak turun 9,5% Pembudidaya ikan naik 13,28%, Nelayan Naik 8,15%, petani garam naik 5,60%	
				5	Prosentase peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah	1%
8	Mendorong peningkatan Investasi	1	Prosentase peningkatan investasi PMDN	5%	Turun -1.05% dari 25,722 Trilyun (2014) menjadi 25,453 Trilyun (2015)	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
9	Perluasan Kesempatan Kerja dan menurunkan angka pengangguran	1	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri	30%	Naik 31% dari 12.693 menjadi 16.675	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		2	Prosentase Penurunan angka pengangguran	2%	-0,29 % (Angka pengangguran naik dari 9,86% menjadi 10,15%)	
		3	Prosentase penyelesaian Kasus PHI dan Pemogokan	90%	Terselesaikan 58 dari 112 kasus (51,79%)	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
10	Meningkatnya Peran kelembagaan dan akses koperasi dan UMKM	1	Prosentase peningkatan koperasi sehat	5%	Naik 4% dari 125 (2014) menjadi 130 koperasi (2015)	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
		2	Prosentase peningkatan UMKM yang memiliki sertifikasi SP Kesehatan	12%	Naik 11.19% dari 268 (2014) menjadi 298 UMKM (2015)	



NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	
11	Meningkatnya kualitas sistem infrastruktur jaringan jalan	1	Prosentase Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik	50%	Kondisi baik 1.028 km, jalan kab 1.582,8 km (64%)	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		2	Prosentase peningkatan pemeliharaan jembatan	30%	56,5% (23 unit Tahun 2014, menjadi 36 unit tahun 2015)	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
12	Tersedianya Infrastruktur sumberdaya air dan irigasi	1	Prosentase Saluran irigasi dalam kondisi baik	50%	Saluran sekunder kondisi baik 145,77 km, panjang saluran 289,6 km (50%)	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan Lainnya
13	Meningkatnya keterjangkauan dan kelancaran pelayanan transportasi	1	prosentase jaringan trayek tersedia	50%	55% (dari 55 trayek yang harus ada baru 30 trayek)	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		2	Prosentase jalan kabupaten yang dipasang rambu	50%	150% (24 unit menjadi 60 unit)	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
14	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah	1	Capaian prosentase target kinerja SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan/RKPD	80%	61,76%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		2	prosentase peningkatan PAD	15%	16,19%	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		3	Prosentase Proporsi PAD terhadap seluruh pendapatan	20%	29,11%	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
		4	Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP	Proses audit pendahuluan	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
15	Terwujudnya birokrasi daerah yang profesional dan proporsional	1	Prosentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	60%	100% (1.221 jabatan struktural)	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur



NO	SASARAN STRATEGIS RPJMD	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	
16	Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan publik	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan			Program Penataan Administrasi Kependudukan
			a. KTP elektronik	5%	Terealisasi penerbitan KTP el 79.222 sehingga adanya peningkatan cakupan 5,50%	Program Pencatatan Sipil
			b. KK	30%	Terealisasi cakupan KK 247.147 KK (34,43%)	
			c. Kutipan Akta Kelahiran	50%	Terealisasi penerbitan akta 68.514 sehingga cakupan akta kelahiran 54,42%	
17	Terciptanya Kondisi aman lingkungan masyarakat	1	Cakupan Penegakan Perda dan Perbup	80%	Rencana 60 kegiatan dilaksanakan 60 kegiatan (100%)	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
		2	Cakupan Rasio Petugas Linmas	50%	10 orang setiap desa/kel. Jumlah 3090 anggota linmas. Jumlah RT 6.541, Rasio : 47,24%	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
18	Meningkatnya Kemandirian desa	1	Prosentase peningkatan Alokasi Dana Desa	5%	2014 : 44.68 milyar 2015 : 154,717 milyar (capaian 246%)	Program Pembangunan Desa/Kelurahan
19	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan sumberdaya air, fungsi lahan dan kualitas udara	1	Prosentase penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan (kasus)	20%	15,38 % (26 kasus menjadi 30 kasus)	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
20	Berkurangnya Volume dan dampak akibat timbunan sampah	1	Prosentase volume sampah yang mampu diangkut	60%	2014 : 672M <sup>3</sup> meningkat 2015 : 732 M <sup>3</sup> total volume sampah 960 M <sup>3</sup> . Capaian 76%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Sumber : RPJMD Kab. Karawang 2011 -2015, LKPJ Bupati Karawang 2015

### 3.3 Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2015

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Karawang telah melaksanakan tahapan-tahapan pembangunan untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 - 2015 yang berbunyi : **"Karawang Sejahtera Berbasis Pembangunan Berkeadilan Dilandasi Iman dan Taqwa"**.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat pencapaian target dari 20 (dua puluh) sasaran strategis dan 49 indikator kinerja, 5 indikator tidak dihitung karena 1 indikator masih dalam proses penilaian Pemerintah Pusat, yaitu indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) belum dapat terealisasi karena masih dalam proses audit pendahuluan dan 3 indikator lainnya belum dapat diketahui capaiannya karena keterbatasan data. Sehingga ada 45 indikator sasaran strategis yang diukur capaian kinerjanya yaitu ada 31 indikator kinerja telah mencapai kategori berhasil baik (68, 89%), 3 indikator kinerja telah mencapai kategori baik ( 6,67%), 2 indikator kinerja telah mencapai kategori sedang ( 4,44%) dan 8 indikator kinerja telah mencapai kategori kurang baik (20%).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :

**MISI PERTAMA : MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG CERDAS, SEHAT, BERBUDAYA DAN RELIGIUS YANG HARMONIS.**

- 1. Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun,**  
Indikator Kinerja Strategis : Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Prosentase kualifikasi guru untuk jenjang SD, SMP, SMA  
**1) Program Pendidikan Dasar**

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah/daerah ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.

Ada beberapa indikator tingkat capaian di bidang pendidikan diantaranya angka transisi, angka *drop out*, angka melek huruf, angka partisipasi, rata-rata lama sekolah dan lain-lain. Indikator angka partisipasi umumnya berkaitan dengan keberhasilan suatu daerah dalam melibatkan sebanyak-banyaknya anak usia sekolah masuk sekolah. Angka

partisipasi dibagi dalam APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni).

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai makin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah, sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Pencapaian APK dan APM SD dan SLTP pada tahun 2011 s.d 2015 berikut ini :

**Tabel. 3.2**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

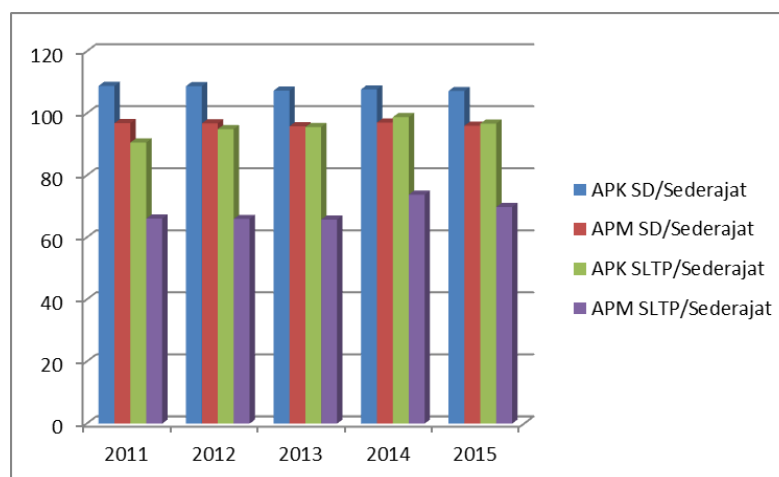
Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>APK SD/Sederajat</b>	108,89	108,8	107,34	107,73	<b>107,24*</b>
<b>APM SD/Sederajat</b>	96,86	96,8	95,84	97,06	<b>96,02*</b>
<b>APK SLTP/Sederajat</b>	90,62	94,96	95,61	98,80	<b>96,72*</b>
<b>APM SLTP/Sederajat</b>	<b>66,09</b>	<b>65,98</b>	<b>65,79</b>	<b>73,80</b>	<b>69,81*</b>

Sumber : Disdikpora Kab. Karawang

\*) Angka Sementara

Perkembangan pencapaian APK SD/ sederajat di Kabupaten Karawang tahun 2015 mengalami sedikit penurunan 0,49 point dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 107,73. Capaian APK Kab. Karawang yang telah mencapai 107,34 (2013) dan 107,73 (2014) serta 107,24 telah melampaui angka APK SD/ sederajat di Jawa Barat yang mencapai angka 106,98 pada tahun 2014 (*bps.go.id*) Tingkat perkembangan pencapaian APK dan APM SD dan SLTP pada tahun 2011,

2012, 2013, 2014, dan 2015 lebih jelas disajikan pada gambar 3.2 berikut ini :



**Gambar. 3.2**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Tingkat SD dan SMP Tahun 2011 s.d. 2015**

Ditinjau dari keberlanjutan bersekolah, total angka putus sekolah untuk tingkat SD dan SLTP selama periode tahun 2012 s.d 2015 dapat dikatakan menurun. Dari tabel 3.3, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah tingkat SD dan SLTP pada tahun 2011 s.d 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2011 yaitu 0,2% dan pada tahun 2015 tinggal 0,01%.

Persentase Angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SLTP pada tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah pada tabel 3.3 sebagai berikut.

**Tabel 3.3**  
**Presentase Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SLTP Tahun 2011 – 2015**

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	0,2%	0,1%	0,09%	0,01%	0,01%
2	SMP/MTs	0,4%	0,3%	0,4%	0,2%	0,32%

Sumber : Disdikpora Kab. Karawang

Dengan semakin berkurangnya presentase angka putus sekolah menunjukkan upaya untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun semakin baik dan terus diupayakannya peningkatan pelayanan pendidikan di berbagai wilayah Kabupaten Karawang.

Tabel 3.3 menggambarkan hasil persentase kelulusan pada jenjang SD dan SLTP yang melanjutkan sekolahnya. Semakin meningkatnya presentase kelulusan di jenjang pendidikan SD dan SLTP menggambarkan proses pembelajaran yang semakin baik.

Kelulusan pada jenjang Sekolah Dasar serta jenjang Sekolah Menengah Pertama selalu mengalami kenaikan. Pada jenjang SD pada tahun 2011 mencapai angka 96,60% dan pada tahun 2015 mencapai angka 97,72%. Untuk jenjang SMP pada tahun 2011 mencapai angka 67,58% dan pada tahun 2015 mencapai angka 86,09%. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4**  
**Persentase Lulusan SD dan SLTP yang Melanjutkan Sekolahnya**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI	96,60%	96,75%	97,72%	98,64%	97,72%
2.	SMP/MTs	67,58%	72,80%	75,58%	80,62%	86,09%

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang*

Tabel 3.5 menggambarkan hasil persentase SD dan SLTP yang terakreditasi di Kabupaten Karawang pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Persentase SMP yang Terakreditasi**  
**Tahun 2011 – 2015**

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/MI	90,01%	91%	92%	92,29%	97,97%
2.	SMP/MTs	81,11%	76,84%	77,40%	77,84%	82,12%

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang*

Tabel 3.6 menggambarkan jumlah peserta ujian pada jenjang SD dan SLTP di Kabupaten Karawang pada tahun 2011/2012 sampai dengan 2014/2015, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Peserta Ujian Tahun 2010/2011-2015/2016**

No.	Jenjang Sekolah	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	SD/MI	38.703	44.343	44.692	40.698	39.524
2	SMP/MTs	33.097	33.150	34.252	33.983	37.023

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 menggambarkan Angka Lulus Sekolah dan Persentase Kelulusan Ujian pada jenjang SD dan SLTP di Kabupaten Karawang pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Angka Lulus Sekolah Tahun 2010/2011 s.d 2015/2016**

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	38.703	44.343	44.692	40.698	39.524
2	SMP/MTs	33.097	33.150	34.252	33.983	37.023

Sumber : Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel 3.8**  
**Persentase Kelulusan Ujian Tahun 2010/2011 s.d 2015/2016**

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
2	SMP/MTs	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan sarana prasarana sekolah telah diupayakan melalui pembangunan unit sekolah, rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium dan perpustakaan untuk SD/MI dan SMP/MTs dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN (DAK), Dana Dekonsentrasi dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

**Tabel. 3.9**  
**Pembangunan Unit Sekolah dan Rehabilitasi Ruang Kelas**  
**SD/MI dan SMP/MTs(Lokal)**  
**Tahun 2011 s.d 2015**

Jenjang Sekolah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>SD/MI</b>	57	1.402	460	357	<b>175</b>
<b>SMP/MTs</b>	<b>36</b>	<b>535</b>	<b>598</b>	<b>194</b>	<b>78</b>

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel 3.10**  
**Jumlah Siswa Tahun Ajaran 2011/2012 s.d. 2015/2016**

No.	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
<b>1</b>	TK	4.195	5.306	5.184	6.613	<b>6.553</b>
<b>2</b>	RA	6.599	7.121	7.327	8.161	<b>8.730</b>
<b>3</b>	SD/MI	261.513	260.168	260.581	261.260	<b>255.951</b>
<b>4</b>	SDLB	173	181	167	171	<b>77</b>
<b>5</b>	SMP/MTs	105.186	113.740	116.535	117.598	<b>117.573</b>
<b>6</b>	<b>SMPLB</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Manajemen pelayanan pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Karawang salah satunya digambarkan melalui rasio murid terhadap sekolah, dan rasio murid terhadap ruang kelas, sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 3.11**  
**Rasio Murid Terhadap Sekolah Tahun 2011 -2015**

No.	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	SD/MI	259 : 1	260:1	259 : 1	255 : 1	245:1
<b>2</b>	SMP/MTs	525 : 1	527:1	560 : 1	565 : 1	567:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel.3.12**  
**Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2011 – 2015**

No.	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	SD/MI	38 : 1	40:1	39 : 1	37 :1	37:1
<b>2</b>	SMP/MTs	49 : 1	49:1	47 : 1	44 : 1	40:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

## 2) Program Pendidikan Menengah

Pencapaian APK dan APM SLTA sederajat pada tahun 2011-2015 lebih jelas disajikan pada tabel berikut ini :

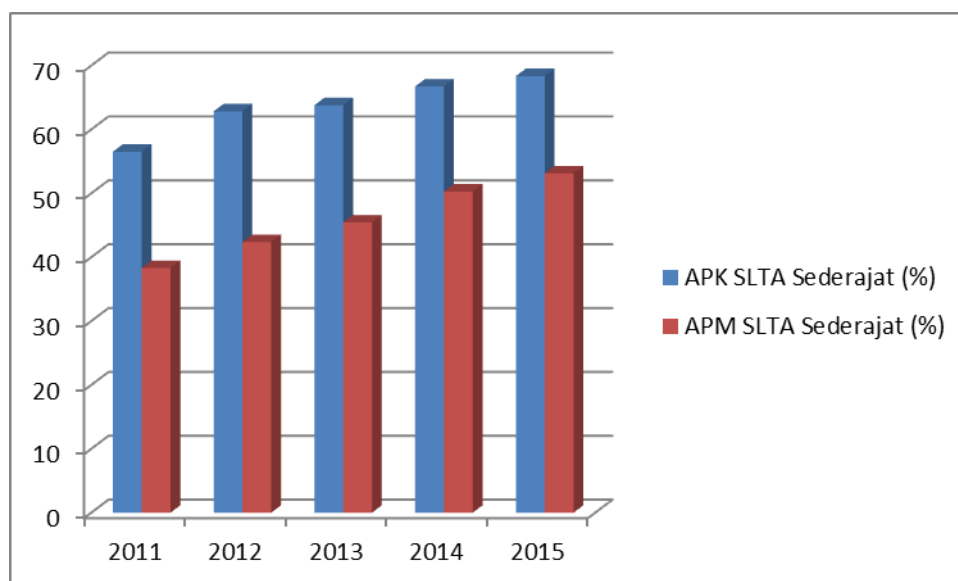
**Tabel. 3.13**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
APK SLTA Sederajat (%)	56,51	62,84	63,79	66,74	68,36
APM SLTA Sederajat (%)	38,31	42,36	45,44	50,28	53,13

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SLTA/Sederajat di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan yaitu dari angka 66,74 (2014) menjadi 68,36 pada tahun 2015, sedangkan capaian APK Provinsi Jawa Barat (*bps.go.id*) tahun 2014 mencapai 68,55, hingga masih sedikit di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 0,14 point.

Tingkat perkembangan capaian APK dan APM SMU/SMK pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 lebih jelas disajikan pada gambar 3.3 berikut ini:



**Gambar. 3.3**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Tingkat SLTA**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

Ditinjau dari keberlanjutan bersekolah, total angka putus sekolah untuk tingkat SLTA selama periode 2011 dan 2012 adalah sebesar 508 orang menjadi 463 orang. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa angka putus sekolah tingkat SLTA pada tahun 2012 bila dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami penurunan. Sedangkan total angka putus sekolah pada tingkat SLTA pada periode 2013 adalah 458 orang, tahun 2014 sebanyak 392 orang dan tahun 2015 sebanyak 477.

Tabel 4.13 menggambarkan hasil persentase lulusan pada jenjang SLTA Sederajat yang melanjutkan sekolahnya. Angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Persentase Lulusan SLTA Sederajat**  
**yang Melanjutkan Sekolahnya Tahun 2011 – 2015**

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SLTA Sederajat	69,42%	80,89%	82%	82%	83%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel 3.15**  
**Persentase SMA/SMK/MA Terakreditasi**  
**Tahun 2011 – 2015**

No.	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA	97,22%	100%	94,60%	94,60%	97,97%
2	MA	94,11%	88,88%	88,88%	94,73%	94,73%
3	SMK	85,71%	83,10%	85%	84,94%	86,31%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 3.15, 3.16, dan 3.17 menggambarkan hasil persentase kelulusan jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Karawang pada tahun 2010/2011 sampai dengan 2014/2015. Angka kelulusan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16**  
**Jumlah Peserta Ujian Tahun 2010/2011 s.d. 2014/2015**

No.	Jenjang Sekolah	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
1	SMA/SMK/MA	17.096	19.308	20.414	21.020	23.780

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel 3.17**  
**Angka Lulus Sekolah Tahun 2010/2011 s.d. 2014/2015**

No.	Jenjang Sekolah	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
1	SMA/SMK/MA	17.021	19.305	20.413	21.020	23.780

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel 3.18**  
**Persentase Kelulusan Ujian Tahun 2010/2011 s.d. 2014/2015**

No	Jenjang Sekolah	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
1	SMA/SMK/MA	99,98%	99,98%	99,99%	100%	100%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel 3.19**  
**Persentase Peserta Didik Jenjang SLTA yang Putus Sekolah Tahun 2011-2015**

No	Jenjang Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/SMK/MA	0,87%	0,7%	0,63%	0,47%	0,5%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan sarana prasarana penunjang telah diupayakan melalui pembangunan unit sekolah dan rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium, perpustakaan maupun ruang praktek sekolah untuk



SMA/SMK/MA, dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN (DAK), Dana Dekonsentrasi dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

**Tabel. 3.20**  
**Pembangunan Unit Sekolah, Rehabilitasi Ruang Kelas**  
**Sarana Prasarana Penunjang**  
**SMA/SMK/MA (Lokal) Tahun 2011 s.d 2015**

Jenjang Sekolah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
SMA/SMK/MA	150	129	181	158	96

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Manajemen pelayanan pendidikan untuk jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Karawang salah satunya digambarkan melalui rasio murid terhadap sekolah, rasio murid terhadap ruang kelas sebagaimana tabel 3.21 berikut ini.

**Tabel 3.21**  
**Rasio Murid terhadap Sekolah Tahun 2011-2015**

No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/SMK/MA	515 : 1	517:1	502 : 1	531 :1	603:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel. 3.22**  
**Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2011 s.d. 2015**

No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SMA/SMK/MA	55 : 1	43:1	44 : 1	53 : 1	44:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel 3.23**  
**Jumlah Siswa Tahun Ajaran 2011/2012-2015/2016**

No.	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	SMA/SMK/MA	63.838	66.253	71.776	74.660	<b>83.210</b>
2	SMALB	16	7	9	16	17

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

## 2. Tersedianya layanan pendidikan non formal.

Indikator Kinerja Strategis : Prosentase Angka Melek Huruf (AMH) dan PKBM yang terakreditasi

### 1) Pendidikan Non Formal

Program pendidikan non formal dan informal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH), pada tahun 2012 AMH Kabupaten Karawang mencapai 93,25, berarti mengalami peningkatan jumlah penduduk yang melek huruf, bila dibandingkan dengan AMH tahun 2011, yaitu sebesar 93,22. AMH pada tahun 2014 sebesar 93,45 (data [jabar.bps.go.id](http://jabar.bps.go.id)) artinya mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 93,27. Penyelenggaraan paket A, B dan C, seperti tercantum dalam Tabel 3.24 adalah merupakan salah satu bagian dari program pendidikan non formal.



**Tabel. 3.24**  
**Perkembangan Program Pendidikan Kesetaraan**  
**Tahun 2011-2015**

No	Kegiatan	Jumlah Warga Belajar				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Paket A Setara SD	607	737	1.630	660	352
2	Paket B Setara SMP	7.487	2.082	4.771	3.175	2.546
3	Paket C Setara SMA	1.932	2.063	2.490	4.280	4.022

Sumber : Disdikpora Kab. Karawang

**Tabel 3.25**  
**Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Kependidikan**  
**PKBM (Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat) dan**  
**LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) Tahun 2011-2015**

No	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PKBM	103	70	70	65	56
2	Jumlah PKBM yang mempunyai nomor lembaga (NILEM)	47	47	47	47	46
3	Jumlah LKP	53	67	70	56	69
4	Jumlah Tutor	535	540	553	510	511

Sumber : Disdikpora Kab. Karawang

## 2) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan bagi anak-anak di usia dini juga mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah Kabupaten Karawang, hal tersebut dengan ketersediaan layanan pendukung bagi siswa PAUD.



**Tabel 3.26**  
**Jumlah Lembaga, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal Tahun 2011 – 2015**

No.	Indikator Kinerja	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PAUD Formal	119	123	147	155	155
2	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Formal	444	582	729	635	704
3	Jumlah Peserta Didik PAUD Formal	4.400	5.953	6.589	6.613	6553
4	Jumlah PAUD Non Formal	497	614	827	877	881
5	Jumlah Tenaga Pendidik PAUD Non Formal	1.449	1.672	2.621	2.742	2742
6	Jumlah Peserta Didik PAUD Non Formal	15.481	20.482	26.893	30.145	38.088

Sumber : Disdikpora Kab. Karawang

## 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dilihat dari aspek kualitas tenaga pendidik, diantaranya jumlah guru yang bersertifikat maupun persentase guru SD, SMP dan SMA yang berkualifikasi S1. Jika dilihat dari



perkembangan jumlah guru di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2013 terdapat penambahan jumlah guru. Pada tahun 2011 jumlah keseluruhan guru di Kabupaten Karawang sebanyak

18.405 orang sedangkan pada tahun 2012 jumlah guru menjadi 18.902 orang, tahun 2013 jumlah guru adalah 19.351 orang, tahun 2014 jumlah guru sebanyak 20.148 orang dan tahun 2015 jumlah guru sebanyak 20.457.

**Tabel. 3.27**  
**Perkembangan Jumlah Guru di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun/Jumlah Guru				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	10.234	10.795	10.579	10.989	11.242
2	SMP/MTs	4.835	4.522	4.737	5.012	4.966
3	SMA/MA/SMK	3.336	3.585	4.035	4.147	4.249
<b>Jumlah</b>		18.405	18.902	19.351	20.148	20.457

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dilaksanakan melalui kegiatan kualifikasi dan sertifikasi guru guna memenuhi standar pendidikan. Jumlah guru yang sudah dan belum mendapat kualifikasi dan sertifikasi hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.28**  
**Pelaksanaan Kualifikasi Guru di Kabupaten Karawang hingga**  
**Tahun 2015**

Tingkat Pendidikan	Jumlah Guru	Sudah S1	Sedang Kuliah	Belum Kuliah
SD/MI	11.242	9.105	1.150	987
SMP/MTs	4.966	4.560	47	359
SMA/SMK/MA	4.249	3.908	16	325
<b>Jumlah</b>	20.457	17.573	1.213	1.671

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa jumlah guru yang belum ikut kualifikasi ke S1 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 1.671 orang. Pada tahun 2014 jumlah guru yang belum ikut kualifikasi ke S1 sebanyak 1.741 orang sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.29.

**Tabel 3.29**  
**Pelaksanaan Kualifikasi Guru di Kabupaten Karawang hingga Tahun 2014**

Tingkat Pendidikan	Jumlah Guru	Sudah S1	Sedang Kuliah	Belum Kuliah
<b>SD/MI</b>	10.989	8.824	1178	987
<b>SMP/MTs</b>	5.012	4.429	152	431
<b>SMA/SMK/MA</b>	4.147	3.816	8	323
<b>Jumlah</b>	<b>20.148</b>	<b>17.069</b>	<b>1.338</b>	<b>1.741</b>

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel 3.30**  
**Pelaksanaan Sertifikasi hingga Tahun 2015**

No	Tingkat Pendidikan	Guru yang berijazah S1	Sudah sertifikasi	Belum Sertifikasi
<b>1</b>	SD/MI	9.105	6.313	2.792
<b>2</b>	SMP/MTs	4.560	1.956	2.604
<b>3</b>	SMA/SMK	3.908	1.169	2.739
<b>Jumlah</b>		<b>17.069</b>	<b>9.438</b>	<b>7.631</b>

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel 3.31**  
**Pelaksanaan Sertifikasi hingga Tahun 2014**

No	Tingkat Pendidikan	Guru yang berijazah S1	Sudah sertifikasi	Belum Sertifikasi
<b>1</b>	SD/MI	8.824	6.458	2.366
<b>2</b>	SMP/MTs	4.429	2.303	2.126
<b>3</b>	SMA/SMK/MA	3.816	1.186	2.647
<b>Jumlah</b>		<b>17.069</b>	<b>9.930</b>	<b>7.139</b>

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Masalah Manajemen pendidikan adalah masalah yang sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik sebagai sarana maupun alat penataan bagi komponen pendidikan lainnya. Manajemen pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang diantaranya digambarkan oleh rasio guru terhadap sekolah dan rasio murid terhadap guru, sebagaimana tabel 3.22 berikut ini :

**Tabel 3.32**  
**Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2011 – 2015**

No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	27 : 1	25:1	26 : 1	24 :1	23 : 1
2	SMP/MTs	25 : 1	26:1	24 : 1	24 :1	24 :1
3	SMA/SMK/MA	21 : 1	18:1	18 : 1	18 : 1	18 :1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel 3.33**  
**Rasio Guru Terhadap Sekolah Tahun 2011 – 2015**

No	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI	10 : 1	11:1	11 : 1	10 :1	11 : 1
2	SMP/MTs	21 : 1	21:1	22 : 1	24 :1	24 : 1
3	SMA/SMK/MA	24 :1	28:1	28 : 1	28 : 1	28 : 1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Pelaksanaan pembangunan pendidikan perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana fisik pendidikan yang memadai, khususnya kecukupan fasilitas pendidikan dalam melayani masyarakat serta jumlah tenaga pengelola kependidikan. Perkembangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan bidang pendidikan, melalui peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan siswa didik, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan SD-SMP satu atap akan terus dilakukan, termasuk dalam hal pemeliharannya. Sarana dan prasarana penunjang di bidang pendidikan, yaitu kecepatan akses informasi dalam bidang informasi dan teknologi dilengkapi dengan keberadaan *ICT Center* yang terhubung dengan jaringan Pendidikan Nasional dan bagi pemberdayaan tenaga pendidikan pun telah tersedia *Teacher Learning Center (TLC)*.

**Tabel 3.34**  
**Jumlah Sekolah Tahun Ajaran 2011/2012 s.d 2015/2016**

No.	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	TK	119	123	147	155	<b>155</b>
2	RA	156	165	172	173	<b>186</b>
3	SD	878	885	885	887	<b>890</b>



No.	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
4	SDLB	2	2	2	3	3
5	MI	131	134	137	137	140
6	SMP	135	146	149	148	149
7	SMPLB	2	2	2	2	2
8	MTs	58	57	57	58	59
9	SMA	37	36	37	37	43
10	SMALB	2	1	1	1	1
11	MA	16	18	18	19	20
12	<b>SMK</b>	<b>69</b>	<b>82</b>	<b>88</b>	<b>93</b>	<b>95</b>

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel 3.35**  
**Rombongan Belajar Tahun Ajaran 2011/2012 s.d 2015/2016**

No.	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
1	TK	257	349	459	379	372
2	RA	330	407	361	548	526
3	SD	8.076	7.126	7.133	7.455	7.465
4	SDLB	2	4	4	6	13
5	MI	1.141	929	967	1.000	1.007
6	SMP	2.026	2.117	2.250	2.238	2.310
7	MTs	427	484	539	593	555
8	SMPLB	5	2	3	3	2
9	SMA	640	730	693	691	769
10	SMALB	3	2	2	2	2
11	MA	108	126	124	143	145
12	<b>SMK</b>	<b>733</b>	<b>882</b>	<b>929</b>	<b>979</b>	<b>1447</b>

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

**Tabel 3.36**  
**Ruang Kelas Milik (RKM)**  
**Tahun Ajaran 2011/2012 s.d. 2015/2016**

No.	Jenjang Sekolah	Tahun								
		2013/2014			2014/2015			2015/2016		
		B	RR	RB	B	RR	RB	B	RR	RB
1	TK	263	41	22	254	33	15	334	36	2
2	RA	325	9	69	339	128	2	383	128	2
3	SD	4.076	1.227	875	4.194	1.245	814	4.233	1.286	587
4	SMP	1.647	248	76	1.863	260	80	1.583	421	122
5	SMA	659	71	8	496	76	32	265	431	47
6	SMK	672	98	31	692	84	48	516	511	134
7	MI	563	211	135	534	248	75	533	286	81
8	MTs	306	102	42	295	141	58	333	141	48
9	<b>MA</b>	<b>92</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>67</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>97</b>	<b>46</b>	<b>8</b>

Sumber : Disdikpora Kabupaten Karawang

Keterangan : Kategori Kondisi Sekolah : B (Baik), RR (Rusak Ringan) dan RB (Rusak Berat).

**3. Berkembangnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat, serta meningkatnya mutu pelayanan kesehatan.**

Indikator Kinerja Strategis : Prosentase Desa Siaga, Poskesdes Aktif, Cakupan UCI, Cakupan K4, Puskesmas DTP PONEB, Prosentase Balita gizi buruk yang ditangani.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan bayi serta angka kesakitan. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Karawang diarahkan :

1. Upaya promotif dan preventif: peningkatan kinerja dan pemberdayaan penyuluh kesehatan masyarakat, pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, pelayanan penyuluhan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, pelayanan imunisasi pada anak dan balita, pencegahan dan penanggulangan intensitas penyebaran penyakit menular;
2. Sarana kesehatan: pembangunan, pengembangan dan perbaikan puskesmas, pusat berikut sarana dan prasarana kesehatan yang terstandar, pengembangan sarana laboratorium kesehatan daerah yang terstandar, ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit;
3. Obat: penyediaan dan peningkatan penggunaan obat-obat yang rasional dan pemakaian obat generik disertai pengawasan dan pengendalian peredaran makanan dan perbekalan farmasi;
4. Pelayanan jaminan kesehatan masyarakat: pelayanan kesehatan penduduk miskin non Jamkesmas, pelayanan gizi buruk dan kekurangan zat tubuh lainnya (GAKY) bagi penduduk miskin, pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana;
5. Pelayanan KB: peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB.

**Tabel 3.37**  
**Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2011-2015**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Desa Siaga Aktif	168	128	309	307	309
2.	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS (%)	40,38	41,18	52	46,91	52,73
3.	Persentase Sekolah yang ber PHBS (%)	66,36	67,68	21,3	84,80	81,9
4.	Persentase Fasilitas Umum yang ber PHBS (%)	36,68	50,6	46	49,40	36,92
5.	Jumlah Poskesdes Aktif	93	104	116	145	102
6.	Jumlah Posyandu Purnama	569	698	721	721	656
7.	Jumlah Posyandu Mandiri	85	114	84	77	136

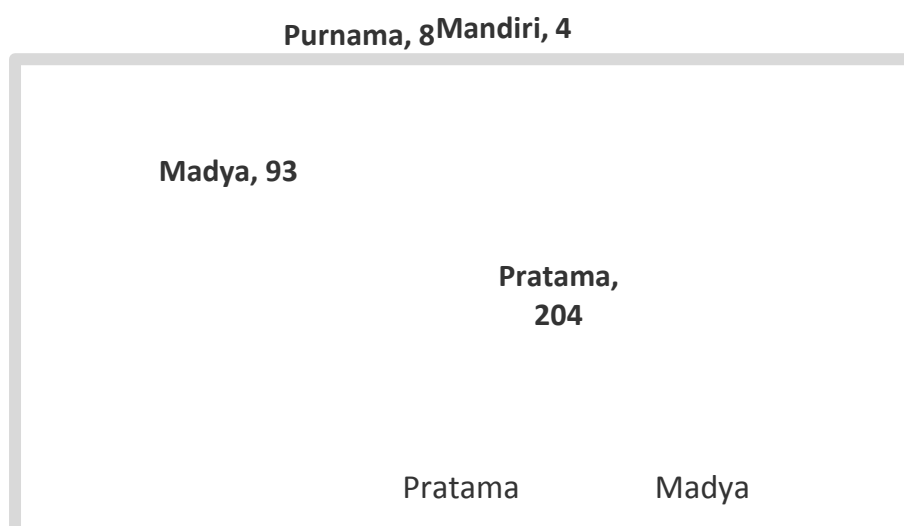
*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karawang*

Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa dan Kelurahan siaga Aktif tahun 2015 dapat dilihat dari beberapa indikator seperti di bawah ini :

1. Terbitnya Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Karawang.
2. Terbitnya Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor 140.05/Kep.662-Huk/2015 Tentang Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di Kabupaten Karawang.
3. Masuknya Kegiatan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dalam Anggaran APBD Desa dengan Rentang Biaya Rp. 5 Juta Rupiah per desa di wilayah Kabupaten Karawang.
4. Masuknya Kegiatan Pembinaan Desa Tingkat Kecamatan dalam Anggaran Tiap Kecamatan dengan rentang biaya Rp. 20 juta per kecamatan di wilayah Kabupaten Karawang.
5. Adanya komitmen seluruh camat yang mendukung kegiatan peningkatan strata desa siaga di wilayahnya.
6. Adanya komitmen seluruh kepala desa yang mendukung kegiatan peningkatan strata desa siaga di wilayahnya.
7. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Mandiri Tahun 2015 di Kabupaten Karawang terdapat 4 desa yaitu :
  - 1) Desa Karangjaya Kecamatan Pedes Wilayah Binaan Puskesmas Pedes

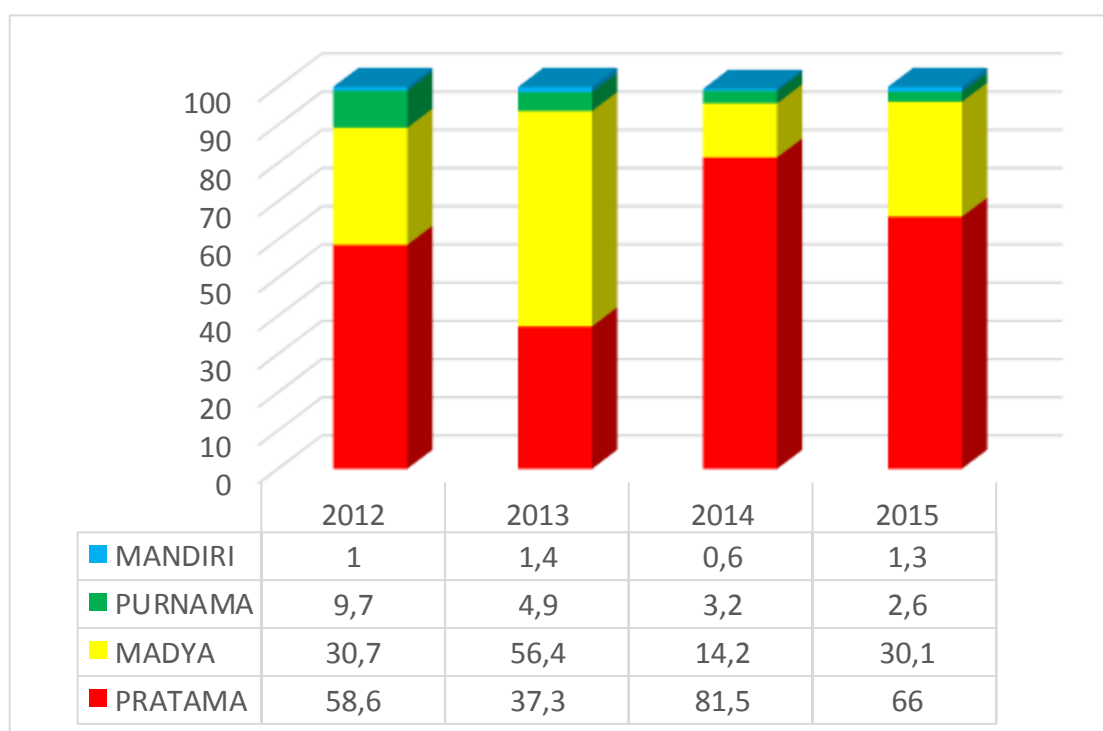
- 2) Desa Kertamulya Kec. Pedes Wilayah Binaan Puskesmas Pedes
  - 3) Desa Laban Jaya Kec. Pedes Wilayah Binaan Puskesmas Pedes
  - 4) Desa Kondang Jaya Kec Karawang Timur Wilayah Binaan PKM Adiarsa
8. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama Tahun 2015 di Kabupaten Karawang terdapat 8 desa yaitu :
- 1) Desa Sindangmulya Kec Kutawaluya Binaan PKM Kutawaluya
  - 2) Desa Kutakarya Kec Kutawaluya Binaan PKM Kutamukti
  - 3) Desa Jatimulya Kec Pedes Binaan PKM Pedes
  - 4) Desa Kertaraharja Kec Pedes Binaan PKM Pedes
  - 5) Desa Payungsari Kec Pedes Binaan PKM Pedes
  - 6) Desa Rangdumulya Kec Pedes Binaan PKM Pedes
  - 7) Desa Cibuaya Kec. Cibuaya Binaan PKM Cibuaya
  - 8) Desa Malangsari Kec Pedes Binaan PKM Pedes

Hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif selama tahun 2015 dapat digambarkan melalui grafik- grafik di bawah ini yang membandingkan antara target program dengan realisasi dari capaian program pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif selama tahun 2015.



**Gambar 3.4**  
**Strata Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2015**

Dari grafik di atas masih terlihat bahwa secara umum capaian desa dan kelurahan siaga aktif sudah 100 % yang artinya sudah seluruh desa menjadi desa dan kelurahan siaga aktif. Akan tetapi ketika kita tinjau berdasarkan capaian strata desa dan kelurahan siaga aktif strata pertama masih mendominasi dibanding strata lainnya. Namun jika dibanding dengan capaian desa dan kelurahan siaga aktif tahun 2014, maka tahun ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibuktikan dengan penurunan jumlah desa siaga strata pertama yang pada tahun 2014 berjumlah 252 desa sedangkan tahun 2015 jumlah desa siaga strata pertama berjumlah 204 desa.



**Gambar 3.5**  
**Trend Perkembangan Desa Siaga (desi)/ Kelurahan Siaga (Lusi) Aktif Berdasarkan Strata dari Tahun 2011 - 2015**

Gambar 3.9 berupa Grafik yang menunjukkan bahwa di tahun 2015 terjadi peningkatan strata desa dan kelurahan siaga aktif ke arah yang lebih baik, terlihat dari pergerakan desa dan kelurahan siaga aktif strata madya yang menggantikan keberadaan desa dan kelurahan siaga aktif pratama.

Pada grafik gambar 3.9 di atas juga terlihat ada peningkatan strata

mandiri dari 0.6 % di tahun 2014 menjadi 1.3 % pada tahun 2015. Tetapi ternyata dampak pemilihan kepala desa pada tahun 2015 juga memiliki dampak yang cukup signifikan terlihat pada strata purnama yang pada tahun 2014 3.2 % turun menjadi 2.6 % di tahun 2015.

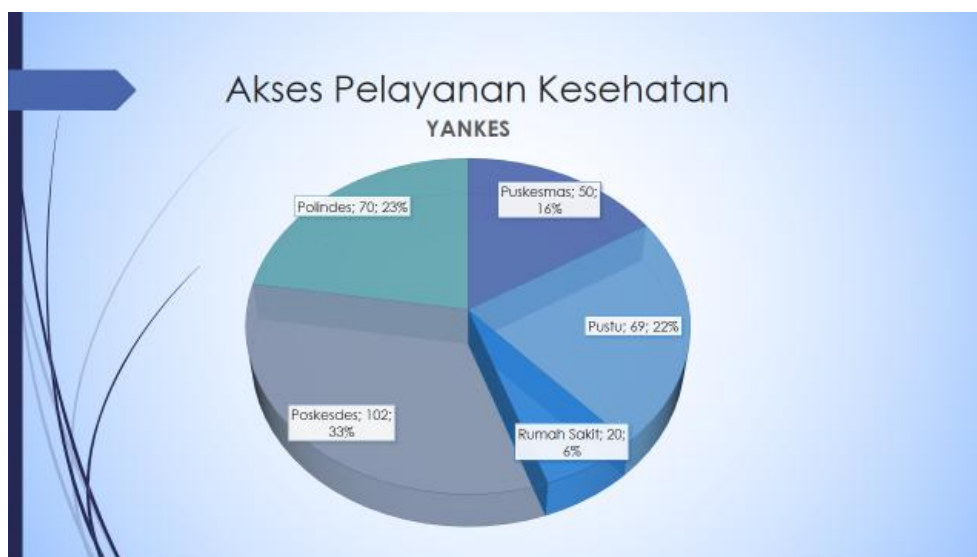
Pada tahun 2015 Persentase rumah tangga sehat mengalami kenaikan cakupan dari 46,91 (tahun 2014) menjadi 52,73 (tahun 2015) yang merupakan cerminan dari 10 indikator PHBS Rumah Tangga. Dari 10 indikator PHBS, cakupan yang paling rendah adalah jumlah bayi dan balita yang menimbang di posyandu sebesar 51 % dan rumah tangga yang merokok di dalam rumah adalah 52,73 %.

Persentase sekolah yang ber-PHBS pada tahun 2015 mengalami penurunan dalam cakupannya dari 84,80 % (tahun 2014) menjadi 81,9 % (tahun 2015). Berikut rincian capaian sekolah ber-PHBS sesuai strata :

- a. Sekolah dengan PHBS pratama capaian PHBS-nya hanya 27,3 % dengan hanya memenuhi 8 indikator PHBS.
- b. Sekolah dengan PHBS Madya capaian PHBS-nya hanya 36,7 % dengan hanya memenuhi 12 indikator PHBS.
- c. Sekolah dengan PHBS utama capaian PHBS-nya hanya 18,0 % dengan hanya memenuhi 14 indikator PHBS.

Dilihat dari data tersebut diatas, bahwa di Kabupaten Karawang sekolah yang belum memenuhi strata pertama PHBS hanya 18,1 % di tahun 2015.

Persentase fasilitas umum yang ber PHBS di tahun 2015 mengalami penurunan seperti halnya sekolah yang ber-PHBS, yaitu mengalami penurunan sekitar 12,48 % dari tahun 2014 menjadi 36,92 %. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya puskesmas yang belum melaporkan hasil kegiatan PHBS-nya ke Dinas Kesehatan. Dari 7 indikator PHBS di tatanan Fasilitas Umum, cakupan yang paling rendah adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak merokok di tempat-tempat umum.



**Grafik 3.6**  
**Sarana Pelayanan Kesehatan**

Dari gambar 3.10 di atas dapat dilihat bahwa sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karawang sudah mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan dasar. Dilihat dari jumlah sarana kesehatan pemerintah maupun upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat baik itu dalam bentuk poskesdes maupun polindes.

### 1) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

**Tabel 3.38**  
**Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin**  
**pada Tahun 2011-2015**

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah peserta Jamkesmas yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sesuai aturan berlaku	684.638	684.638	684.638	857.446	856.845
2.	Jumlah peserta Jamkesda mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai aturan berlaku*	551.261	551.261	551.261	-	551.261
3.	Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	48	50	50	132	-
4.	Jumlah PNS gol I dan II serta pensiunan yg memanfaatkan pelayanan kesehatan ( <i>cost sharing</i> )	0	0	0	73.561	-
5.	Jumlah pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	18	19	22	22	-
6.	Jumlah masyarakat memanfaatkan sistem jaminan kesehatan	-	-	-	1.200.565	1.459.880

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawan

Ket.: Jamkesmas tidak dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Data peserta Jamkesmas yang ada saat ini diambil berdasarkan data penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap Puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Waktu Server: 27. Jan. 2015 9:34:48  
Menu ON/OFF

Tgl: Tuesday, 27 January 2015  
Jam: 08:32:49  
User: Viewer Data Peserta

Status	No Polis	Klien	No Peserta	Nama	Tgl Lahir	Alamat	
AKTIF	32150002013	JAMKESMAS	0000487087086	ADI NARDI	01-03-1976	DUSUN JAMANTRI RT 09 RW 03 RT 9RW 3 MEKARJAYA	MEKA
TIDAK	32150012014	JAMKESDA	3215000385229	ADI NARDI (Jamkesmas 0000487087086)	03-07-1976	JAMANTRI RT 9RW 3 MEKARJAYA	MEKA

Permintaan Jaminan Rawat

No Tiket	: 10014026803	Tgl. Transaksi	: 27-01-2015	
Jenis Permintaan	: Jaminan Ranap	Sub Layanan	: Rawat Inap Lainnya	
Asal Rujukan	: 529	Nama Provider	: PUSKESMAS PURWASARI	
Provider ID	: 207	Nama Provider	: RSUD Karawang	
Policy No	: 32150012014	Nama klien	: JAMKESDA	
No Peserta	: 3215000394141	Nama Peserta	: ROBIATUL ADAWIAH	
Tgl Rawat	: 27/01/2015			
Kode ICD	: A91	Diagnosa	: DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER	
Keterangan	: Hasil Lab : Trombosit 50.000 , KU : Lemah		Estimasi Biaya	:

Simpan    Batal

Jumlah Peserta Jamkesda masih berdasarkan pada SK Bupati Nomor : 585/Kep.645-Huk/2010 tentang Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Karawang, dan sampai dengan saat ini masih belum menggunakan SK yang terbaru. Untuk jumlah PNS yang golongan I dan II serta Pensiunan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan (*Cost Sharing*) saat ini tidak ada datanya, hanya ada data *Cost Sharing* untuk Pelayanan Jamkesmas. Dalam tabel juga terlihat bahwa jumlah masyarakat yang memanfaatkan sistem jaminan kesehatan yaitu seluruh masyarakat yang mendaftar kepesertaan Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.

Pelayanan terhadap penduduk miskin ini selain dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Karawang juga melibatkan beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Karawang untuk menangani pasien miskin dengan tarif yang sama dan sesuai dengan tarif pelayanan masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

**Tabel 3.39**  
**Rekapitulasi Pelayanan Pasien Miskin**  
**Sumber Dana Jamkesda (APBD Provinsi dan Kabupaten)**  
**Tahun 2014-2015**

No.	Rumah Sakit	2014		2015	
		Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp
1.	RSUD Karawang	10.441	9.777.538.422	6.505	7.205.849.800
2.	RS Islam Karawang	7.290	4.678.742.709	5.235	2.821.707.700
3.	RS. Karya Husada	205	197.800.699	164	153.840.170
4.	RS. Fikri Medika	40	54.171.808	71	113.954.794
5.	RSIA Citra Sari Husada	2.635	1.971.195.213	986	821.164.470
6.	RS. Delima Asih	42	15.456.505	5	2.363.000
7.	RS. Bayukarta	13	15.998.000	17	10.832.000
8.	RSB. Dr. Joko Pramono	85	102.235.376	3	8.292.529
9.	RS. Proklamasi	1.255	1.217.159.707	660	688.853.580
10.	RS. Izza	433	368.854.679	492	483.061.809
11.	RS. Dewi Sri	39	49.660.229	18	10.745.793
12.	RS.Cito	96	79.635.000	-	-
13.	RS. Lira Medika Center	-	-	-	-
14.	Puskesmas	-	-	-	-
15.	RSUPN Cipto	978	2.381.951.486	274	680.640.562
16.	RSUP Hasan Sadikin	2.243	3.267.295.422	441	827.173.300
17.	RS. Marzoeki Mahdi	69	172.710.133	20	100.459.341
18.	RS. Jiwa Cimahi Bdg	21	30.339.967	7	10.892.800
19.	RS. Saraswati	18	11.251.580	9	1.046.400
20.	RS. Puri Asih	408	842.859.760	637	1.016.493.104
21.	RS. Kusta Sintanala	6	14.857.875	3	1.223.085
22.	RS. Cicendo	59	48.613.520	12	19.276.000
23.	RS. Mitra Family	2	6.514.474	-	-
24.	RS. Titian Bunda	25	39.582.766	171	255.871.524
	<b>Jumlah</b>	<b>26.403</b>	<b>25.344.425.330</b>	<b>15.730</b>	<b>15.233.741.761</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari data diatas, jumlah kunjungan pasien yang ada berdasarkan dari jumlah klaim dari Rumah Sakit yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang selama Tahun 2015. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2014) jumlah kunjungan pasien Jamkesda mengalami penurunan jumlah kunjungan sekitar 10.673 pasien dan juga mengalami penurunan jumlah dana klaim yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 10.110.683.569,-. Ada kemungkinan ini disebabkan karena masyarakat sudah banyak yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan di BPJS.

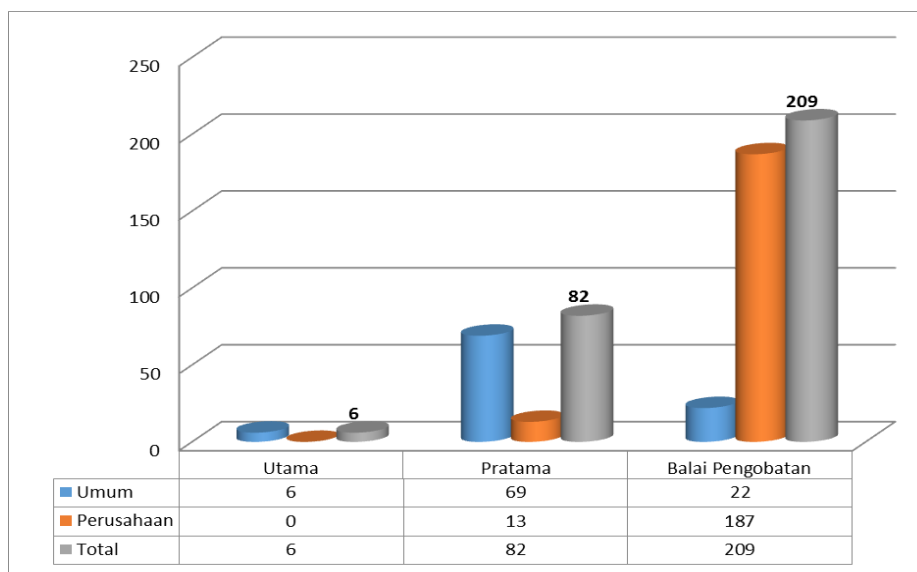
## 2) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

**Tabel 3.40**  
**Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2011-2015**

No	Sarana	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	RSUD Kabupaten	1	1	1	1	<b>1</b>
<b>2</b>	RS Swasta	15	15	16	18	<b>19</b>
<b>3</b>	RS Bersalin	1	2	1	1	<b>0</b>
<b>4</b>	Puskesmas	48	50	50	50	<b>50</b>
<b>5</b>	Pustu	69	69	69	70	<b>71</b>
<b>6</b>	Pusling+ kend. Operasional	94	99	111	373	<b>388</b>
<b>7</b>	PONED	10	19	28	28	<b>28</b>
<b>8</b>	Posyandu	2.218	2.227	2.233	2.255	<b>2.271</b>
<b>9</b>	Rumah bersalin	38	38	38	0	<b>0</b>
<b>10</b>	Apotik	179	190	246	248	<b>260</b>
<b>11</b>	Balai Pengobatan Mata	2	1	1	1	<b>1</b>
<b>12</b>	Balai Pengobatan Khusus	3	1	8	2	<b>0</b>
<b>13</b>	Balai Pengobatan Umum (Klinik Pratama)	222	181	449	291	<b>261</b>
<b>14</b>	Balai Pengobatan Perumahan	12	28	44	0	<b>35</b>
<b>15</b>	<b>Gudang Farmasi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari grafik diatas terlihat jumlah klinik di kabupaten karawang sebanyak 297 sarana dengan rincian Klinik Umum (Balai Pengobatan/BP) : 187 sarana, klinik pratama : 69 sarana, klinik utama (Klinik dokter spesialis) : 6 sarana, dan klinik perusahaan : 35 sarana, serta klinik pratama : 13 sarana. Selain klinik, sarana yang ada di Kabupaten Karawang adalah apotek dengan jumlah 260 apotek yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karawang, dan juga Rumah Bersalin (RB, bila ijin sarana sudah habis masa berlaku RB maka harus mengurus kembali perijinannya menjadi Klinik atau kembali menjadi praktek bidan perorangan) terdapat 38 buah, Puskesmas 50 puskesmas, Puskesmas Pembantu (pustu) mengalami penambahan dari tahun sebelumnya yang hanya 69 pada tahun 2013 dan 70 pustu pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi berjumlah 71 buah.



**Gambar 3.7**  
**Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2011-2015**

Berdasarkan grafik diatas dapat kita lihat jumlah klinik di Kabupaten Karawang sebanyak 297 klinik. Dari grafik diatas terlihat ada beberapa kategori klinik. Sebelum terbitnya Permenkes No.28 tentang klinik yang terbit pada tahun 2011, Kategori klinik disebut dengan istilah balai pengobatan. Dari tabel diatas jumlah balai pengobatan baik umum maupun perusahaan sebanyak 209 buah. Setelah terbitnya Permenkes No 28 tahun

2011 dan kembali terbitnya Permenkes No 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Kategori klinik dibagi menjadi dua jenis yaitu Klinik Pratama dan Klinik Utama. Sebagaimana dimaksud pada Peraturan menteri Kesehatan No 9 tentang Klinik Tahun 2014 Klinik Pratama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus sedangkan Klinik utama merupakan Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik. Sehingga dari tabel diatas dapat disimpulkan jumlah klinik yang memiliki ijin di Kab. Karawang sebanyak 297 klinik terdiri dari 6 klinik utama, 82 Klinik Pratama ( Umum dan Perusahaan), serta 209 Balai Pengobatan (umum dan Perusahaan).

**Tabel 3.41**  
**Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014*	2015*
<b>1</b>	Dokter Umum	608	728	889	106	<b>113</b>
<b>2</b>	Dokter Spesialis	156	158	160	0	<b>0</b>
<b>3</b>	Dokter Gigi	81	87	108	46	<b>47</b>
<b>4</b>	Perawat	1.600	1.900	1.600	265	<b>281</b>
<b>5</b>	Sanitasi	42	46	46	25	<b>32</b>
<b>6</b>	Perawat Gigi	35	93	81	23	<b>24</b>
<b>7</b>	Bidan	813	815	1.086	694	<b>725</b>
<b>8</b>	<b>Farmasi</b>	<b>37</b>	<b>62</b>	<b>265</b>	<b>28</b>	<b>29</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Ket:\*=data pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Karawang

Dari data tersebut diatas jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2014 dan 2015 adalah petugas kesehatan yang bekerja dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang (Kantor Dinas Kesehatan dan UPTD Kesehatan), baik yang berstatus sudah PNS atau pun yang masih menjadi Pegawai Tidak Tetap. Data dari luar Lingkungan Dinas Kesehatan sulit di dapatkan sehingga jumlahnya sedikit. Tidak seperti halnya tahun 2011-2013 jumlah tenaga bisa didapatkan dengan mudah karena adanya penerbitan ijin penyelenggaraan pelayanan kesehatan masih di lingkungan Dinas Kesehatan sehingga pergeseran dan perpindahan dari tenaga kesehatan masih bisa diketahui, sehingga jumlahnya pun bisa dengan mudah didapatkan.

### 3) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu bangsa. Upaya yang dilakukan di bidang kesehatan adalah dengan meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) dengan cara menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Kasar (AKK).



Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dalam menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir adalah dengan meluncurkan Sistem Informasi dan Komunikasi Jejaring Rujukan Gawat Darurat Ibu dan Bayi Baru Lahir (SiJariEMAS). Sistem teknologi dengan memanfaatkan pesan singkat atau SMS, untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibu dan bayi baru lahir, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem rujukan gawat darurat ibu dan bayi baru lahir, melalui no SMS Gateway 081212395555, telpon 119/ 02678453243, pin BBM 79003AFE.

SiJariEMAS dioperasikan oleh 8 Bidan Call Center yang terlatih, 2 petugas IT, melayani 24 jam 7 hari. Sejak diluncurkan oleh Bupati Karawang tanggal 14 September 2013, telah merujuk lebih dari 4.293 kasus, 1124 tenaga kesehatan dan 941 bidan telah terdaftar, melibatkan 50 Puskesmas dan 20 Rumah Sakit di Kabupaten Karawang. SiJariEMAS sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 4.293 kasus. Saat ini, Rumah Sakit lebih siap menerima rujukan pasien gawat darurat. Keluarga pasien dan bidan pengirim rujukan mendapat kepastian kemana pasien harus dibawa dan mendapat advis apa yang harus dilakukan oleh bidan sebelum merujuk, terbangunnya komunikasi antara bidan, Puskesmas dan rumah sakit, menjadi basis data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di Dinas Kesehatan dan rumah sakit, serta Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) lebih berdaya untuk penanganan kasus sehingga ibu selamat bayi sehat.

**Tabel 3.42**  
**Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Tahun 2012-2015**

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Kasus Kematian Bayi	225	187	170	<b>189</b>
2	Kasus Kematian Ibu	55	64	59	<b>68</b>
3	Persentase Ibu hamil resiko tinggi yang tertangani (%)	83,13	82,45	44,15	<b>47,91</b>
4	Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	76,85	75,56	70,33	<b>80,02</b>
5	Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	88,44	91,54	87,12	<b>90,57</b>
6	Persentase pelayanan Ibu Nifas (%)	87,13	90,84	85,90	<b>91,35</b>
7	Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	67,07	73,74	47,01	<b>55,96</b>
8	Persentase KN1 (Kunjungan Neonatal 1) (%)	93,45	96,46	91,55	<b>95,74</b>
9	Persentase kunjungan bayi (%)	82,89	89,91	91,77	<b>97,66</b>
10	Persentase pelayanan kesehatan anak balita (%)	71,43	79,16	82,16	<b>80,03</b>
11	Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)	10	28	28	<b>12</b>
12	<b>Jumlah RS di Kabupaten Karawang yang melaksanakan Ponek (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang*

**Tabel. 3.43**  
**Hasil Cakupan Program KIA di Kabupaten Karawang Tahun 2013 – 2015**

No	Indikator	Target 2013 (%)	2013			2014			2015		
			SSRN	ABS	%	SSRN	ABS	%	SSRN	ABS	%
1	K. 1	99	65.553	61.618	94,00	68.212	60.432	88,59	62.749	58.429	93,12
2	K. 4	98	65.553	59.440	90,67	68.212	58.042	85,09	62.749	56.175	89,52
3	LINAKES	96	62.573	57.282	91,54	65.112	56.725	87,12	59.896	54.248	90,57
4	N. 2	96	59.593	57.109	95,83	62.012	56.612	91,29	57.044	54.572	95,67
5	Kunjungan Bayi	96	59.593	53.578	89,91	62.012	56.907	91,77	57.044	55.712	97,66

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang*

**Tabel 3.44**  
**Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2012-2015**

No	Penyebab	2012	2013	2014	2015
1	Ekslamsi/Preeklamsi Berat	22	20	20	34
2	Pendarahan	12	18	12	17
3	Infeksi	0	5	3	6
4	Lain-lain	21	21	24	11
	Jumlah	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>59</b>	<b>68</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

**Tabel 3.45**  
**Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014**

No	Penyebab	2011	2012	2013	2014	2015
1	BBLR	56	83	74	63	64
2	Tetanus Neonatorum	2	2	1	0	0
3	Infeksi	9	3	3	6	8
4	Penyebab lain	19	16	15	19	23
5	Asfiksia	53	55	47	41	47
6	Kelainan Kongenital	32	37	20	21	18
7	Diare	4	4	3	2	3
8	Bronchopneumoni	4	6	5	6	6
9	Kelainan Saluran Cerna	0	0	1	1	0
10	Kelainan Syaraf	0	0	0	1	0
11	Lain-lain	13	19	18	10	20
	Jumlah	192	225	187	170	189

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

#### 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

**Tabel 3.46**  
**Bayi usia 0-9 bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2011-2015**

No	Jenis Imunisasi	2011	2012	2013	2014	2015
1	HB 0-7 bulan	47.464	51.686	50.772	54.427	53.076
2	BCG	53.225	56.885	56.971	56.532	56.103
3	DPT HB 3	51.529	55.653	52.588	55.029	53.938
4	Campak	51.645	554.495	53.223	55.082	54.025
5	POLIO 4	50.406	54.854	53.905	56.029	54.364

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

**Tabel 3.47**  
**Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang ditangani	12	12	15	184	215
2	Persentase Desa UCI ( <i>Universal Child Immunization</i> ) (%)	82,20	65,28	93	93,2	80,6%
3	Jumlah Penemuan Kasus non Polio AFP ( <i>Acute Flaccid Paralysis</i> ) per 100.000 anak di bawah umur 15 tahun	13	13	13	15	17
4	Jumlah Desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam	22	26	10	11	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

**Tabel 3.48**  
**Cakupan Imunisasi Tahun 2012-2015**

No	Indikator	2012		2013		2014		2015	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
1	BCG	53.225	90	56.971	96	56.532	95	56.103	98
2	DPT. 3	51.529	96	52.588	88	56.029	96	53.938	95
3	POLIO. 3	50.360	94	53.905	90.4	55.087	96	55.106	97
4	CAMPAK	51.645	90	53.223	89.3	55.082	95	54.025	95
5	HEPATITIS B.3	47.464	88	50.772	85	54.427	94	53.076	93
6	TT. 2	61.539	104	59.006	90	33.441	49	30.002	44

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Cakupan semua jenis imunisasi yang belum tercapai adalah imunisasi hepatitis B usia 0-7 hari (target 95%), karena bayi yang lahir di klinik atau Rumah Sakit terlambat untuk diimunisasi hepatitis B pada usia 0-7 hari. Imunisasi TT 2+ tidak tercapai karena status TT di skrining berdasarkan jumlah imunisasi TT yang sudah didapat.

**Tabel 3.49**  
**Hasil Cakupan Program P2PL Tahun 2011-2015**

No	Program	2011	2012	2013	2014	2015
1	P2 TBC :					
	- Penemuan BTA Kasus	2.098	2.562	2.484	2.609	2.118
2	P2 kusta :					
	- Prevalensi / 10.000 Penduduk	1,1	1,7	1,8	1,7	1,6
3	P2 PMS/HIV-AIDS :					
	- Penemuan HIV	39	41	72	92	104
	- Penemuan AIDS	-	0	10	55	101



No	Program	2011	2012	2013	2014	2015
4	P2 DIARE :					
	- Penemuan Kasus Diare	68.987	76.314	69.805	70.301	72.313
5	P2 ISPA					
	- Penemuan Penderita Pneumonia	12.979	17.314	15.944	14.397	15.112
6	P2 DBD					
	- Penemuan Kasus	249	495	758	301	569
	- Kematian 4 (CFR)	2	4	7	2	4
	- Insiden rate (IR) 100.000 Penduduk	11,5	22,8	35,00	13,3	25,7
7	P2 FILARIASIS	34	39	43	46	51
	- Penemuan Kasus					

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

## 5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

**Tabel 3.50**  
**Cakupan Sarana Air Bersih, Jamban Keluarga dan TPM**  
**Tahun 2012-2015**

No	Nama Sarana	2012		2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
A.	Ledeng	49.092	9,32	50.396	9,61	49.955	9,40	58.749	10,37
	Sumur Pompa Tangan (SPT)	86.891	16,49	76.897	14,67	74.957	14,10	70.834	12,51
	Sumur Gali (SGL)	70.317	13,35	63.340	12,08	65.334	12,29	64.676	11,42
	Penampungan Mata Air (PMA)	2.069	0,39	2.069	0,39	2.337	0,44	2.337	0,41
	Penampungan Air Hujan (PAH)	1.566	0,3	1.554	0,30	1.488	0,28	1.534	0,27
	Pompa Listrik	224.309	42,57	238.535	45,50	245.474	46,18	274.094	75,88
B.	Jamban Keluarga	318.418	60,44	328.380	62,64	340.446	64,05	358.565	63,30
C.	Tempat Pengolahan Makanan (TUPM) yang diperiksa	4.426	62,56	5.205	73,24	5.184	71,79	5.042	66,47
	TUPM yang memenuhi syarat kesehatan	3.425	77,38	4.006	76,96	4.057	78,26	.958	78,50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

## 6) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

**Tabel 3.51**  
**Pemakaian Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas**  
**Tahun 2012-2015**

No	Pemakaian Obat dan Perbekalan Kesehatan	2012	2013	2014	2015
1	Obat dan Perbekalan Kesehatan (Rp)	9.950.505.200	10.097.208.801	15.139.661.913	14.577.565.864

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Pada Tahun 2012 Pemakaian obat (distribusi obat) dan perbekalan kesehatan sebesar Rp.9.950.505.200,-, seluruh obat dan perbekalan kesehatan ini didistribusikan ke 50 puskesmas di wilayah Kabupaten Karawang dan 1 UPTD Poliklinik Kesehatan Karyawan (PKK). Kegiatan distribusi obat di Kabupaten Karawang terdiri dari :

- a. Kegiatan distribusi rutin, mencakup distribusi untuk kebutuhan pelayanan umum di unit pelayanan kesehatan.
- b. Kegiatan distribusi khusus, mencakup distribusi obat untuk :
  - Program kesehatan
  - Kejadian Luar Biasa
  - Bencana (alam dan sosial)

Tahun 2013 pemakaian atau distribusi obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp. 10.097.208.801,-, pemakaiannya tidak terlalu jauh berbeda dengan tahun 2012, seluruhnya didistribusikan ke 50 puskesmas dan 1 UPTD Poliklinik Kesehatan Karyawan (PKK). Kegiatan distribusi obat di Kabupaten Karawang terdiri dari :

- a) Kegiatan distribusi rutin, mencakup distribusi untuk kebutuhan pelayanan umum di unit pelayanan kesehatan.
- b) Kegiatan distribusi khusus, mencakup distribusi obat untuk :
  - Program kesehatan
  - Kejadian Luar Biasa
  - Bencana (alam dan sosial)

Pada tahun 2014 pemakaian atau distribusi obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp. 15.139.661.913,-, jumlah ini mengalami peningkatan yang sangat besar dari tahun sebelumnya yang dikarenakan mulai tahun 2014 ini vaksin dasar imunisasi disimpan di Gudang Farmasi Kabupaten Karawang, menjadi satu atap dengan penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan lainnya, yang disesuaikan dengan kebijakan nasional “*One Gate Policy*”. Hal ini tentu akan memudahkan akses keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk vaksin sehingga pelayanan kesehatan bisa lebih optimal.

Adapun Kegiatan distribusi obat di Kabupaten Karawang Tahun 2014 terdiri dari :

- a) Kegiatan distribusi rutin, mencakup distribusi untuk kebutuhan pelayanan umum di unit pelayanan kesehatan.
- b) Kegiatan distribusi khusus, mencakup distribusi obat untuk :
  - Program kesehatan
  - Kejadian Luar Biasa
  - Bencana (alam dan sosial)

Pemakaian atau distribusi obat dan perbekalan kesehatan tahun 2015 sebesar Rp. 14.577.565.864,-. Jumlah ini mengalami penurunan jumlahnya dari tahun 2014, hal ini disebabkan karena berkurangnya anggaran untuk pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang ada di seksi Farmasi dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang antara lain karena puskesmas telah memiliki anggaran sendiri untuk pembelian obat dari dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang selain dipergunakan untuk belanja jasa pelayanan, belanja alat kesehatan, dan belanja alat penunjang kesehatan. Namun demikian, ada beberapa pengadaan obat dari dana Kapitasi JKN yang pembeliannya melalui *e-catalog* dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, karena dalam pembeliannya harus ada apoteker sebagai penanggungjawab dalam pembelian obat tersebut.

## 7) Program Pengawasan Obat dan Makanan

**Tabel 3.52**  
**Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Apotik yang dipantau	30	50	70	100	50
2	Jumlah Toko Obat yang dipantau	20	15	20	20	25
3	Jumlah pedagang makanan yang dipantau	831	1.306	1.378	2.094	1.876
4	Jumlah Produsen makanan yang dipantau	728	906	669	1.138	1.132
5	Persentase Sediaan Farmasi yg sesuai Peraturan Perundang-undangan	-	-	8	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karawang

Pemantauan Pedagang makanan dibagi menjadi 2 jenis pemantauan, yaitu pembinaan dan uji petik. Pembinaan merupakan pemantauan/pemeriksaan pedagang makanan secara fisik/sarananya masih belum memenuhi syarat hygiene sanitasi makanan, sedangkan uji petik merupakan pemantauan/pemeriksaan pedagang makanan secara fisik/sarananya telah memenuhi syarat hygiene sanitasi makanan. Pemantauan pedagang makanan diutamakan kepada pedagang makanan yang belum memenuhi syarat hygiene sanitasi dengan harapan untuk pemantauan selanjutnya telah melakukan perbaikan dan secara penilaian menjadi memenuhi syarat hygiene sanitasi. Pelaksanaan uji petik dilakukan hanya apabila terjadi kejadian luar biasa keracunan makanan, atau diperkirakan mengalami penurunan kualitas dari pedagang makanan.

## 8) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

**Tabel 3.53**  
**Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2012-2015**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Balita yang ditimbang berat badannya	154.200	145.783	147.492	153.056
2	Bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif	8.634	16.480	18.172	20.269
3	Anak usia 6-59 bulan menadapatkan kapsul	187.247	136.091	178.725	182.414
4	Kasus Gondok (GAKY) yang ditangani	-	-	-	-

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
5	Jumlah Puskesmas melaksanakan surveilans gizi	50	50	50	50
6	Kecamatan yang memiliki data status gizi balita	30	30	30	30
7	Jumlah Balita gizi buruk mendapatkan perawatan	669	415	395	281
8	Jumlah Balita gizi kurang yang ditangani	15.274	7.908	7.496	7.477

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

**Tabel 3.54**  
**Kegiatan Distribusi Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil dan Ibu Nifas Tahun 2012-2015**

No	Distribusi	2012		2013		2014		2015	
		Cakupan	%	Cakupan	%	Cakupan	%	Cakupan	%
1	Fe 1 Ibu Hamil	60.862	94,49	59.206	90,32	60.645	88,91	58.307	92,92
2	Fe 3 Ibu Hamil	58.096	90,2	57.208	87,27	59.290	86,92	56.424	89,92
3	Fe Ibu Nifas	51.049	83,03	49.015	78,33	50.363	77,35	54.452	90,91

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

**Tabel 3.55**  
**Hasil Cakupan Kegiatan Penimbangan di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015**

No	Penyebab	2011	2012	2013	2014	2015
1	Partisipasi Masyarakat (D/S)	63,82	75,13	70,69	65,77	67,96
2	Cakupan Program (K/S)	69,65	85,92	84,05	79,53	81,45
3	Keberhasilan Program (N/S)	49,00	54,54	43,16	40,80	46,06
4	Efek Program (N/D)	76,91	72,59	61,06	60,80	62,06
5	Kelangsungan Program (D/K)	91,39	87,44	84,11	82,95	83,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa cakupan program Kesehatan Ibu dan Anak mengalami peningkatan di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Namun, selain cakupan program yang mengalami peningkatan, kasus kematian pun ikut naik dibandingkan dengan jumlah di tahun sebelumnya, yaitu pada kematian ibu dan kematian bayi.

Penyebab terbanyak kasus kematian ibu masih didominasi oleh kasus PEB dan perdarahan, sedangkan penyebab kematian bayi masih didominasi oleh BBLR dan asfiksia. Masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya kasus kematian ibu yaitu terjadi karena faktor penanganan komplikasi yang belum adekuat yang dipengaruhi oleh sarana, tenaga, obat dan managerial. Faktor terlambat merujuk dan lama perjalanan sampai ke tempat tujuan rujukan dipengaruhi oleh : pendidikan, ekonomi, budaya, gender dan geografis. Selain itu juga kematian ibu mencerminkan status gizi dan kesehatan ibu, keadaan sosial ekonomi, kondisi kesehatan lingkungan serta fasilitas dan tingkat pelayanan kesehatan prenatal dan obstetri. Pada tahun 2015, di kabupaten Karawang terjadi 68 kasus kematian ibu yang tersebar di 35 puskesmas, dan terdapat 189 kasus kematian bayi yang tersebar di 40 puskesmas. Sebaran kematian tidak terganggu oleh akses kesehatan dalam hal ini jarak tempuh dari puskesmas ke fasilitas kesehatan tempat rujukan, karena semuanya dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingginya kasus kematian ibu yaitu :

- Faktor penanganan komplikasi yang belum adekuat yang dipengaruhi oleh sarana, tenaga, obat dan managerial.
- Faktor terlambat merujuk dan sampai ke tempat rujukan dipengaruhi oleh : pendidikan, ekonomi, budaya, gender, dan geografis.
- Faktor kurangnya kemampuan SDM dalam penanganan kasus kegawatdaruratan ibu dan bayi.

Pencapaian cakupan program kesehatan ibu dan anak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun tahun ini masih belum memenuhi target yang diharapkan. Namun dengan kenaikan capaian sudah menunjukkan kinerja petugas kesehatan sudah cukup baik walaupun kedepan harus lebih ditingkatkan lagi baik kualitas maupun kuantitasnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel. 3.56**  
**Distribusi Vitamin A pada Bayi dan Balita Tahun 2012-2015**

No	Indikator	2012		2013		2014		2015	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
1	Jumlah Bayi dan Balita dapat Vit. A (bulan Pebruari)								
	a. Bayi	23.232	79,3	16.971	56,96	18.068	58,28	18.464	64,74
	b. Balita	145.320	99,1	136.091	92,81	144.996	89,37	146.969	88,66
2	Jumlah Bayi dan Balita dapat Vit. A (bulan Agustus)								
	a. Bayi	21.763	74,28	15.145	50,82	15.851	51,13	16.981	59,54
	b. Balita	142.279	97,03	145.243	99,05	145.824	89,88	151.271	91,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

**Tabel 3.57**  
**Status Gizi Hasil Bulan Menimbang Tahun 2011-2015**

No	Status Gizi	2011	2012	2013	2014	2015
1	Gizi buruk (Sangat kurang)	0.80	0.91	0,51	0,41	0,39
2	Gizi kurang	6.29	8.51	4,19	3,9	3,79
3	Gizi baik	9 0.30	88.25	93,44	93,4	94,18
4	Gizi lebih	1.24	2.6	1,83	2,31	1,64

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari data hasil Program perbaikan gizi masyarakat mengalami kenaikan dari semua kegiatan, mulai dari hasil kegiatan penimbangan balita di posyandu, cakupan ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan, bayi yang mendapatkan kapsul vitamin A, dan kegiatan distribusi tablet Fe untuk ibu hamil dan ibu nifas. Meskipun naik cakupannya jika dibandingkan dengan tahun lalu tapi belum dapat mencapai target yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara jumlah sasaran riil dengan sasaran proyeksi yang ada.

Untuk kasus balita gizi buruk masih banyak ditemukan selama tahun 2015, yaitu sebanyak 281 kasus. Meskipun jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 395 kasus, jumlah penurunannya sebesar 114 kasus. Semua balita gizi buruk yang baru ditemukan semuanya sudah mendapatkan perawatan (100%) mulai dari dilakukannya validasi data

anthropometri, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan gizi sampai dengan Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan (PMT-P). Pada tahun 2015 jumlah balita gizi kurang yang terjaring pada saat Bulan Penimbangan Balita (BPB) sebanyak 7.477 anak. Dilihat dari tabel diatas persentase jumlah balita pada tahun 2015 (3,79%) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (3,9%).

Penurunan jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang karena Pemerintah Kabupaten Karawang sangat serius dalam penanganan masalah balita kurang gizi pada tahun 2015, hal ini terbukti dengan adanya klinik gizi rawat jalan yang berada di 11 puskesmas, pemberian PMT-P untuk balita kurang gizi, peningkatan kapasitas petugas tentang gizi tentang konseling menyusui, pemantauan pertumbuhan anak serta Pemberian Makanan Bayi dan Anak, dan juga dilakukan surveillance gizi, penyuluhan dan konseling gizi.

#### **9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya**

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan telah dilaksanakan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu serta jaringannya yang pembangunannya dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.48 berikut ini :

**Tabel 3.58**  
**Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana**  
**Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya**  
**Tahun Anggaran 2012-2015**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Puskesmas yang berprestasi dan terakreditasi	3	9	20	0
2.	Pembangunan Gedung PONEB (unit)	9	9	1	-
3.	Pembangunan Gedung Puskesmas (unit)	4	1	3	2
4.	Pembangunan Rumah Dinas Dokter	1	0	-	-
5.	Perbaikan Rumah Dinas Jabatan	1	1	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

## 10) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

**Tabel 3.59**  
**Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tahun 2011- 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Sarana Kesehatan yang memenuhi Standar pelayanan					
	a. Rumah Sakit	16	16	19	19	20
	b. Klinik	230	230	493	247	297
	c. Puskesmas	48	50	50	50	50

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

## 11) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rujukan

**Tabel 3.60**  
**Peningkatan Kualitas Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rujukan Tahun 2011- 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase BP Puskesmas yang mempunyai protap pengobatan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Pasien rawat inap yang disembuhkan	85%	85%	87%	89%	87,3%
3.	Persentase pasien yang memanfaatkan rujukan puskesmas	2,05%	2,29%	3,20%	2,72%	2,85%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Semua puskesmas sudah memiliki protap pengobatan untuk pelayanan kesehatan dasar, tapi belum sesuai dengan standar permenpan atau permenkes sehingga tahun ini diadakan workshop sop sesuai dengan permenpan. Peserta terdiri dari perwakilan puskesmas yang mau diakreditasi tahun 2016 saat ini sedang tahap penyusunan SOP sesuai dengan standar yang ada dan disosialisasikan ke semua puskesmas dan akan dilakukan evaluasi secara berkesinambungan. Sedangkan pengobatan gigi belum mempunyai protap pengobatan tahun ini akan dibuatkan sesuai dengan standar.

Persentase Pasien rawat inap yang disembuhkan hanya mencapai 87,3 % ada beberapa puskesmas memiliki data yang tidak lengkap, alat yang tidak memadai, obat yang terbatas serta kompetensi SDM yang

terbatas sehingga sejak tahun 2014 dan tahun 2015 semua dokter telah dilatih kegawat daruratan pemenuhan alat kesehatan dan obat dengan menggunakan dana kapitasi di beberapa puskesmas.

## 12) Program Peningkatan Kualitas Perawatan Kesehatan Masyarakat

**Tabel 3.61**  
**Peningkatan Kualitas Perawatan Kesehatan Masyarakat**  
**Tahun 2011- 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah KK rawan dibuat asuhan Keperawatan (Askep)	8.692	3.680	6.358	7.558	8.348
2.	Jumlah keluarga mandiri (KM) Tingkat IV	5.342	2.337	3.615	4.815	4.850
3.	Jumlah pasien yang memanfaatkan klinik terpadu graha semesta	65.353	68.358	70.105	71.305	90.534

*Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang*

Jumlah KK rawan yang dibuat asuhan keperawatan (ASKEP) disetiap tahun terjadi peningkatan karena adanya dana BOK dan kapitasi sehingga perawat semangat membuat Askep melakukan kunjungan rumah keluarga rawan demikian juga pembinaan yang dilakukan perawat dengan tujuan keluarga yang dibina menjadi mandiri atau KM IV tetapi untuk menuju KM IV agak sulit dengan alasan indikator KM IV mengharuskan keluarga melakukan tindakan promotif secara aktif.

Jumlah Pasien yang memanfaatkan klinik terpadu graha semesta walaupun terjadi peningkatan baru mencapai 6 % dari pengunjung total di puskesmas hal ini dikarenakan banyak pasien yang tidak mau dirujuk ke ruang konseling masih beranggapan membutuhkan waktu yang lama ,belum memahami konsep pencegahan lebih baik dari mengobati serta pasien sehat tidak mau memanfaatkan klinik graha semesta karena masih memiliki pemahaman paradigma sakit bukan paradigma sehat sehingga dibutuhkan kegiatan sosialisasi secara berkesinambungan tentang manfaat graha semesta dan penyuluhan secara terus menerus.

#### 4. **Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian PMKS penerima manfaat pelayanan kesejahteraan sosial.**

Indikator Kinerja Strategis:  
Prosentase PMKS penerima manfaat yang mampu mandiri.

Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian PMKS penerima manfaat pelayanan kesejahteraan sosial dititikberatkan pada penyediaan pelayanan



rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial. Program diatas, dilaksanakan melalui beberapa kebijakan, yaitu :

- (1) Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial serta masyarakat miskin perdesaan dan perkotaan, khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- (2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi aparatur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik;
- (3) Pengembangan dan pengelolaan potensi SDM di bidang Pemulihan dan Perlindungan Sosial (Pemlinsos), Pemberdayaan Sosial (Pemsos) dan Bantuan dan Jaminan Sosial (Banjamsos).

Pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Karawang belum optimal. Hal itu tak terlepas dari tingginya minat pendatang (urban) untuk mencari kerja dan menetap di Kab. Karawang. Karawang mengalami dinamika perkembangan cukup besar, yaitu adanya perkembangan industri dan jasa, juga adanya rencana pembangunan pelabuhan dan bandara, selain permasalahan dengan terus meningkatnya PMKS, kuota untuk pembinaan PMKS di Panti Bekasi dan Cirebon sangat terbatas.

Sebagai solusi kedepan Pemerintah Kabupaten Karawang sudah ada rencana akan memiliki panti multifungsi. Sehingga ke depan 25 jenis PMKS yang ada di Karawang akan dapat tertampung dan juga diberikan keterampilan.

### 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

**Tabel 3.62**  
**Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2011-2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penduduk miskin perkotaan	139.675	256.629	-	106.260	-
2.	Jumlah penduduk miskin perdesaan	401.134	284.993	-	600.728	-
3.	Jumlah KK penyandang masalah sosial	177.489	185.815	189.121	214.261	176.503
4.	Jumlah Anak Jalanan	295	316	334	329	301
5.	Jumlah Gepeng	330	353	142	152	151
6.	Jumlah Panti Asuhan	40	40	51	52	52
	- Terdaftar	28	28	37	42	49
	- Tidak Terdaftar	12	12	14	10	3
7.	Panti Sosial Tresna Werda	1	1	1	1	1
8.	Sarana Rehabilitasi Sosial	2	2	2	2	2
9.	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan serta perlindungan dan jaminan sosial	-	-	50%	66,88%	70,04%

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kab. Karawang

**Tabel 3.63**  
**Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat di Kab. Karawang 2011-2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pekerja Sosial Masyarakat	1.258	1.258	1.545	1.545	1.545
2.	Karang Taruna	261	390	309	309	309

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kab. Karawang

## 2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

**Tabel 3.64**  
**Data Bidang Sosial 2011-2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	Jumlah Panti Asuhan					
	- Terdaftar	28	28	37	42	<b>49</b>
	- Tidak Terdaftar	12	12	14	10	<b>3</b>
<b>2.</b>	Panti Sosial Tresna Werda	1	1	1	1	<b>1</b>
<b>3.</b>	Sarana rehabilitasi sosial	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kab. Karawang

**Tabel 3.65**  
**Data Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Jenis PMKS	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	Pekerja sosial masyarakat (PSM)	1.258	1.258	1.545	1.545	<b>1.545</b>
<b>2.</b>	Karang Taruna	261	390	309	309	<b>309</b>
<b>3.</b>	Organisasi Sosial	40	40	51	52	<b>52</b>
<b>4.</b>	Dunia usaha bidang kesos	185	185	165	165	<b>165</b>
<b>5.</b>	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	30	30	30	30	<b>30</b>
<b>6.</b>	Keperintisan dan kepahlawanan	102	106	8	6	<b>5</b>
<b>7.</b>	<b>Taruna siaga bencana (Tagana)</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>45</b>

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kab. Karawang

## 3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

**Tabel 3.66**  
**Data Jumlah Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya Tahun 2011-2015**

No.	Jenis PMKS	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Persentase pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	-	-	-	0,17%	0,19%

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kab. Karawang

**Tabel 3.67**  
**Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Jenis PMKS	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Balita terlantar	773	798	596	761	<b>751</b>
2.	Anak terlantar	5.764	5.849	5.447	6.125	<b>5.845</b>
3.	Anak nakal	599	664	599	660	<b>660</b>
4.	Wanita rawan sosial ekonomi	19.665	19.873	17.830	19.147	<b>18.629</b>
5.	Korban tindak kekerasan	141	233	25	391	<b>391</b>
6.	Lanjut usia terlantar	27.129	27.385	19.350	21.078	<b>20.842</b>
7.	Penyandang cacat	8.031	8.082	5.784	6.364	<b>6.288</b>
8.	Wanita Tuna Susila	278	299	158	158	<b>158</b>
9.	Pengemis	125	137	72	82	<b>82</b>
10.	Gelandangan	175	201	70	70	<b>69</b>
11.	Eks Napi	1.081	1.189	105	110	<b>106</b>
12.	Korban NAPZA	127	308	21	20	<b>20</b>
13.	Keluarga fakir miskin	177.489	186.079	155.212	176.747	<b>173.585</b>
14.	Keluarga dengan kondisi perumahan dan lingkungan tidak layak	36.243	38.377	27.298	29.923	<b>29.122</b>
15.	Korban bencana alam	2.638	7.650	238.275	465.987	<b>2.255</b>
16.	Korban bencana sosial	58	5.695	275	122	<b>291</b>
17.	Pekerja migran bermasalah	64	70	243	372	<b>372</b>
18.	ODHA	213	238	327	221	<b>501</b>
19.	<b>Anak jalanan</b>	<b>301</b>	<b>326</b>	<b>334</b>	<b>329</b>	<b>336</b>

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kab. Karawang

5. **Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepesertaan KB dan penyelenggaraan kesehatan reproduksi.**

Indikator Kinerja Strategis : Prosentase Peningkatan Peserta KB PUS.

**1) Program Keluarga Berencana**

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan



yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain dan menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata

Pengertian Program Keluarga Berencana menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan keluarga, dan bagian terpadu dalam program pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan



penduduk tumbuh seimbang dalam kesejahteraan ekonomi, spiritual dan sosial budaya. Pendataan keluarga yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program Keluarga Berencana pada tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.68**  
**Pendataan Keluarga Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>A.</b>	Data KB					
	- Jumlah PUS	494.568	515.913	542.773	536.642	<b>543.898</b>
	- Jumlah Peserta KB	367.007	434.208	392.328	383.896	<b>399.804</b>



No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Hamil	21.329	22.166	28.412	25.376	<b>18.861</b>
	Ingin anak segera	34.696	37.367	39.344	78.710	<b>77.009</b>
	Ingin anak ditunda	34.551	30.746	36.116	21.802	<b>23.077</b>
	Tdk ingin anak lagi	36.985	47.219	46.573	26.858	<b>24.347</b>
<b>B.</b>	Data Tahapan Keluarga Sejahtera					
-	Keluarga Prasejahtera	233.554	221.252	212.314	226.781	
-	Keluarga Sejahtera I	167.488	172.540	184.617	167.772	
-	Keluarga Sejahtera II	98.260	61.751	67.926	69.112	
-	Keluarga Sejahtera III	125.615	202.639	241.278	200.094	
-	<b>Keluarga Sejahtera III+</b>	<b>20.260</b>	<b>11.735</b>	<b>17.442</b>	<b>13.550</b>	

Sumber Data: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Dari tabel 3.58 dapat dilihat bahwa jumlah peserta KB adalah 399.804 dari jumlah PUS yaitu 543.898, sehingga cakupan peserta KB mencapai 73%.

**Tabel 3.69**  
**Pencapaian Peserta Akseptor KB Baru Tahun 2013-2015**

No	Mix Kontrasepsi	Tahun Pencapaian 2013			Tahun Pencapaian 2014			Tahun Pencapaian 2015		
		Target	Pencapaian	%	Target	Pencapaian	%	Target	Pencapaian	%
<b>1</b>	IUD	2.936	3.531	120,3	5246	4626	87,35	6,133	4,903	<b>79,9</b>
<b>2</b>	MOP	195	95	48,7	203	64	31,53	116	54	<b>46,5</b>
<b>3</b>	MOW	804	1.380	171,6	1498	1161	77,50	1732	1306	<b>75,4</b>
<b>4</b>	Kondom	2.669	4.843	181,4	5088	4970	97,68	5075	6942	<b>136,8</b>
<b>5</b>	Implant	3.328	4.900	147,2	7326	4910	67,02	6646	4378	<b>65,9</b>
<b>6</b>	Suntikan	40.324	43.466	107,8	46763	51549	110,23	43034	52011	<b>120,9</b>
<b>7</b>	Pil	50.568	36.815	72,8	39776	30764	77,34	42264	50356	<b>119,1</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>100.823</b>	<b>95.030</b>	<b>94,2</b>	<b>105450</b>	<b>98.004</b>	<b>92,54</b>	<b>105000</b>	<b>119950</b>	<b>114,2</b>

Sumber Data: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

**Tabel 3.70**  
**Keadaan Peserta Akseptor KB Aktif Tahun 2013-2015**

No	Mix Kontrasepsi	Tahun Pencapaian 2013			Tahun Pencapaian 2014			Tahun Pencapaian 2015		
		Target	Pencapaian	%	Target	Pencapaian	%	Target	Pencapaian	%
<b>1</b>	IUD	17.103	22.501	131,5	23174	22033	95,07	23175	23920	<b>103,2</b>
<b>2</b>	MOP	4.853	3.566	73,5	3672	3672	1	3672	3614	<b>98,42</b>
<b>3</b>	MOW	7.354	10.607	144,2	10,913	10,493	96,15	10493	10693	<b>101,9</b>
<b>4</b>	Kondom	3.562	6.779	190,3	6974	7066	101,31	6974	8213	<b>117,7</b>
<b>5</b>	Implant	19.345	15.948	82,4	16341	15421	94,37	16341	16565	<b>101,3</b>
<b>6</b>	Suntikan	144.852	202.543	139,8	204714	202452	98.88	204714	205108	<b>100,2</b>
<b>7</b>	Pil	90.561	130.384	143,9	135,464	120805	891,78	135464	128159	<b>94.60</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>287.630</b>	<b>392.328</b>	<b>136,4</b>	<b>406302</b>	<b>833.896</b>	<b>205,24</b>	<b>406302</b>	<b>396272</b>	<b>97.53</b>
	Peserta Ganti Cara		0	5.774		3218			8684	
	Pencabutan Implant		0	4.062		3430			4653	
	Komplikasi Berat		0	22		43			17	
	<b>Kegagalan</b>		<b>0</b>	<b>17</b>		<b>33</b>			<b>7</b>	

Sumber Data: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

## 2) Program Pelayanan Kontrasepsi

**Tabel 3.71**  
**Pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>A.</b>	Peserta Akseptor KB Baru	133.625	98.479	95.030	98.044	<b>119.950</b>
-	IUD	3.017	3.639	3.531	4.626	<b>4.903</b>
-	MOP	86	139	95	64	<b>54</b>
-	MOW	1.276	1.180	1.380	1.161	<b>1.306</b>
-	Kondom	5.357	4.842	4.843	4.970	<b>6.942</b>
-	Implan	3.747	3.331	4.900	4.910	<b>4.378</b>
-	Suntikan	69.983	47.533	43.466	51.549	<b>52.011</b>
-	Pil	50.159	37.815	36.815	30.764	<b>50.356</b>
<b>B.</b>	Peserta Akseptor KB Aktif	362.630	376.545	392.328	383.896	<b>399.804</b>
-	IUD	2.747	22.310	22.501	23.033	<b>23.067</b>
-	MOP	3.588	3.542	3.566	3.626	<b>3.555</b>
-	MOW	9.364	9.963	10.607	10.993	<b>10352</b>
-	Kondom	5.992	6.088	6.779	7.066	<b>8624</b>
-	Implan	19.144	14.185	15.948	15.921	<b>17051</b>
-	Suntikan	191.332	197.181	202.543	202.452	<b>207.319</b>
-	Pil	124.439	123.276	130.384	120.805	<b>129816</b>
<b>C.</b>	Peserta Ganti Cara	2.574	2.574	5.774	3.218	<b>4.274</b>
<b>D.</b>	Pencabutan Implan	3.439	3.439	4.062	3.430	<b>3.422</b>
<b>E.</b>	Komplikasi Berat	0	0	22	43	<b>12</b>
<b>F.</b>	Kegagalan	11	11	17	33	<b>9</b>
<b>G.</b>	<b>Jumlah Peserta KB Baru MJP</b>	<b>8.126</b>	<b>8.289</b>	<b>9.906</b>	<b>10.761</b>	<b>10.641</b>

Sumber Data: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

**Tabel 3.72**  
**Data Sarana Kesehatan yang Melaporkan Pelayanan KB**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No	Nama Sarana Pelayanan KB	2011	2012	2013	2014	2015
<b>1</b>	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	1	1	1
<b>2</b>	Rumah Sakit Umum Swasta	12	12	20	20	20
<b>3</b>	Puskesmas/Klinik KB	52	50	52	52	52
<b>4</b>	Puskesmas Pembantu	53	69	60	69	69
<b>5</b>	Dokter Praktek Swasta	77	81	145	145	145
<b>6</b>	Bidan Praktek Swasta	327	402	446	667	667

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Penduduk merupakan salah satu potensi pembangunan, namun penduduk juga mempunyai implikasi yang luas terhadap sektor pembangunan lain, mulai dari pembangunan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, perumahan bahkan subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah, tidak



mengherankan bila kemudian banyak perhatian, biaya dan konsentrasi pembangunan lebih dicurahkan untuk memfasilitasi kebutuhan penduduk. Pemecahan pengendalian kelahiran melalui program Keluarga berencana merupakan masalah pokok kependudukan, pertumbuhan ekonomi tidak akan berjalan tanpa didukung sumber daya manusia (SDM) yang memadai, sebaliknya pembangunan SDM tidak akan tercapai tanpa dukungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan SDM akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk tidak terkendali, cara yang terbaik untuk membangun ekonomi dan SDM adalah dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB. Salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan distribusi yang tidak merata. Hal itu dibarengi dengan masalah lain yang lebih spesifik, yaitu angka fertilitas dan angka mortalitas yang relatif tinggi. Kondisi ini dianggap tidak menguntungkan dari sisi pembangunan ekonomi.. Hal itu diperkuat dengan kenyataan bahwa kualitas penduduk masih rendah sehingga penduduk lebih diposisikan sebagai beban daripada modal pembangunan. Logika seperti itu secara makro digunakan sebagai landasan kebijakan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk Secara mikro hal itu juga digunakan untuk memberikan justifikasi mengenai pentingnya suatu keluarga melakukan pengaturan pembatasan jumlah anak.

Penurunan fertilitas tersebut terkait dengan (keberhasilan) pembangunan sosial dan ekonomi, yang juga sering diklaim sebagai salah satu bentuk keberhasilan kependudukan, khususnya di bidang keluarga berencana di Kabupaten Karawang. Salah satu contoh kebijakan kependudukan yang sangat populer dalam bidang kelahiran (fertilitas) adalah program keluarga berencana. Program ini telah dimulai sejak awal tahun 1970-an. Tujuan utama program KB ada dua macam yaitu demografis dan non-demografis. Tujuan demografis KB adalah terjadinya penurunan fertilitas dan

terbentuknya pola budaya *small family size*, sedangkan tujuan non-demografis adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk yang merata dan berkeadilan. Keluarga berencana merupakan contoh kebijakan langsung dibidang fertilitas dan migrasi.

Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu dari sekian banyak variabel yang secara langsung berpengaruh terhadap tingkat fertilitas. Sementara itu kontribusi pemakaian kontrasepsi terhadap penurunan angka kelahiran tidak saja ditentukan oleh banyaknya pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pemakaiannya. Terkait dengan itu, selama ini program KB nasional memberikan prioritas pada pemakaian jenis kontrasepsi yang mempunyai efektivitas atau daya lindung tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan. Selain itu sasaran pemakaian kontrasepsi juga lebih difokuskan pada pasangan usia subur muda (usia di bawah 30 tahun) dengan paritas rendah (jumlah anak paling banyak dua orang). Dengan meningkatnya pemakaian kontrasepsi yang efektif dan mempunyai daya lindung yang tinggi bagi pasangan usia subur muda paritas rendah diharapkan kontribusi pemakaian kontrasepsi terhadap penurunan angka kelahiran di Kabupaten Karawang juga akan menjadi semakin besar.

Upaya penurunan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) tidak lepas dari pencapaian kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan kesertaan ber-KB sebesar 74.55 % dengan jumlah Peserta Aktifnya adalah 375.606 Akseptor dan jumlah Pasangan Usia Subur ( PUS ) adalah 503.809 sudah cukup tinggi, namun dari segi kualitas penggunaan yaitu tingkat kelangsungan penggunaan kontrasepsi (CR) dan efektivitas penggunaan metode kontrasepsi (CE) masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat drop out peserta KB yang cukup tinggi, hal lainnya proporsi penggunaan metode kontrasepsi masih didominasi oleh kaum perempuan, yaitu 97,45 % dan kaum laki-laki hanya sekitar 2,55 % ( Kondom dan MOP ) dari jumlah Pseserta KB Aktif seluruhnya yang berjumlah 375.606 Akseptor . Sedangkan alat kontrasepsi yang dipakai kebanyakan akseptor lebih memilih penggunaan kontrasepsi hormonal ( Implant, Suntik dan Pil ) yakni sebanyak 334.915 atau 89.16 %. Sedangkan kecamatan dengan kondisi CU/PUS tertinggi adalah Kecamatan Tempuran yakni 83.39 % , dan kecamatan dengan kondisi CU/PUS terendah adalah Kecamatan Klari yakni 69.98 %.

Melaksanakan praktek Keluarga Berencana dengan pendekatan kontrasepsi untuk mengatur kelahiran dan jumlah anak yang ideal belum tentu menjamin terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera, praktek keluarga berencana untuk program pengaturan kelahiran secara simultan harus diiringi dengan program ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan keluarga, melalui kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Bina Lingkungan Keluarga dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera serta kegiatan lainnya yang terintegrasi.

### 3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (KRR)

**Tabel 3.73**  
**Data Kelompok Kegiatan Tahun 2011 s.d. 2015**

No	Nama Kelompok Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	BKB (Bina Keluarga Balita)	448	615	650	531	531
2	BKR (Bina Keluarga Remaja)	221	281	278	248	248
3	BKL (Bina Keluarga Lansia)	218	273	273	246	227
4	PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Keluarga)	63	72	115	115	115
5	UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	324	300	323	283	301
6	Jumlah Konseling Remaja yang dilaksanakan	-	-	-	-	-

Sumber data : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

**Tabel 3.74**  
**Data Institusi Masyarakat Perdesaan Tahun 2011 s.d. 2015**

No	Nama Kelompok Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
1	PPKBD/Pos KB Desa	309	322	331	334	335
2	Sub PPKBD/Sub Pos KB Desa	1.767	1.840	1.849	1833	185
3	Kelompok Akseptor/Kelompok KB	6.162	6.377	6.411	6516	6520

Sumber data : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (PPKBD=Pembantu Pembina KB Desa)

**6. Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai tradisi, budaya dan kearifan lokal karawang.**

Indikator Kinerja Strategis :  
Cakupan organisasi seni yang  
dibina dan difasilitasi

Kabupaten Karawang mempunyai  
potensi kebudayaan yang cukup  
beragam. Hal tersebut ditandai  
dengan banyaknya jenis kesenian



antara lain : Seni Jaipongan, Ketuk Tilu, Kliningan, Calung, Topeng Banjet, Wayang Golek, Egrang, Barongsay, Reog, Ajeng/Tari Soja, Kedok Menyong dan budaya yang masih melekat dan berkembang di masyarakat Kabupaten Karawang, diantaranya: Kaulinan Budak Lembur, Mapag Cai, Nadran/Pesta Laut, Hajat Bumi, Nyalin, Tardug, dan 1 Muharraman/1 Suro.

Apabila potensi seni dan budaya ini berhasil dilestarikan, dikelola, serta dimanfaatkan dengan baik, akan berdampak kepada meningkatnya semangat masyarakat terutama generasi muda dan pelaku seni untuk lebih berperan aktif dalam melestarikan seni dan budaya asli Kabupaten Karawang.



**1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**

**Tabel 3.75**  
**Pengelolaan Kekayaan Budaya Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah pelaku budaya (orang)	44	49	79	134	<b>305</b>
2.	Jumlah kelompok budaya (jenis)	6	6	6	8	<b>11</b>
3.	<b>Jumlah situs sejarah dan budaya (buah)</b>	<b>85</b>	<b>96</b>	<b>104</b>	<b>116</b>	<b>126</b>

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang

Catatan : Kelompok Budaya adalah kegiatan kebudayaan yang melibatkan orang banyak; contohnya : Mapag cai, Nadran, Hajat Bumi

Upaya pelestarian budaya di Kabupaten Karawang diwujudkan dengan menyediakan sarana



penyelenggaraan seni dan budaya, mengelola situs serta benda cagar budaya, menyelenggarakan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya, dan melakukan pembinaan terhadap grup kesenian dan pelaku seni budaya.

Kepedulian masyarakat Kabupaten Karawang terhadap pengembangan nilai budaya terlihat dari semakin meningkatnya penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya dari tahun ke tahun, hal ini didukung oleh sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang juga bertambah jumlahnya.

## **MISI KEDUA : Penguatan Struktur dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.**

### **7. Meningkatnya nilai produksi ekonomi daerah.**

Indikator Kinerja Strategis : Prosentase peningkatan produksi padi, palawija, hortikultura, peningkatan produksi peternakan daging dan telur. Prosentase produksi perikanan serta prosentase peningkatan pendapatan petani, peternak dan nelayan. Prosentase penyerapan tenaga kerja pada industri kecil

#### **a. Pertanian**

Kabupaten Karawang merupakan daerah lumbung padi Jawa Barat dan salah satu daerah yang dapat memberikan kontribusi kebutuhan beras nasional yang setiap tahunnya rata-rata mencapai  $\pm 811.485$  ton/tahun.

**Tabel 3.76**  
**Jenis Komoditas dan Luas Tanam Tanaman Padi Sawah, Palawija, dan Hortikultura Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 (Ha)**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi Sawah	197.013	195.924	2013	198.644	195.726
2	Kedelai	886	152	640	486	1.839
3	Kacang Hijau	1.432	819	621	789	122
4	Jagung Pipilan Kering	1.553	1.260	486	167	1.108
5	Ketela Pohon	231	499	372	297	177
6	Ubi Jalar	21	32	29	24	6

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

**Tabel 3.77**  
**Jenis Komoditas dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah, Palawija, dan Hortikultura Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 (Kw/Ha)**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi Sawah	74,08	74,37	75,61	76,05	79,5
2	Kedelai	16,32	13,30	16,60	14,36	12,96
3	Kacang Hijau	11,28	10,80	11,05	11,42	16,22
4	Jagung Pipilan Kering	56,61	58,98	59,00	58,00	58,68
5	Ketela Pohon	195	195	195	195	145,04
6	Ubi Jalar	160	160	150	150	78,67

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

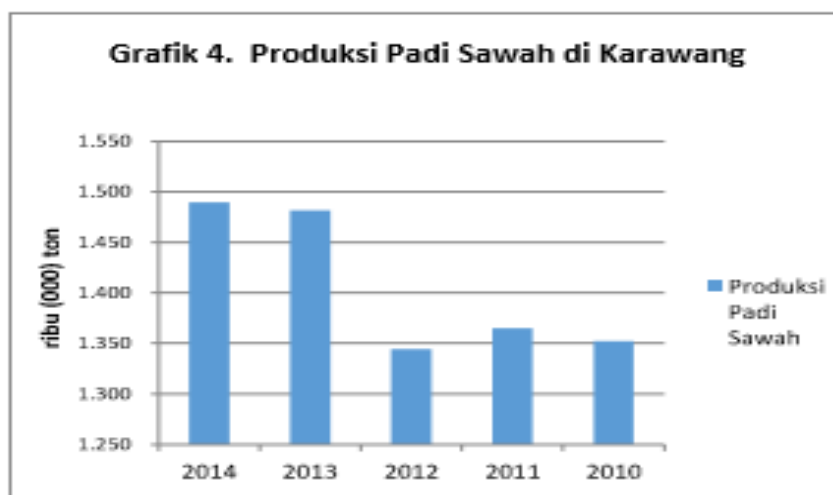
a) Potensi tanaman padi :

- (1) Luas lahan sawah : 97.577 Ha
  - Sawah pengairan teknis : 92.916 Ha
  - Sawah setengah teknis : - Ha
  - Sawah pengairan sederhana : - Ha
  - Sawah tadah hujan : 4.661 Ha
  - Sawah irigasi desa/non PU : - Ha
- (2) Luas pemanfaatan lahan sawah sebagai berikut :
  - Ditanami padi 2 kali satu tahun : 92.920 Ha
  - Ditanami padi 3 kali satu tahun : 3.271 Ha
  - Ditanami padi 1 kali setahun : 1.338 Ha

Pada tahun 2014 produksi padi mencapai 1.498.502 tonGKP yang terdiri dari produksi padi sawah 1.481.466 ton GKP dan produksi padi gogo 13.204 ton GKP. Luas panen padi sawah mencapai 195.285 Ha dengan produktivitas 76,05 kwintal GKP/Ha dan luas panen padi gogo mencapai 3.234 Ha dengan produktivitas 40,83 kwintal GKP/Ha.



Pada tahun 2015 produksi padi mencapai 1.531.104,5 ton GKP, naik 2% dibandingkan tahun 2014 (naik 49.638,05 ton) yang terdiri dari produksi padi sawah 1.524.842,55 ton GKP dan produksi padi gogo 6.261,95 ton GKP. Luas panen padi sawah mencapai 190.725 Ha dengan produktivitas 79,99 kwintal GKP/Ha, dan luas panen padi gogo mencapai 1.901 Ha dengan produktivitas 32,9 kwintal GKP/Ha.



**Gambar. 3.8**  
**Produksi Padi Sawah Kabupaten Karawang 2010-2014**

**Tabel 3.78**  
**Perkembangan Luas Tanam Padi Sawah di Kabupaten Karawang**  
**Per Desember Tahun 2011-2015 (dalam Ha)**

No	Kecamatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Karawang Barat	2.243	2.201	2.201	2.119	1.824
2.	Karawang Timur	1.744	1.744	1.744	1.535	1.497
3.	Majalaya	2.233	2.233	2.233	2.233	2.233
4.	Klari	2.445	2.445	2.445	2.445	2.445
5.	Telukjambe Barat	2.378	2.378	2.378	2.260	2.260
6.	Telukjambe Timur	1.135	1.135	1.135	1.135	826
7.	Ciampel	583	852	583	583	852
8.	Pangkalan	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
9.	Tegalwaru	1.912	1.912	1.912	1.912	1.912
10.	Rengasdengklok	2.026	2.026	2.026	2.026	2.026
11.	Jayakarta	3.531	3.531	3.531	3.531	3.531
12.	Kutawaluya	4.372	4.372	4.372	4.372	4.372
13.	Batujaya	4.931	4.931	4.931	4.931	4.931
14.	Tirtajaya	5.658	5.658	5.658	5.658	5.658
15.	Pakisjaya	3.360	3.360	3.360	3.360	3.166
16.	Pedes	5.156	5.156	5.156	5.156	5.156
17.	Cilebar	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395
18.	Cibuaya	4.416	4.416	4.416	4.416	3.946
19.	Cikampek	725	725	725	725	701
20.	Purwasari	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
21.	Tirtamulya	2.521	2.521	2.521	2.521	2.521
22.	Jatisari	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067
23.	Banyusari	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
24.	Kotabaru	1.413	1.434	1.434	1.332	1.332
25.	Cilamaya Wetan	5.218	5.218	5.218	5.218	5.216
26.	Cilamaya Kulon	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
27.	Telagasari	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28.	Lemahabang	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798
29.	Rawamerta	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191
30.	Tempuran	6.480	6.480	6.480	6.480	6.480
<b>JUMLAH</b>		<b>98.612</b>	<b>98.615</b>	<b>98.346</b>	<b>97.835</b>	<b>97.577</b>

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

b) Potensi Palawija dan Hortikultura



Palawija yang ditanam antara lain: kedelai, kacang tanah, kacang hijau, jagung, ketela pohon dan ubi. Pada tahun 2015 luas panen kedelai mencapai 1.793 Ha dengan produktivitas

12,96 kwintal biji kering/Ha, sedangkan luas panen kacang hijau 113 Ha dengan produktivitas 16,22Kw/Ha, produksi jagung sebesar 2.611,25 ton pipilan kering dengan luas panen 445 Ha dan produktivitas 58,68 Kw pipilan kering/Ha, produksi ketela pohon 2.364,17 ton dengan luas panen 163 Ha dan produktivitas 145,04 Kw/Ha, ubi jalar 47,2 ton dengan luas panen 6 Ha dan produktivitas 78,67Kw/Ha.

Tanaman hortikultura yang dibudidayakan antara lain: jamur merang, kacang panjang, mentimun, terong, caisin, kangkung, bayam dan cabe merah/rawit, petsai dan mentimun. Jamur merang merupakan komoditas yang dijadikan prioritas unggulan lokal sehingga berbagai upaya dalam pengembangan komoditas ini senantiasa dilakukan secara terintegrasi.

Pada tahun 2015 produksi jamur merang mencapai 4.131 ton dengan produktivitas 2,40Kw/kubung. Terjadi penurunan produksi sebesar 541 ton atau 11,58% dibandingkan tahun 2014. Jumlah kubung tahun 2015 yang berproduksi juga mengalami penurunan dari 2.030 kubung menjadi 1.723 kubung. Dari sisi pemasaran ada kenaikan harga jual jamur dari Rp. 15.000./kg menjadi Rp 23.000/kg.

### **1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan**

Keberhasilan pembangunan di Bidang Pertanian selama ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Produktivitas padi sawah pada tahun 2014 mencapai 76,05 Kw GKP/Hektar naik menjadi 79,99Kw GKP/hektar pada tahun 2015. Produktivitas padi gogo pada tahun 2014 sebesar 40,83Kw GKP/ha menurun menjadi 32,9 kw GKP/ha pada tahun 2015. Produksi padi sawah pada tahun 2014 mencapai 1.485.298 ton GKP naik menjadi 1.524.842,55 ton GKP, sedangkan produksi padi gogo tahun 2014 mencapai 13.204 ton GKP pada tahun 2015 turun menjadi 6.261,95 ton GKP.

Perkembangan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah dan padi gogo dari tahun 2011 sampai dengan 2015 tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 3.79**  
**Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKP)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2011	197.004	1.459.406	74,08
2	2012	193.458	1.438.775	74,37
3	2013	195.929	1.481.466	75,61
4	2014	195.285	1.485.298	76,05
5	2015	190.725	1.524.842,55	79,95

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

**Tabel. 3.80**  
**Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi gogo**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton GKP)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2011	2.908	11.316	39,97
2	2012	2.427	7.357	39,01
3	2013	3.338	11.400	34,15
4	2014	3.234	13.204	40,57
5	2015	1.901	6.261,95	32,94

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Produksi palawija ada penambahan luas panen dari ketela pohon, demikian pula dengan capaian produktivitas palawija mengalami kenaikan dari 51,13 Kw/Ha menjadi 27,11 Kw/Ha (turun 46%)

**Tabel. 3.81**  
**Perkembangan Produksi dan Produktivitas Palawija**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Tahun	Produksi (Ton )	Produktivitas (Kw/Ha)
1	2011	22.127	49,34
2	2012	17.265	64,86
3	2013	12.970	48,59
4	2014	12.651	51,13
5	2015	8.004,04	27,11

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Untuk memanfaatkan potensi bahan baku jerami yang melimpah, maka budidaya jamur merang dalam rangka peningkatan pendapatan petani perlu dikembangkan. Perkembangan kubung jamur pada tahun 2014 tercatat 2.030 kubung. Pada tahun 2015 jumlah kubung di Kabupaten Karawang menurun menjadi 1.723 kubung akibat faktor usia ekonomis kubung/pembangunan kembali kubung yang tidak produktif. Penurunan jumlah kubung mengakibatkan penurunan jumlah produksi jamur merang yang mencapai 541 ton atau sebesar 11,58 %, sehingga total produksi pada tahun 2015 mencapai 4.131 ton, akan tetapi kalau dilihat dari produktivitas mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 Produktivitas Jamur merang sebesar 2,30 kw/kubung dan pada tahun 2015 produktivitas jamur merang meningkat menjadi 2,40 kw/kubung.

Apabila diperhitungkan secara ekonomis pendapatan petani jamur meningkat sebesar 15.34 %, karena ada kenaikan harga jual jamur dari Rp 23.000/kg menjadi Rp 30.000-/kg. Untuk lebih jelasnya



perkembangan produksi dan produktivitas budidaya jamur merang dari tahun 2011 s.d. tahun 2015 dapat dilihat pada di bawah ini.

**Tabel. 3.82**  
**Perkembangan Produksi dan Produktivitas Jamur Merang**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Tahun	Jumlah Kubung (unit)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/kubung)
1	2011	2.560	5.632	2,20
2	2012	2.610	5.742	2,25
3	2013	2.349	5.403	2.30
4	2014	2.030	4.672	2,30
5	2015	1.723	4.131	2,40

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Ket: - 1 Tahun jamur merang bereproduksi sebanyak 10 x panen  
- Jumlah kubung yang berproduksi pada tahun 2013 sebanyak 2.349

Peningkatan produksi dan produktivitas serta penganekaragaman budidaya dan usaha tani ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani di bidang teknologi budidaya, maupun manajerial usaha tani, serta berubahnya perilaku petani dari perilaku tradisional ke perilaku inovatif, didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana usaha tani, serta infrastruktur yang memadai menuju ke sentra-sentra produksi. Akhirnya dengan demikian pendapatan petani pun menjadi meningkat.

**Tabel. 3.83**  
**Jenis Komoditas dan Luas Tanam Tanaman Padi Sawah, Palawija, dan Hortikultura Kab. Karawang Tahun 2011-2015 (Ha)**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi Sawah	197.013	195.924	197.599	198.644	195.726
2.	Kedelai	886	152	640	486	1.839
3.	Kacang Hijau	1.432	819	621	789	122
4.	Jagung pipilan kering	535	1.260	486	167	1.108
5.	Ketela Pohon	231	499	372	297	177
6.	Ubi Jalar	21	32	29	24	6

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

**Tabel 3.84**  
**Jenis Komoditas dan Produktivitas Tanaman Padi Sawah, Palawija, dan Hortikultura Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 (kw/ha)**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Padi Sawah	74,08	74,37	75,61	75,49	79,48
2.	Kedelai	16,32	13,30	16,60	14,36	12,96
3.	Kacang Hijau	11,28	10,80	11,05	11,42	16,22
4.	Jagung pipilan kering	56,61	58,98	59,00	58,00	58,68
5.	Ketela Pohon	195	195	195	195	145,04
6.	Ubi Jalar	160	160	150	156	78,67

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Pada tahun 2015 produksi padi secara keseluruhan meningkat sebesar 9.287 ton GKP atau 0,62 % dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi dan produktivitas komoditas padi disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.85**  
**Data Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2011-2015**

No	Jenis Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
1.	<b><i>Padi Sawah</i></b>					
	Luas Panen (ha)	197.004	193.458	195.929	195.285	190.725
	Produksi (Ton GKP)	1.459.406	1.438.775	1.481.466	1.485.298	1.524.842,55
	Produktivitas (Kw/Ha)	74,08	74,37	75,61	76,05	79,9
2.	<b><i>Padi Ladang</i></b>					
	Luas Panen (ha)	2.908	2.427	3.338	3.234	1901
	Produksi (Ton GKP)	11.316	7.357	11.400	13.204	6.261,95
	Produktivitas (Kw/Ha)	39,94	39,01	34,15	40,,83	32,9
	<b><i>Jumlah Produksi (ton GKP)</i></b>	1.470.722	1.446.132	1.492.866	1.498.502	1.531.104,5

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Kondisi perkembangan produksi palawija selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.86**  
**Data Produksi Palawija (Ton) Tahun 2011-2015**

No.	Jenis Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jagung tua	3.021	2.323	1.905	116	2.611,25
	Jagung muda	7.662	5.489	4.494	3.214	0
2.	Kedelai tua	595	73	1.046	326	2.322,98
	Kedelai muda	3.827	803	360	350	0
3.	Kacang tanah	380	517	424	600	475,14
4.	Kacang hijau	1.800	1.800	1.097	890	183,31
5.	Ubi kayu	4.505	6.100	3.366	6.826	2.364,17
6.	Ubi jalar	337	161	278	329	47,2
	Jumlah produksi	22.127	17.265	12.970	12.651	8.004,05
	Produktivitas	49,34	64,86	48,59	51,13	27,11

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Komoditi sayuran utama yang menjadi unggulan Kabupaten Karawang adalah jamur merang. Kebutuhan jamur merang diperkirakan terus akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Selain itu dari sisi geografis Kabupaten Karawang mempunyai potensi



pengembangan yang bagus serta ditunjang dengan peluang pemasaran yang besar.

**Tabel 3.87**  
**Data Jumlah Kubung, Produksi dan**  
**Produktivitas Jamur Merang**

No.	Komoditas	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jamur Merang					
	Jumlah kubung (unit)	2.560	2.610	2.349	2.030	1.723
	Produksi (ton)	5.362	5.872	5.403	4.672	4.131
	Produktivitas (Kw/Kbg/panen)	2,20	2,25	2,30	2,30	2,40

\*) Data semester I 2015

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

## 2) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

**Tabel 3.88**  
**Peningkatan Kesejahteraan Petani**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pendapatan Petani	14.349.700	15.227.700	17.817.130	18.532.000	27.275.000

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Keterangan : Asumsi Pendapatan petani padi sawah/ha/musim

Pendapatan petani pada tahun 2014 berdasarkan asumsi pendapatan petani padi sawah/ha/musim sebesar Rp. 18.532.000,- sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp. 27.275.000,- meningkat sebesar 47.8%, seiring dengan keberhasilan program *Show Window* Pertanian di Kabupaten Karawang, dan kenaikan harga gabah kering panen di pasaran.

## 3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Produksi daging berkurang dari tahun lalu karena populasi ternak potong terutama sapi potong mengalami penurunan populasi akibat jumlah kelahiran tidak sebanding dengan jumlah



pemotongan dan pembatasan jumlah impor sapi potong. Untuk daging dari ternak unggas juga mengalami penurunan populasi

ternak unggas karena banyaknya serangan penyakit pada ternak unggas, harga pakan yang tinggi dan harga bakalan ternak yang mahal.

Produksi hasil peternakan berupa daging tahun 2014 rata-rata 9.116,25Ton turunmenjadi 8.988,00Ton pada tahun 2015. Produksi telur tahun 2014 rata-rata sebesar 4.023 Ton turun menjadi 3.974,4Ton pada tahun 2015.

**Tabel 3.89**  
**Perkembangan Produksi Hasil Peternakan (ton)**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Tahun	Daging	Telur
1	2011	10.250,00	4.500,00
2	2012	10.361,50	4.625,00
3	2013	9.325,35	4.163,00
4	2014	9.116,25	4.023,00
5	2015	8.988,00	3.974,40

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

**Tabel 3.90**  
**Jumlah Konsumsi per Kapita Tahun 2011-2015 (kg/kap/th)**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Daging	10,00	10,10	9,09	9,00	8,69
2.	Telur	9,00	9,25	9,00	9,00	8,75
3.	Susu	0,28	0,29	0,25	0,20	0,19

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

**Tabel 3.91**  
**Jumlah Produksi dan Populasi Peternakan**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Jumlah Produksi (ton)					
1.	Daging	10.250,00	10.361,50	9.325,35	9.116,25	8.988,00
2.	Telur	4.500,00	4.625,00	4.163,00	4.023,00	3.974,40
3.	Susu	53,00	54,00	50,00	40,00	34,16
B.	Jumlah Populasi (ekor)					
1.	Ternak besar	13.688	13.171	11.092	10.702	10.721
2.	Ternak kecil	2.491.784	3.244.866	3.762.101	3.756.102	3.599.460
3.	Unggas	15.469.102	14.700.298	14.410.439	14.109.338	12.747.147

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

#### 4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

**Tabel 3.92**  
**Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pendapatan Peternak	17.000.000	18.500.000	19.500.000	20.500.000	19.000.000

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Penurunan jumlah produksi peternakan baik berupa daging, telur maupun susu ternyata berdampak pada penurunan pendapatan peternak. Pendapatan peternak tahun 2015 bila dibandingkan dengan tahun 2014



justru mengalami penurunan sebesar 9,5 %. Hal ini dapat terjadi akibat penurunan populasi ternak di Kabupaten Karawang.

#### 5) Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak

**Tabel 3.93**  
**Pencegahan, Penanggulangan Penyakit Ternak**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*)
I.	Peningkatan Pengendalian Penyakit Hewan Menular					
	e. Vaksin anthrax (dosis)	10.026 /15.937 ekor	5.000/5 .036 ekor	10.000/1 7.688 ekor	10.500 dosis/domba: 13.282 ekor /sapi: 8.358 ekor	10.000 dosis Sapi: 3.423 Domba: 11.429
	f. Vaksin Rabies (dosis)	415	555	700/708 ekor	800 dosis/ekor	860 dosis
	g. Desinfektan (liter)	300	68	391	700	750
	h. Vaksin flu burung (dosis)	-	10.000/20.400 ekor	10.000/6 .500 ekor	10.000 dosis/ekor	10.000 dosis

Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang

Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak pada tahun 2015 terlihat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014, baik dari jumlah dosis vaksin/obat maupun dari jumlah ternak yang ditangani, kecuali untuk penanganan flu burung yang mengalami penurunan jumlah ternak yang ditangani.

Jumlah Sarana Peternakan yang terdapat di Kabupaten Karawang tidak pernah mengalami perubahan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, sebagaimana terlihat pada tabel 3.84 di bawah.

**Tabel 3.94**  
**Jumlah Sarana Peternakan Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2011-2015 (Unit)**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	TPHT	14	-	-	-	-
2.	RPH	3	3	3	3	3
3.	TPH	14	14	14	14	14
4.	Klinik hewan	1	1	1	1	1

*Sumber : Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kab. Karawang*

Analisis untuk indikator kinerja strategis bidang pertanian, belum optimalnya produksi pertanian terjadi karena adanya dampak kekeringan di Kab. Karawang, ini terlihat dari capaian produksi dari 1.498.502 ton (2014) menjadi 1.531.104,5 ton (2015). Dampak kekeringan menyebabkan 1.782 ha mengalami puso, sedangkan dari sisi produktivitas mengalami kenaikan dari 76,05 kw/ha GKP (2014) menjadi 79,56/ha GKP (2015).

Target untuk sektor palawija belum mencapai target, dikarenakan terjadi dampak kekeringan dan mundurnya musim panen, selain itu palawija dilaksanakan hanya untuk memanfaatkan jeda tanaman padi. Produksi palawija (2014) adalah 12.651 ton sedangkan tahun 2015 jauh menurun menjadi 8.004,04 ton.

Untuk sektor hortikultura, terjadi kenaikan untuk komoditas sayuran yaitu 36,72%, sedangkan jamur merang hanya 1,36%. Peningkatan produksi disebabkan oleh peningkatan pengetahuan petani

tentang teknis budidaya tanaman hortikultura, luas tanam yang bertambah, dan iklim yang mendukung.

Penurunan produksi daging terjadi akibat menurunnya populasi ternak penghasil daging, tahun 2014 populasi ternak mencapai 3.766.804 ekor, sedangkan tahun 2015 mencapai 3.610.181 ekor. Penurunan produksi juga menurun pada komoditas telur dikarenakan menurunnya populasi unggas dari 14.109.388 ekor (2014) menjadi 12.747.147 ekor (2015).

Untuk pendapatan petani pada tahun 2015 mencapai kenaikan 47,18 % dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan tahun 2014 sebesar Rp.18.532.000,- meningkat menjadi 27.275.000,- per ha/musim. Kenaikan pendapatan juga dikarenakan adanya kenaikan harga gabah kering mencapai Rp.4.500,-/kg

## b. Perikanan

### 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya dengan realisasi pada tahun 2015 adalah



terwujudnya peningkatan produksi tambak menjadi 39.113,65. ton, kolam 2.806,09 ton, mina padi 293,79 ton, dan KJA 269,62 ton

**Tabel 3.95**  
**Potensi Perikanan Budidaya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas potensi tambak (Ha)	18.273,30	18.273,30	18.273,30	18.273,30	18.725,00
	Luas tambak yang telah dimanfaatkan (Ha)	15.567,40	15.567,40	15.567,40	15.571,00	15.828,8
2.	Luas potensi kolam (Ha)	1.279,40	1.279,40	1.279,40	1.188,2	1.088,80
	Luas kolam yang telah	980,00	980,00	980,00	638,00	678,44

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
	dimanfaatkan (Ha)					
3.	Luas potensi mina padi (Ha)	10.580,8	10.580,8	10.580,8	10.580,8	9.241,32
	Luas mina padi yang telah dimanfaatkan (Ha)	236,7	141,0	179,1	182,0	177,2
4.	Jumlah potensi Kolam Jaring Apung (KJA) (unit)	168	168	168	148	293
	Jumlah KJA yang telah dimanfaatkan (unit)	79	79	79	83	184

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Dari tabel di atas terlihat adanya kenaikan luas potensi tambak pada tahun 2015 sebesar 2,47 % dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan munculnya tanah-tanah baru (tanah timbul) di beberapa lokasi pesisir pantai. Dari segi pemanfaatan terdapat peningkatan luas tambak sebesar 1,66% yang disebabkan di bukanya beberapa lahan tambak baru di daerah Pedes. Luas potensi kolam mengalami penurunan sebesar 8,37% dibandingkan tahun sebelumnya karena banyaknya lahan yg beralih fungsi terutama menjadi perumahan-perumahan. Potensi mina padi juga mengalami penurunan sebesar 12,66% dari tahun sebelumnya yang disebabkan berkurangnya lahan sawah yg bisa dijadikan sebagai lahan minapadi. Sementara potensi KJA mengalami peningkatan sebesar 97,97% yang disebabkan banyaknya investor yg membuat KJA. Pemanfaatan kolam mengalami peningkatan sebesar 6,34% dibanding tahun 2014 namun mengalami penurunan sebesar 30,77% dibanding tahun 2013, hal disebabkan pola tanam para pembudidaya ikan di kolam mengikuti trend permintaan dari masyarakat.

Pemanfaatan potensi mina padi mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya, hal ini disebabkan masih besarnya ketergantungan para pembudidaya ikan minapadi terhadap program yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah. Sementara pemanfaatan KJA mengalami peningkatan yang besar yaitu 121,69% dibanding tahun 2014 yang disebabkan banyaknya pengusaha yang menanamkan investasi di bidang perikanan khususnya KJA.

**Tabel 3.96**  
**Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tambak	35.267,54	35.285,15	36.648,48	37.839,70	39.113,65
2.	KAT	2.492,99	2.517,00	2.605,89	2.692,04	2.806,09
3.	Mina Padi	409,80	364,17	360,87	273,64	293,79
4.	KJA	225,74	206,26	237,44	351,62	269,62
	<b>JUMLAH</b>	<b>38.396,07</b>	<b>38.372,58</b>	<b>39.852,68</b>	<b>41.157,00</b>	<b>42.483,15</b>

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Berdasarkan tabel 3.86 terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun untuk produksi tambak dan kolam. Peningkatan tersebut terjadi karena tingginya permintaan pasar. Hal ini didorong juga dengan program kegiatan pemerintah yang gencar dilaksanakan baik yang bersumber dari dana APBD Kab, DAK maupun APBN/TP. Untuk mina padi tahun 2015 meningkat dibanding tahun 2014 namun kecenderungan adanya penurunan mulai tahun 2011, hal ini disebabkan berkurangnya lahan minapadi yang disebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. KJA mengalami penurunan produksi dibanding tahun 2014 padahal dalam pemanfaatan potensi mengalami peningkatan yang sangat besar, hal ini disebabkan berubahnya trend permintaan masyarakat baik ukuran maupun jenis ikan.

## 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2015 dengan realisasi terwujudnya peningkatan produksi perikanan tangkap di laut menjadi 8.499,87 ton, perikanan tangkap di perairan umum menjadi 92,12 ton

**Tabel 3.97**  
**Potensi Perikanan Tangkap Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Potensi panjang pantai (km)	84,23	84,23	84,23	84,23	84,23
	Panjang pantai yang telah dimanfaatkan (km)	84,23	84,23	84,23		
2.	Potensi panjang sungai (km)	744	744	744	744	744
	Panjang sungai yang telah dimanfaatkan (km)	577	577	577		
3.	Potensi rawa (Ha)	20,00	20,00	20,00	72,10	72,10
	Rawa yang telah dimanfaatkan (Ha)	5,00	5,00	5,00		
4.	Potensi bekas galian C (Ha)	282,30	282,30	282,30	282,3	282,3



	Bekas galian C yang telah dimanfaatkan (Ha)	132,00	132,00	132,00		
--	---	--------	--------	--------	--	--

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Berdasarkan tabel 3.87 potensi perikanan tangkap yang mengalami perubahan adalah potensi rawa. Mulai tahun 2014 potensi rawa meningkat sebesar 260,5%, hal ini berdasarkan hasil pendataan kembali potensi rawa yang ada di Kabupaten Karawang sedangkan data sebelumnya menggunakan data tahun 2008.

**Tabel 3.98**  
**Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perikanan Tangkap Laut	7.756,88	8.330,08	8.551,08	8.580,93	8.499,87
2.	Perikanan Tangkap Perairan Umum	167,56	206,78	200,91	185,62	92,12
	a. Sungai	56,25	67,23	64,83	64,06	29,61
	b. Rawa	35,12	43,79	41,33	28,32	7,96
	c. Bekasi Galian C	76,19	95,76	94,75	93,24	54,55
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.924,44</b>	<b>8.536,86</b>	<b>8.751,99</b>	<b>8.766,55</b>	<b>8.591,99</b>

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Berdasarkan tabel 3.88 produksi perikanan tangkap laut cenderung stabil. Namun untuk perikanan tangkap perairan umum mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini disebabkan pencemaran yang terjadi pada perairan umum baik yang berasal dari limbah keluarga maupun limbah pabrik, selain itu program restocking di perairan umum jarang dilakukan mengingat keterbatasan anggaran.

**Tabel 3.99**  
**Jumlah Produksi dan dan Populasi Perikanan Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Jumlah Produksi (ton)					
1.	Ikan	46.320,51	47.121,21	48.604,67	49.923,55	51.075,14

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

### 3) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi hasil perikanan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan. Jumlah pendapatan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan di Kabupaten Karawang pada tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.100**  
**Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan dan Nelayan di**  
**Kabupaten Karawang Tahun 2011-2014 (Rp/thn)**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pembudidaya Ikan	13.350.000	13.430.000	13.927.000	14.456.000	15.122.300
2.	Nelayan	21.400.000	21.722.000	22.252.000	22.318.000	23.144.200
3.	Pengolah hasil perikanan	16.686.000	17.702.000	17.833.000	18.368.000	18.919,040
4.	Petani Garam	6.280.000	7.873.500	7.921.000	8.091.000	8.544.300

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Pendapatan pembudidaya ikan dan nelayan terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembudidaya ikan meningkat sebesar 13,28% mulai tahun 2011 sampai tahun 2015. Pendapatan nelayan meningkat sebesar 8,15% pada periode yang sama. Pendapatan pengolah hasil perikanan meningkat sebesar 13,38% dan untuk petani garam meningkat sebesar 5,60% dari tahun sebelumnya

#### 4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan

**Tabel 3.101**  
**Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan ke luar Karawang	12.310 ton	12.700 ton	13.245,90 ton	13.643,27 ton	14.052,57 ton	Bogor, Jakarta, Bekasi, Depok
2.	Jumlah hasil perikanan yang	18.724 ton	19.303 ton	19.867,90 ton	20.463,93 ton	26.126,85 ton	Bandung, Subang, Purwakarta, Bogor,

	dipasarkan di Karawang						Jakarta, Bekasi, Depok
3.	Jumlah usaha kecil ( <i>home industry</i> ) perikanan	2.631 orang	2.763 orang	2.763 orang	2.845 orang	2.930 orang	
4.	Jumlah kelompok hasil olahan perikanan	126 kelompok	130 kelompok	130 kelompok	134 kelompok	138 kelompok	

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan mengalami peningkatan mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 untuk semua indikator. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan dibanding tahun 2011 sebesar :

- Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan ke luar Karawang sebesar 14,16%;
- Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan di Karawang sebesar 12,57%;
- Jumlah usaha kecil (*home industry*) perikanan sebesar 11,36%; dan
- Jumlah kelompok hasil olahan perikanan sebesar 9,52%.

#### 5) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

**Tabel 3.102**  
**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pembinaan Pokmaswas	2 kali	6 kali	10 kali	10 kali	10 kali
2.	Jumlah Pembinaan TPI	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	12 kali
3.	Jumlah	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit



	Kapal Pengawasan					
4.	Jumlah Perahu POKMASWAS	4 unit	6 unit	8 unit	8 unit	8 unit
5.	PAD sektor perikanan (Rp)	18.784.790,00	36.250.248,00	256.235.845	299.634.727	255.329.844

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Analisis terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan untuk setiap indikator adalah sebagai berikut :

- Jumlah pembinaan pokmaswas tahun 2015 meningkat sebesar 400% dibanding tahun 2011;
- Jumlah pembinaan TPI meningkat sebesar 200%;
- Jumlah kapal pengawasan tetap;
- Jumlah perahu pengawasan meningkat 100%; dan
- PAD sektor perikanan meningkat sebesar 1.259,24%, hal ini disebabkan adanya penyerahan penyelenggaraan retribusi TPI dari Provinsi ke Kabupaten berdasarkan PP No. 38 Th. 2008. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kab. Karawang mengeluarkan Perda No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perbup no 106 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan TPI dan Pemungutan TPI. Sejak itu Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap para pengurus TPI.

## 6) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

**Tabel 3.103**  
**Produk Unggulan Perikanan Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah desa yang memiliki	Desa Cicinde	Desa Cicinde	Desa Cicinde	Desa Cicinde	Desa Cicinde

	produk unggulan perikanan	Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)	Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)	Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)	Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)	Utara (Banyusari) dan Desa Bayurkidul (Cilamaya Kulon)
2.	Produk unggulan perikanan					
	a. ikan asin	3.323 ton	3.429 ton	3.571,20 ton	3.953,56 ton	4.072,17 ton
	b. pindang	26.390 ton	27.200 ton	28.119,00 ton	28.356,00 ton	29.206,68 ton
	c. terasi	254 ton	271 ton	282,96 ton	285,36 ton	293,92 ton
	d. Mini Plan (Rajungan)	-	374 ton	392,70 ton	783,00 ton	807,00 ton
	e. Kerupuk	1.068 ton	1.104 ton	1.140,00 ton	1.178,00 ton	1.213,34 ton

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap produk unggulan perikanan. Namun untuk jumlah desa yang memiliki produk unggulan perikanan tidak mengalami penambahan dari tahun 2011.

**Tabel 3.104**  
**Jumlah Sarana Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2011-2014 (Unit)**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	TPHT	14	15	15	15
2.	BBI	1	2	2	2
3.	TPI	11	12	12	12
4.	PPP	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

Jumlah sarana perikanan dan kelautan Kabupaten Karawang hampir selalu tetap, kecuali tahun 2012 yang mengalami peningkatan sebanyak 1 unit untuk TPHT, BBI dan TPI.

Sesuai dengan potensi yang tersedia, yakni panjang garis pantai lebih kurang 84,23 Km dan banyaknya muara dan anak sungai yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan (nelayan), setiap tahunnya armada nelayan yang melakukan sandar dan pelelangan di Kabupaten Karawang selalu meningkat menjadi 258.608 unit pada Tahun 2015.

**Tabel 3.105**  
**Pengembangan Sistem Penyuluhan**  
**Tahun 2011-2014**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014
1.	Tenaga teknis profesional perikanan	17	17	17	
2.	Tenaga teknis profesional kelautan	1	1	1	

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan dan BP4K Kab. Karawang

## **7) Program Peningkatan Sistem Informasi Perikanan, Kelautan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan tersedianya sarana evaluasi dan layanan informasi bidang perikanan dan kelautan dengan sasaran tersedianya data potensi dan produksi bidang perikanan dan kelautan, dan laporan evaluasi kegiatan bidang perikanan dan kelautan selama satu tahun.

**Tabel 3.106**  
**Potensi dan Kondisi Terumbu Karang Tahun 2015**

Kecamatan	Luas (Ha)	Kondisi		
		Rusak	Sedang	Baik
Tempuran	247,27	136,17	105,10	6,00
Cilamaya Kulon	1.229,80	677,70	522,80	29,30
Cilamaya Wetan	614,40	338,60	261,10	14,70
<b>JUMLAH</b>	<b>2.091,47</b>	<b>1.152,47</b>	<b>889,00</b>	<b>50,00</b>

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

**Tabel 3.107**  
**Potensi dan Kondisi Magrove (Hutan Bakau) Tahun 2015**

Kecamatan	Luas (Ha)	Kondisi		
		Rusak	Sedang	Baik
Tujaya	1.463,80	428,25	991,41	44,14
Cibuaya	1.583,47	1.278,74	295,40	9,33
Cilamaya Kulon	350,45	-	92,00	258,45
Cilamaya Wetan	793,38	-	684,00	109,38
Cilebar	326,50	-	226,00	100,50
Pakisjaya	1.035,98	536,63	384,72	114,63
Pedes	520,00	-	520,00	-
Tempuran	517,42	-	512,00	5,42
Tirtajaya	3.414,93	3.156,69	243,43	14,81
<b>JUMLAH</b>	<b>10.005,93</b>	<b>5.400,31</b>	<b>3.949,96</b>	<b>656,66</b>

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Karawang

### **8) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada beberapa indikator hasilnya perkembangan IKM berada pada posisi stabil secara keseluruhan 5 (lima) tahun berjalan, yaitu indikator persentase tingkat pelayanan usaha IKM, persentase komoditi unggulan IKM dengan total komoditi IKM dan fasilitasi pembuatan desain kemasan produk industri kecil agro. Jumlah penyerapan tenaga kerja IKM pada tahun 2015 sebanyak 9.627 terjadi peningkatan sebesar 1 % dibandingkan tahun 2014 (9.528).

**Tabel 3.108**  
**Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah	8.600	8.663	9.528	9.528	9.624
2.	Persentase tingkat pelayanan usaha IKM	80 %	90 %	90%	90%	90 %
3.	Persentase komoditi unggulan IKM dengan total komoditi IKM	10 %	10 %	10%	10%	10 %
4.	Persentase IKM yang bermitra dengan industri besar/BUMN	-	-	-		
5.	Peningkatan kualitas produk IKM knalpot dan produk logam lainnya (IKM Pandai besi)	15	15	-	20	20
6.	Penerapan dan partisipasi konveksi Gugus Kendali Mutu (GKM)	25	25	20	20	-
7.	Fasilitasi Pembuatan desain kemasan produk industri kecil agro (peserta)	25	25	25	25	25

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Karawang

## 8. Mendorong peningkatan investasi

Indikator Kinerja Strategis : Prosentase peningkatan investasi PMDN

Sektor penanaman modal memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Selain itu peranannya juga diarahkan untuk dapat menjawab tantangan persoalan-persoalan yang



mendasar seperti pengembangan sektor-sektor strategis dan komoditas unggulan, reindustrialisasi, pemerataan pembangunan serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah menetapkan 3 program yang berhubungan dengan penanaman modal, yaitu:

## 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

**Tabel 3.109**  
**Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**  
**Tahun 2011 – 2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Pameran Dalam Negeri yang Diikuti	-	-	5 kali	5 kali	<b>6 kali</b>
2.	Jumlah Promosi melalui Media Elektronik dan Media Luar Ruang	-	-	20 kecamatan, 10 lokasi strategis	20 kecamatan, 10 lokasi strategis	<b>20 kecamatan, 10 lokasi strategis, 6 perusahaan</b>
3.	Pengadaan Leaflet Perizinan	-	-	-	7 jenis	<b>8 jenis</b>
4.	<b>Pembuatan Peta Potensi dan Profil Investasi</b>	-	-	-	-	<b>1 jenis</b>

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

Untuk menarik minat para investor agar melakukan penanaman modal, dari kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2015 telah diikuti beberapa pameran dalam negeri. Selain itu mulai tahun 2013 dilakukan pula promosi penanaman modal melalui media elektronik dan media luar ruang yakni dengan pemasangan baligho tentang perijinan, selang pandang BPMPPT di kecamatan-kecamatan, lokasi-lokasi strategis serta perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Karawang. Sebagai upaya promosi untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Karawang, dilakukan pula pengadaan leaflet perizinan serta pembuatan peta potensi dan profil investasi untuk memudahkan para investor dalam mencari informasi baik berupa persyaratan, biaya, maupun potensi investasi yang terdapat di Kabupaten Karawang.



## 2) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan

Pertumbuhan industri yang terus meningkat membuat Kabupaten Karawang harus terus melakukan perbaikan serta inovasi guna meningkatkan pelayanan perijinan terhadap para investor. Jaminan kepastian agar industri yang ada tidak terombang-ambing kebijakan pemerintah serta birokrasi yang mempermudah perizinan bagi dunia usaha menjadi unsur yang tidak dapat diabaikan untuk peningkatan iklim investasi.

Ketepatan waktu, kepastian dan ketepatan biaya dalam pelayanan perizinan di Kabupaten Karawang yang mencapai lebih dari 90% menunjukkan profesionalitas dalam pemberian layanan terhadap para penanam modal. Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang dibina hingga 147% dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir mengindikasikan adanya peningkatan minat pelaku usaha untuk melakukan penanaman modal di Kabupaten Karawang.

**Tabel 3.110**  
**Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah peraturan/ketentuan mengenai investasi yang berdaya saing (ijin)	-	7	3	3	<b>6</b>
2.	Jumlah pelaku usaha yang dibina (unit usaha)	-	15	15	37	<b>37</b>
3.	Persentase ketepatan waktu pelayanan perijinan (hari)	-	95%	95%	95%	<b>95%</b>
4.	<b>Persentase kepastian dan ketepatan biaya pelayanan perijinan (%)</b>	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang salah satunya berasal dari hasil retribusi daerah, dimana retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus dan retribusi perijinan. Adanya penurunan 1,63% jumlah perijinan yang dikeluarkan di Kabupaten Karawang dari 12.729 perijinan pada tahun 2014 menjadi 12.522 perijinan pada tahun 2015 berpengaruh pula terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang dari hasil retribusi daerah sebanyak 16%, dimana PAD retribusi daerah Kabupaten

Karawang tahun 2014 sebesar Rp. 129.306.846.320 menjadi Rp. 109.112.693.000 pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena adanya kelesuan ekonomi dan juga pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap nilai tukar dollar.

**Tabel 3.111**  
**Jumlah Perizinan di Kab. Karawang**  
**Tahun 2015**

<b>No.</b>	<b>Perijinan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	<b>3.714</b>
<b>2.</b>	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>3.034</b>
<b>3.</b>	Tandan Daftar Gudang (TDG)	<b>74</b>
<b>4.</b>	Tanda Daftar Industri (TDI)	<b>14</b>
<b>5.</b>	IPALASA	<b>26</b>
<b>6.</b>	Surat Izin Tanda Pendaftaran Usaha Wiralaba (STPUW)	<b>2</b>
<b>7.</b>	Izin Trayek (IT)	<b>1.073</b>
<b>8.</b>	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	<b>176</b>
<b>9.</b>	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (IOPPJ)	-
<b>10.</b>	Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata (IUODTW)	-
<b>11.</b>	Izin Lokasi (IL)	<b>111</b>
<b>12.</b>	Izin Reklame (IR)	<b>1.012</b>
<b>13.</b>	Pengesahan Rencana Tapak (PRT)	-
<b>14.</b>	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	<b>1.172</b>
<b>15.</b>	Izin Gangguan (HO)	<b>525</b>
<b>16.</b>	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (IPS LB3)	<b>84</b>
<b>17.</b>	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	-
<b>18.</b>	Rekomendasi Kios Sarana Produksi Pertanian (RKSP)	-
<b>19.</b>	Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta (IOPSS)	<b>1</b>
<b>20.</b>	Izin Penyelenggaraan Apotek (IPA)	<b>56</b>
<b>21.</b>	Izin Penyelenggaraan Optik (IPO)	<b>3</b>
<b>22.</b>	Izin Penyelenggaraan Toko Obat (IPTO)	<b>17</b>
<b>23.</b>	Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional/Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (STPT/IPPTr)	<b>9</b>
<b>24.</b>	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/Kamar Kecil (IPKM/KK)	<b>11</b>
<b>25.</b>	Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan (IP UPK)	-
<b>26.</b>	Izin Usaha Industri (IUI)	<b>5</b>
<b>27.</b>	Izin Usaha Perikanan (IUP)	<b>86</b>
<b>28.</b>	Surat Pembudidayaan Ikan (SPbI)	-
<b>29.</b>	Izin Sarana dan Jasa Pariwisata (ISJP)	<b>31</b>
<b>30.</b>	Izin Penggunaan Air Bawah Tanah (IPA-ABT)	<b>10</b>



<b>No.</b>	<b>Perijinan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>31.</b>	Izin Pemakaian Tanah Bagian Daerah Milik Jalan (IPT DMJ)	<b>17</b>
<b>32.</b>	Surat Izin Kerja Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian (SIKTTK)	<b>59</b>
<b>33.</b>	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (IPLPK)	<b>18</b>
<b>34.</b>	Izin Pendirian Lembaga Bursa kerja Khusus (IPLBK)	<b>28</b>
<b>35.</b>	Surat Izin Pengeboran (SIP)	-
<b>36.</b>	Rekomendasi Kelayakan Investasi (RKI)	-
<b>37.</b>	Izin Prinsip Perluasan Modal (IPPM)	<b>169</b>
<b>38.</b>	Surat Izin Menempati Bangunan Pasar (Sim B)	<b>68</b>
<b>39.</b>	Rencana Penataan Lahan (RPL)	-
<b>40.</b>	Izin Usaha Pertambangan (IUPt)	<b>1</b>
<b>41.</b>	Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja Luar Negeri (IPL BKLN)	<b>7</b>
<b>42.</b>	Izin Usaha untuk Tenaga Kelistrikan (UK)	-
<b>43.</b>	Izin Latihan Kerja (ILK)	<b>170</b>
<b>44.</b>	Izin Akomodasi/Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI)	<b>1</b>
<b>45.</b>	Surat Izin Klinik Kecantikan (SIKK)	<b>16</b>
<b>46.</b>	Izin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (STPT/IPPTr)	<b>9</b>
<b>47.</b>	Izin Penyelenggaraan Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan (IUPKL)	<b>27</b>
<b>48.</b>	Izin Usaha Perikanan (IUPPHP)	<b>86</b>
<b>49.</b>	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIK.Ro.)	<b>12</b>
<b>50.</b>	Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	<b>43</b>
<b>51.</b>	Izin Ops. Lembaga Bursa Kerja Luar Negeri (IOLPTKS)	<b>10</b>
<b>52.</b>	Surat Izin Praktek Bidan (SIP.B)	<b>218</b>
<b>53.</b>	Surat Izin Praktek Dokter (SIP.Dr)	<b>455</b>
<b>54.</b>	Surat Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	<b>98</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.672</b>

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

### 3) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Angka 1 bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam



modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Investasi (Penanaman Modal) merupakan pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, dipercaya menjadi salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, banyak daerah yang berlomba-lomba membuka daerahnya dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan untuk mempermudah iklim investasi di daerahnya bagi investor yang akan masuk.

Terdapat beragam pendekatan untuk mendefinisikan investasi. Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mengetahui aliran modal (kapital) baik dari dalam negeri dan luar negeri. Oleh karena itu, secara umum investasi dengan fasilitas di Indonesia dapat di bedakan menjadi dua hal bergantung pada asal investornya yaitu investasi dalam negeri (penanaman modal dalam negeri/PMDN) dan investasi asing (penanaman modal asing/PMA).

Investasi dalam negeri (penanaman modal dalam negeri/PMDN) dapat dilakukan oleh perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia (dapat berbentuk Perseroan Terbatas / PT), Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Investasi asing (penanaman modal asing/PMA) dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Beberapa kelebihan penanaman modal asing diantaranya bersifat jangka

panjang, memberikan terobosan dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, dan membuka lapangan kerja baru.

Realisasi investasi di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 mencapai Rp. 25,454 Trilyun, menurun Rp. 0,268 Trilyun dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2013 terjadi peningkatan realisasi investasi yang signifikan sebesar 187% dikarenakan adanya rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Karawang, sehingga menjadi daya tarik bagi para investor untuk melakukan penanaman modal.

Dari realisasi investasi tersebut, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 38,98% dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,143 Trilyun. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menurun 11,93% dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp. 2,412 Trilyun. Hal ini terjadi karena mulai adanya issue ketidakpastian rencana pembangunan pelabuhan di wilayah Cilamaya.

Adapun dari sisi tenaga kerja, realisasi investasi sepanjang tahun 2015 menyerap tenaga kerja sebanyak 34.008 orang, turun 52,04% dibandingkan tahun 2014 yang menyerap tenaga kerja sebanyak 70.906 orang.

**Tabel 3.112**  
**Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah kebijakan di bidang investasi	-	7	3	3	<b>6</b>
2.	Total Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Trilyun)	-	14,253	40,925	25,722	<b>25,454</b>
3.	Jumlah LKPM PMA dan PMDN	-	137	2.196	2.872	<b>2.802</b>
4.	Total Realisasi Investasi PMA (Rp Trilyun)	-	8,408	36,272	20,226	<b>17,814</b>
5.	Jumlah LKPM PMA	-	119	275	440	<b>805</b>
6.	Total Realisasi Investasi PMDN (Rp Trilyun)	-	5,845	4,652	5,497	<b>7,640</b>
7.	Jumlah LKPM PMDN	-	18	1.921	2.432	<b>1.997</b>
8.	Total Penyerapan Tenaga Kerja PMA dan	-	68.570	61.430	70.906	<b>34.008</b>

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
	PMDN (orang)					
	a. Tenaga Kerja Indonesia (orang)	-	68.459	61.027	70.714	-
	b. Tenaga kerja Asing (orang)	-	111	403	192	-
<b>9.</b>	<b>Total Penyerapan Tenaga Kerja PMA (orang)</b>	-	<b>49.413</b>	<b>54.854</b>	<b>64.999</b>	<b>29.412</b>
	a. Tenaga Kerja Indonesia (orang)	-	49.316	54.464	64.807	-
	b. Tenaga Kerja Asing (orang)	-	97	390	192	-
<b>10.</b>	<b>Total Penyerapan Tenaga Kerja PMDN (orang)</b>	-	<b>19.157</b>	<b>6.596</b>	<b>5.911</b>	<b>4.596</b>
	a. Tenaga Kerja Indonesia (orang)	-	19.143	6.583	5.911	-
	<b>b. Tenaga Kerja Asing (orang)</b>	-	<b>14</b>	<b>13</b>	-	-

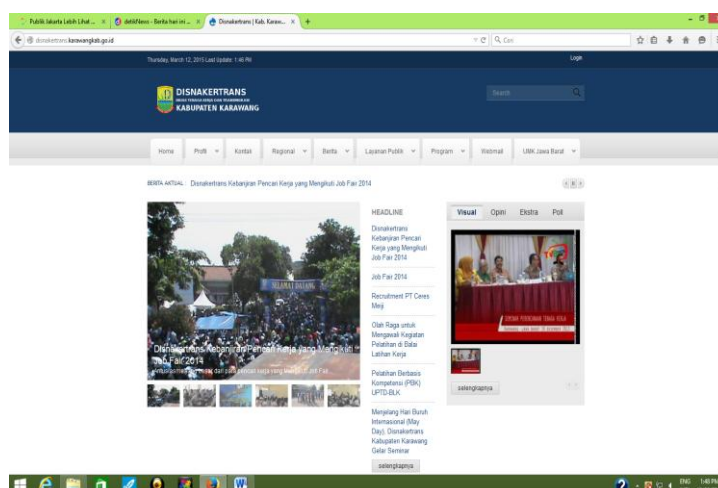
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

## 9. Perluasan kesempatan kerja dan menurunkan angka pengangguran.

Indikator kinerja Strategis : Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri, prosentase penurunan angka pengangguran, Prosentase penyelesaian kasus PHI.

### 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2014), angka pengangguran terbuka di Kabupaten



Karawang sebanyak 114.004 orang atau 10,15 persen dan jumlah penduduk usia kerja 1.651.979. Umlah pencari kerja pertahunnya yang terdaftar pada Disnakertrans Kabupaten Karawang bervariasi tiap

tahunnya, tren menurun mulai dari tahun 2012 akan tetapi meningkat terus sampai tahun 2015.

Penyumbang terbesar tetap pada tingkat pendidikan SLTA, walaupun dalam kurun waktu 5 tahun terjadi penurunan jumlah pencari kerja, akan tetapi tingkat pendidikan SD, SLTP dan D1/D2 mengalami kenaikan



yang cukup signifikan karena mulai banyaknya sektor nonformal yang membutuhkan tenaga kerja tanpa melihat tingkat pendidikan yang tinggi, seperti pelayan restoran/rumah makan, penjaga toko dan tempat wisata

**Tabel 3.113**  
**Pencari Kerja yang Terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2015**

No.	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	TTSD	5	10	3	14	22
2.	SD	2.883	3.159	1.496	1.980	6.871
3.	SLTP	17.346	4.695	3.727	4.189	10.724
4.	SLTA	50.017	15.077	14.588	13.741	12.492
5.	D1/D2	618	65	11	78	104
6.	D3	1.228	2.371	484	662	1.321
7.	S1	1.346	3.076	919	4.482	476
	JUMLAH	73.443	28.453	21.228	25.146	31.988

*Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang*

Dengan peningkatan jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Disnakertrans Kabupaten Karawang yang belum mempunyai keahlian serta rendahnya keterampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja dapat mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Pelatihan kerja bisa merupakan solusi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi kerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing tenaga kerja. Peningkatan keterampilan tersebut dapat

terwujud melalui lembaga latihan pemerintah, dalam hal ini UPTD-BLK ataupun melalui lembaga latihan swasta.

**Tabel 3.114****Pelatihan Kerja dan Peningkatan Keterampilan yang Dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat	512 org	1.552 org	1.760 org	1.463 org	1.299 org
2.	Uji Kompetensi	40 org	-	-	32 org	-
3.	Peningkatan Lembaga Latihan Swasta	2 LLS/40 org	2 LLS/48 org	5 LLS/ 120 orang		-
4.	Pemagangan	40 org	140 org	180 org	120 org	100 org
5.	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	-	-	90 org	90 org	100 org
6.	Jumlah sarana lembaga latihan swasta (LSS)	2	-	6	-	-
7.	Jumlah pembinaan perizinan dan peraturan perundang-undangan tenaga kerja warga negara asing pendatang (TKWNAP)	60 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	30 perusahaan	100 prsh

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang

Keterangan : TUK = Tempat Uji Kompetensi

LLS = Lembaga Latihan Swasta

Pelatihan kerja yang telah dilaksanakan UPTD BLK sebanyak 2.169 orang pencari kerja terdiri atas Pelatihan Berbasis Kompetensi, Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Pelatihan Kewirausahaan

**Tabel 3.115**



### Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Keterampilan Kerja Tahun 2011 s.d. 2015

No.	Jenis Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelatihan Berbasis Kompetensi	432	1.360	1.220	1223	704
2.	Pelatihan Berbasis Masyarakat	80	192	540	240	595
3.	Pelatihan Kewirausahaan	279	90	240	334	400

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Karawang

**Tabel 3.116**  
**Jumlah Orang dan Kelompok yang Mengikuti Pembentukan**  
**Wira Usaha Baru Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Jenis Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perluasan kerja sistem wira usaha, bintek terapan teknologi tepat guna	32 orang; 6 klpk	30 orang	40	40 orang	40 org
2.	Perluasan kerja bagi tenaga kerja mandiri terdidik dan profesional serta penyandang cacat	32 orang; 4 klpk	20 orang	0	40 orang	40 org

Sumber: *Disnakertrans Kabupaten Karawang*

## 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Perluasan kerja dengan membentuk kelompok usaha baru dan pemberian kerja sementara padat karya belum dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan dalam pembentukan kelompok usaha baru yang nantinya akan mandiri dan tidak tergantung pada pemberi kerja, dibutuhkan anggaran sebagai modal usaha, namun alokasi anggaran yang tersedia terbatas begitu pula dengan padat karya. Capaian yang dihasilkan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 seperti tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.117**  
**Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2011-2015**

No.	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	TTSD	-	-	-	39	14
2.	SD	2.105	-	40	757	521
3.	SLTP	15.408	1	68	2.866	3.614
4.	SLTA	35.955	7.960	4.523	8.827	12.036
5.	D1/D2	117	-	17	-	43
6.	D3	584	27	97	25	354
7.	S1	523	9	11	59	97
	JUMLAH	54.692	7.997	4.756	12.573	16.675

Sumber: *Disnakertrans Kabupaten Karawang*

**Tabel 3.118**  
**Hasil Pemberian Kerja Sementara Padat Karya Tahun 2011-2015**

No.	Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Program perluasan kesempatan kerja kegiatan padat karya produktif/ padat karya (orang)	315	176	11	40	40
2.	Perluasan Kerja Padat Karya (HOK)	-	88	5.280	5.280	1.120

*Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang*

*Catatan: Pemberian Kerja sementara Padat Karya bersumber dari dana APBN*

**Tabel 3.119**  
**Hasil Program Perluasan Kerja Pembentukan Kelompok Usaha Baru Tahun 2011-2015**

No.	Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelatihan berbasis masyarakat	80 orang/5 bidang usaha	48 orang/3 kelompok	540 orang	240 orang	1.065 orang
2.	Perluasan kerja sistem wira usaha, bintek terapan teknologi tepat guna	32 orang 6 klpk	30 orang/3 kelompok	40 orang	40 orang	40 org
3.	Perluasan kerja bagi tenaga kerja mandiri terdidik dan profesional serta penyandang cacat	32 orang 4 klpk	20 orang/4 kelompok	0	40 orang	40 org
	JUMLAH	144 orang 15 klpk	98 orang/10 kelompok	580 orang	320 orang	1.145 org

*Catatan : Pelatihan berbasis masyarakat di dalam nya termasuk pelatihan TTG, Penca, TKMT, Peningkatan Produktivitas, (Pemberdayaan TK Muda dan wanita, Pengembangan Keterampilan dan wirausaha TK Muda. Subsidi program)*

*Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang*

**Tabel 3.120**  
**Capaian Kinerja Peningkatan Kesempatan Kerja Tahun 2011-2015**

No.	Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	279	90	240	334	400
2.	Penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri	-	15.066	12.000	12.693	16.675
3.	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas	-	-	90	90	120
4.	Peningkatan sarana pelatihan lembaga latihan swasta	2	2	6	-	-
5.	Pembinaan perizinan dan peraturan perundangan tenaga kerja warga asing pendatang (TKWNAP)	60	50	50	30	100
6.	Pembinaan dan Peningkatan kualitas lembaga latih kerja milik pemerintah/swasta dan perusahaan	-	-	6	30 LPK	30

*Sumber : Disnakertrans Kabupaten Karawang*

*Catatan : Penempatan tenaga kerja dalam negeri sebanyak 12.693 terdiri dari 7.317 orang AKAL dan 5.256 penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan 120 pemagangan.  
Angka tersebut diluar PKWT sejumlah 29.783 orang*



Kebijakan yang ditempuh dalam upaya menanggulangi pengangguran adalah peningkatan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta perlindungan tenaga kerja dalam hubungan industrial yang harmonis, secara garis besar capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.121**  
**Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelatihan peningkatan keterampilan kerja (org)	512	1.552	2.000	1.223	1.699
2.	Wira usaha baru (org)	84	98	40	189	90
3.	Penempatan Tenaga Kerja (org)	54.692	7.997	12.000	12.693	16.675
4.	Perluasan kesempatan kerja (orang)	315	98	172	145	160
5.	Penyelesaian kasus perselisihan (kasus)	94	90	52	40	58
6.	Pengawasan Tenaga Kerja (NHP)	293	300	460	700	900

*Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang*

**Tabel 3.122**  
**Data Ketenagakerjaan Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Angkatan kerja (org)	978.507	1.033.921	970.935	1.069.036	
2.	Pencari kerja yang terdaftar (org)	73.443	28.443	21.228	24.098	31.988
3.	Jumlah lowongan kerja yang tersedia (org)	55.165	8.567	4.886	13.991	-
4.	Tenaga kerja yang ditempatkan (org)	54.692	7.997	12.000	12.693	16.675

*Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang*

**Tabel 3.123**  
**Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015**

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Jumlah Penduduk	2.168.710	2.207.181	2.230.641	2.250.120	X
II.	Penduduk Usia Kerja	1.557.876	1.580.712	1.598.498	1.651.979	X
	Angkatan Kerja :	978.507	1.033.921	970.935	1.026.868	X
	- Penduduk yg bekerja	880.087	917.556	875.213	912.864	X
	- Penduduk yg mencari kerja (penganggur)	98.420	116.365	95.722	114.004	X
	- Persentase penganggur (%)	10	11,2	9,86	10.15	X
	Bukan Angkatan Kerja	579.369	546.791	627.563	625.111	X

Sumber : BPS Sakernas Agustus 2014, diolah Disnakertrans Karawang

**X** = Data Ketenagakerjaan Umum Tahun 2015 Sampai bulan Januari Tahun 2016 Belum di rilis oleh BPS

**Tabel 3.124**  
**Data Ketenagakerjaan Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Tahun	Angkatan Kerja		Bekerja		Pengangguran	
		Laki-laki	Wanita	Laki-laki	Wanita	Laki-laki	Wanita
1.	2011	665.268	313.239	599.211	280.876	66.057	32.363
2.	2012	688.945	344.976	612.186	305.376	76.759	39.606
3.	2013	695.869	275.066	627.531	247.682	68.338	27.384
4.	2014	691.726	335.142	625.060	287.804	66.666	47.338
5.	2015)*	X	X	634.531	295.008	85.449	60.553

Sumber: BPS Sakernas Agustus 2014, diolah Disnakertrans Karawang

)\* Data Sementara

**X** = Data Ketenagakerjaan Umum Tahun 2015 Sampai bulan Januari Tahun 2016 Belum di rilis oleh BPS

### 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

**Tabel 3.125**  
**Capaian Kinerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perusahaan yang membentuk P2K3	26	19	255	290	596
2.	Perusahaan yang menerapkan SMK3	3/63 x 100	4/63 x 100	8	11	16
3.	Perusahaan yang mendapatkan zero accident Award					596



No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
4.	Sosialisasi dan prosedur penyelesaian kasus PHI dan pemogokan	75	90	30 prsh;90 kasus PHI dan PHK; 10 aksi demo	30 prsh, 130 kasus PHI dan PHK, 11 mogok dan 5 Demo	Sosialisasi PHI 30 prsh, penyelesaian 45 kasus PHI, 15kasus unras dan mogok, 10 kasus penanganan terpadu, 5 kasus oleh tim kasus
5.	Pembinaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja	120	120	120	375	180 prsh/180 org
6.	Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	-	150 prsh/ 300 orang	150 prsh/ 300 orang	30 prsh/ 300 orang	300 perusahaan
7.	Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak	1	1	90 anak	120 anak	-
8.	Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)	3 prsh	4 prshn	90 orang	90	90 org
9.	Peningkatan dan pemberdayaan fungsi P2K3 (Panitia Pembina Keselama-tan dan Kesehatan Kerja)	26 prsh	19 prshn	255	290	-
10.	Pembinaan LKS bipartit dan verifikasi organisasi pekerja	-	-	80	40	60 prsh/ 200 org
11.	Peningkatan mekanisme dan kinerja LKS tripartit	-	17 kali	20 kali		300 orang-

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang

Keberadaan industri di Kabupaten Karawang tidak terlepas dari timbulnya permasalahan antara pengusaha dengan pekerja. Adanya pengaduan mengenai perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan kasus pemogokan, mengakibatkan kurang nyamannya dalam bekerja, sehingga menurunkan produktivitas.

**Tabel 3.126**  
**Kasus PHI, PHK dan Pemogokan yang Berhasil Diselesaikan Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	PHI : Perselisihan Hubungan Industrial	13 kasus	15 kasus	39 kasus	42 kasus	130 kasus
2.	PHK : Pemutusan Hubungan Kerja	71 kasus	49 kasus	71 kasus	88 kasus	84 kasus
3.	Pemogokan	12 kasus	26 kasus	26 kasus	11 kasus	11 kasus
	JUMLAH	96 kasus	90 kasus	176 kasus	141kasus	225 kasus

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang

Masih tingginya kasus yang harus ditangani, membutuhkan mediator dengan jumlah yang cukup banyak agar proses mediasi atau penyelesaian kasus dapat cepat dan berkeadilan. Pembinaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan bertujuan agar para

pekerja dan pengusaha memahami dan dapat menerapkannya, khususnya tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku. Berdasarkan data laporan sampai dengan bulan Desember 2015, jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang sebanyak 1390 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 285.834 orang. Terdiri atas laki-laki 193.729 orang dan perempuan 92.05 orang. Berdasarkan hasil kunjungan yang dilakukan terhadap 900 perusahaan bahwa ada sekitar 700 perusahaan yang mendapat nota pemeriksaan, yang berarti masih ditemukan adanya penyimpangan atau tidak menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

**Tabel 3.127**  
**Kegiatan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pembinaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	120 orang	120 orang	235 orang	375 orang	180 orang
2.	Pemeriksaan ketenagakerjaan umum dan khusus serta keselamatan dan kesehatan kerja	293 LHP/178 nota	300 perusahaan/ 150 nota	500 perusahaan / 465 nota	700 perusahaan /80 kasus/700 nota	900 perusahaan / 50 kasus

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang

**Tabel 3.128**  
**Capaian Kinerja Peningkatan Kualitas dan PProduktivitas Tenaga Kerja Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sertifikasi dan lisensi bagi pekerja/operator	30 operator forklift	-	40 operator forklift		-
2.	Peningkatan norma kesehatan dan lingkungan kerja	79	88	75	75	90 orang
3.	Pemeriksaan ketenagakerjaan	293 LHP/178	300 prsh/	500prsh/ 465 nota	700prsh/ 80 Kasus/ 700 Nota	900 prsh



<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	umum dan kasus	nota	150 nota			
4.	Penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan	-	-	-		-
5.	Pembinaan dan monitoring penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja di perusahaan	-	7 kali	120 kali	150 kali	300

*Sumber: Disnakertrans Kabupaten Karawang*

**Tabel 3.129**  
**Penetapan Upah Minimum Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2011-2015 (Rp)**

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Sektoral Kabupaten	1.269.227	2.000.000	2.447.450	2.957.450	3.332.735

Sumber: *Disnakertrans Kabupaten Karawang (\* = data s.d. Desember 2014)*

#### 10. **Meningkatnya peran kelembagaan dan akses koperasi dan UMKM**

Indikator Kinerja Strategis : Prosentase peningkatan koperasi sehat dan prosentase peningkatan UMKM yang memiliki SP Kesehatan.

##### **1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan hasil kinerja. Untuk jumlah wirausaha yang berdaya saing mengalami peningkatan dari tahun 2014 sejumlah 10.850 menjadi 11.602 atau meningkat sebesar 6,93%. Untuk indikator kualitas kelembagaan KUMKM meningkat dari tahun 2014 sebesar 569 menjadi 639 pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 12,30%. Dan untuk fasilitasi kemitraan UMKM meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 289 menjadi 305 pada tahun 2015 atau sebesar 5,53%.

**Tabel 3.130**  
**Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi UMKM**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah wirausaha yang berdaya saing	1.002	3.708	9.650	10.850	<b>11.602</b>
2.	Jumlah Kualitas kelembagaan KUMKM (yang telah standarisasi, akreditasi dan sertifikasi)	258	305	455	569	<b>639</b>
3.	<b>Jumlah fasilitasi kemitraan UMKM</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>187</b>	<b>289</b>	<b>305</b>

Sumber : *Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang*

## 2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

**Tabel 3.131**  
**Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sosialisasi pemahaman Perkoperasian (orang)	120	275	270	490	<b>490</b>
2.	Pelatihan Kemampuan Menyusun RAPBK (koperasi)	20	30	50	50	<b>50</b>
3.	Pelatihan Pengetahuan Teknologi Pemasaran dan keuangan (koperasi)	40	-	-	-	-
4.	Jumlah koperasi yang dibina (koperasi)	110	122	132	125	<b>130</b>
5.	<b>Jumlah koperasi yang sehat (koperasi)</b>	<b>110</b>	<b>122</b>	<b>132</b>	<b>125</b>	<b>130</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi pada indikator sosialisasi pemahaman perkoperasian terjadi kenaikan jumlah dari tahun 2014 sebanyak 490 orang menjadi 490 orang pada tahun 2015 atau tetap. Untuk pelatihan kemampuan menyusun RAPBK jumlah pada tahun 2014 yaitu 50 orang dan pada tahun 2015 masih sama dengan jumlah 50 orang yang dilakukan pembinaan. Indikator pelatihan teknologi pemasaran dan keuangan perubahan pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 yakni tidak ada perubahan karena tidak dilaksanakan. Untuk jumlah koperasi yang dibina pada tahun 2014 sebanyak 125 koperasi sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 130 koperasi atau meningkat sebanyak 4%. Jumlah koperasi yang sehat pada tahun 2014 sebanyak 125 koperasi meningkat sebesar 4% pada tahun 2015 menjadi sebanyak 130 koperasi.

Berikut ini adalah perkembangan jumlah koperasi, volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) tahun 2011 sampai dengan 2015.

**Tabel. 3.132**  
**Perkembangan Jumlah Koperasi, Volume Usaha dan**  
**Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Tahun	Jumlah Koperasi (Unit)	Volume Usaha (Rp.)	SHU (Rp.)
<b>1</b>	2011	1.382	57.814.000.000	<b>11.764.000.000</b>
<b>2</b>	2012	1.433	122.090.000.000	<b>12.351.000.000</b>
<b>3</b>	2013	1.455	133.103.000.000	<b>12.877.000.000</b>
<b>4</b>	2014	1.481	230.186.000.000	<b>13.520.000.000</b>
<b>5</b>	<b>2015</b>	<b>1.538</b>	<b>230.037.000.000</b>	<b>13.790.000.000</b>

*Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Karawang*

Perkembangan jumlah koperasi, volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU) mulai tahun 2011 sampai tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Jumlah koperasi meningkat sebesar 3,84%, volume usaha mengalami penurunan sebesar 0,06% dan SHU meningkat sebesar 1,99%.

**Tabel 3.133**  
**Keberadaan KUMKM Kabupaten Karawang Tahun 2015**

No	Uraian	Satuan	Jumlah
<b>I.</b>	<b>KOPERASI</b>		
<b>a.</b>	<b>KELEMBAGAAN KOPERASI</b>		
	1. Jumlah Koperasi	Unit	<b>1.538</b>
	2. Jumlah Koperasi Aktif	Unit	<b>627</b>
	3. Jumlah Koperasi Tidak/Kurang Aktif	Unit	<b>911</b>
	4. Jumlah Koperasi yang RAT	Unit	<b>114</b>
	5. Jumlah Koperasi yang RAT Tepat Waktu	Unit	<b>108</b>
	6. Jumlah Anggota Koperasi	Orang	<b>364.854</b>
	7. Jumlah Karyawan Koperasi	Orang	<b>1.738</b>
	8. Jumlah Manajer Koperasi	Orang	<b>310</b>
	9. Jumlah Koperasi Berprestasi	Orang	<b>20</b>
<b>b.</b>	<b>USAHA KOPERASI</b>		
	1. Jumlah Modal Koperasi	Rp	<b>177.689.000.000</b>
	2. Jumlah Modal Sendiri	Rp	<b>127.843.000.000</b>
	3. Jumlah Modal Luar	Rp	<b>49.846.000.000</b>
	4. Jumlah SHU Koperasi	Rp	<b>13.790.000.000</b>
	5. Jumlah Volume Usaha	Rp	<b>230.037.000.000</b>
	6. Jumlah Volume Usaha KSP	Rp	<b>82.257.839.400</b>
	7. Jumlah Volume Usaha USP	Rp	<b>138.022.000.000</b>
	8. Jumlah Volume Usaha Perdagangan	Rp	<b>71.621.000.000</b>

No	Uraian	Satuan	Jumlah
<b>c.</b>	<b>PENGAWASAN KOPERASI</b>		
	1. Pengawas Koperasi	Orang	<b>4.443</b>
	2. Pengawas yang Aktif	Orang	<b>1.968</b>
	3. Pengawas yang Tidak/Kurang Aktif	Orang	<b>2.475</b>
<b>II.</b>	<b>USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH</b>		
	1. Jumlah Unit Usaha	Unit	<b>38.904</b>
	2. Nilai Produksi	Rp.	<b>4.489.740.000</b>
	3. Tenaga Kerja	Orang	<b>116.172</b>
<b>a.</b>	<b>UMKM Industri</b>		
	1. Jumlah Unit Usaha	Unit	<b>37.356</b>
	2. Nilai Produksi	Rp.	<b>325.868.105.000</b>
	3. Tenaga Kerja	Orang	<b>17.457</b>
<b>b.</b>	<b>UMKM Perdagangan</b>		
	1. Jumlah Unit Usaha	Unit	<b>31.339</b>
	2. Nilai Produksi	Rp.	<b>2.112.428.000</b>
	3. Tenaga Kerja	Orang	<b>94.117</b>
<b>c.</b>	<b>UMKM Jasa</b>		
	1. Jumlah Unit Usaha	Unit	<b>3.117</b>
	2. Nilai Produksi	Rp.	<b>501.040.000</b>
	<b>3. Tenaga Kerja</b>	<b>Orang</b>	<b>4.698</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

### 3) Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif

**Tabel 3.134**  
**Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	Jumlah dukungan usaha yang mampu mengakses modal	1	2	12	26	<b>30</b>
<b>2.</b>	<b>Jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi SP kesehatan</b>	<b>138</b>	<b>168</b>	<b>218</b>	<b>268</b>	<b>298</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah yang Kondusif juga mengalami peningkatan. Jumlah dukungan usaha yang mampu mengakses modal meningkat pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 sebesar 15,38%, sedangkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikat SP kesehatan meningkat sebesar 11,19%.

#### 4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

**Tabel 3.135**  
**Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi UMKM Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah wirausaha baru per tahun	140	240	1.440	1.620	<b>1.821</b>
2.	Tingkat kapasitas SDM KUMKM per tahun	-	-	-	-	-
3.	Ketersediaan aspek legalitas bagi KUMKM per tahun (ijin terdaftar)	258	305	-	64	<b>68</b>
4.	Akses permodalan ke lembaga keuangan mikro per tahun	4	6	16	26	<b>26</b>
5.	<b>Promosi produk KUMKM per tahun melalui jaringan dan pameran KUMKM</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	-	<b>120</b>	<b>136</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada beberapa indikator memperlihatkan hasil yang meningkat. Jumlah wirausaha baru pada tahun 2015 meningkat sebesar 12,40% dibandingkan tahun 2014 dan akses permodalan ke lembaga keuangan mikro juga meningkat sebesar 7,6%. Aspek legalitas bagi KUMKM mengalami peningkatan sebesar 6,25% pada tahun 2015. Hal yang sama terjadi pada promosi produk KUMKM per tahun melalui jaringan dan pameran KUMKM yang pada tahun 2014 sebanyak 120 kali sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 136 kali meningkat 13,33%. Sementara tingkat kapasitas SDM KUMKM tidak ada capaian sejak tahun 2011.

## 5) Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Mikro dan Menengah Koperasi dan BPR dengan Sistem Bagi Hasil Proporsional

**Tabel 3.136**  
**Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Mikro dan Menengah Koperasi dan BPR dengan sistem Bagi Hasil Proporsional Tahun 2011 s.d. 2015**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>1.</b>	Ketersediaan sarana dan prasarana bagi lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan menggunakan sistem bagi hasil :					
	a. Keterlibatan aspek legalitas bagi lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan sistem bagi hasil	-	-	-		-
	b. Jumlah wirausaha baru per tahun	140	240	1.440	1.620	<b>1.821</b>
	<b>c. Tingkat penyerapan tenaga kerja/tahun</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>25.515</b>	<b>50.151</b>	<b>64.036</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang

Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Mikro dan Menengah Koperasi dan BPR dengan Sistem Bagi Hasil Proporsional secara garis besar pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Jumlah wirausaha baru meningkat sebesar 12,40% dan tingkat penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan sebesar 27,68 %. Namun untuk keterlibatan aspek legalitas bagi lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan sistem bagi hasil tidak pernah dilaksanakan sejak tahun 2011.

Secara garis besar capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.137**  
**Capaian Kinerja Kegiatan Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2015**

No.	Obyek Jenis Pelayanan Pembinaan Kelembagaan	Target	Realisasi
<b>I.</b>	<b>Pelayanan Pembinaan Kelembagaan Koperasi</b>		
1.	Kunjungan ke koperasi	200 kali	<b>196 kali</b>
2.	Pembinaan RAT	120 kop	<b>114 kop</b>
3.	Diklat Perkoperasian	500 org	<b>475 org</b>
4.	Pendirian Koperasi	60 kop	<b>57 kop</b>
<b>II.</b>	<b>Pelayanan Pembinaan Pemberdayaan Koperasi</b>		
1.	Fasilitas Modal Luar	-	-
2.	Bantuan Perkuatan Modal APBD	-	-
3.	Mengikutsertakan dalam pameran produk	136	<b>136</b>
<b>III.</b>	<b>Pelayanan Pembinaan Pemberdayaan UMKM</b>		
1.	Jumlah UMKM yang dibina	3.750	<b>3.757</b>
2.	Bantuan perkuatan modal	-	-
3.	Diklat Kewirausahaan	26 kali	<b>26 kali</b>
4.	Pameran	10 kali	<b>9 kali</b>
<b>IV.</b>	<b>Pelayanan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi</b>		
1.	Kegiatan monitoring	45 kali	<b>45 kali</b>
2.	Kegiatan evaluasi	12 kali	<b>12 kali</b>
3.	Kegiatan Pengawasan (Pemeriksaan)	150	<b>150</b>
<b>V.</b>	<b>Pelayanan Pendirian Koperasi</b>		
1.	Lama proses pendirian koperasi	<b>14 Hari</b>	<b>14 Hari</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang



**Tabel 3.138**  
**Tingkat Keberhasilan Pembinaan Koperasi dan UMKM Tahun 2011-2015**

No	Aspek	Satuan	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
<b>I.</b>	<b>KOPERASI</b>						
1.	Koperasi (KUD)	Jumlah	42	42	42	42	<b>42</b>
2.	Koperasi non KUD	Jumlah	1.327	1.391	1.413	1.439	<b>1.496</b>
3.	Anggota Koperasi	Orang	357.098	262.981	358.692	363.678	<b>364.854</b>
4.	Modal Sendiri	Rp	31.914.000.000	64.718.000.000	76.367.000.000	125.880.000.000	<b>127.843.000.000</b>
5.	Total Asset	Rp	65.788.000.000	77.379.000.000	121.003.000.000	184.714.000.000	<b>191.467.000.000</b>
6.	Volume Usaha Koperasi	Rp	57.814.000.000	116.031.000.000	133.103.000.000	230.186.000.000	<b>230.037.000.000</b>
7.	SHU Koperasi	Rp	11.764.000.000	12.242.000.000	12.876.000.000	13.520.000.000	<b>13.790.000.000</b>
<b>II.</b>	<b>UMKM</b>						
1.	Jumlah UMKM	Orang	4.008	24.721	30.931	37.356	<b>38.904</b>
2.	Jumlah Usaha Mikro	Orang	3.412	24.282	29.262	34.145	<b>34.145</b>
	Jumlah Usaha Kecil	Orang	561	393	1.503	2.941	<b>2.941</b>
	Jumlah Usaha Menengah	Orang	35	46	166	270	<b>818</b>
3.	Jumlah Usaha Perdagangan	Orang	1.599	20.363	26.563	31.339	<b>31.339</b>
	Jumlah Usaha Industri	Orang	2.176	3.059	3.089	4.451	<b>4.451</b>
	Jumlah Usaha Jasa	Orang	233	1.299	1.269	1.566	<b>3.114</b>
4.	Pameran UMKM						
	Produk	Jenis	11	66	82	100	<b>136</b>
	Jumlah	Kali	4	7	8	10	<b>9</b>
5.	Fasilitasi						
	Halal	Unit prod	110	127	127	150	<b>178</b>
	Kesehatan	Unit prod	142	161	218	268	<b>298</b>
	Akses Modal	UMKM	226	4	14	515	<b>515</b>
	Penyuluhan	Kali	20	-	7	26	<b>26</b>
6.	<b>Volume Usaha UMKM</b>	<b>(Rp. 000)</b>	<b>856.522.946</b>	<b>4.431.832.620</b>	<b>835.320.594.000</b>	<b>1.433.193.245.000</b>	<b>4.489.740.000.000</b>

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang*

**MISI KETIGA : MENINGKATKAN PELAYANAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.**

**11. Meningkatnya kualitas sistem infrastruktur jaringan jalan.**

Indikator Kinerja Strategis :  
 Prosentase kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dan Prosentase peningkatan drainase kawasan perkotaan



Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar

penunjang utama perekonomian dan merupakan aspek utama di dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Sejalan dengan konsep tersebut diatas, penyediaan infrastruktur yang memadai, baik pembangunan baru maupun rehabilitasi menjadi salah satu prioritas utama dan focus pembangunan Kabupaten Karawang, Bidang Kebinamargaan, pembngunan diarahkan pada penyediaan kebutuhan akan infrastruktur transportasi guna memperlancar arus angkutan orang dan barang, serta transportasi ke sentra-sentra produksi.

Bidang Pengairan pembangunannya diarahkan pada rehabilitasi dan normalisasi saluran pembuang, muara serta jaringan irigasi guna mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai daerah lumbung padi nasional. Beberapa program prioritas Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

**1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.**

Realisasi pembangunan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten sepanjang minimal 80 Km pertahunnya. Pada tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam table 3.129 berikut :

**Tabel 3.139  
 Realisasi Program-program Peningkatan Jalan/Jembatan  
 Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Peningkatan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa(Km)	100,84	173,79	331,14	209,42	202.19
2	Pembangunan Jalan Kabupaten (Km)	21,18	20,13	-	-	-

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
3	Peningkatan Jembatan Kabupaten (Km)	-	0,07	0,03	0,14	0.55
4	Pembangunan Jembatan Kabupaten (Km)	0,119	0,404	0,772	-	1,09
5	Jumlah Pembangunan Jembatan, fly over, Underpass baru (unit)	-	16	24	3	54
6	Jumlah peningkatan Jembatan, fly over, Underpass (unit)	-	8	3	14	38
7	Panjang jalan penghubung pusat pengembangan wilayah (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) (Km)	-	55,894	39,16	19,99	32.05
8	Jumlah jembatan penghubung lokasi strategis (unit) - Jemb. Pakisjaya - Pelebaran Jemb. Citarum Akses Tol Karawang Barat - Jemb. Ampera II - Jemb. Cigunungsari - Jemb. Sasak Loneng - Jemb. Ciderewak - Jemb. Cibulan-Bulan	-	7	5	3	7
9	Jumlah pemeliharaan jembatan (unit)	-	4	26	23	36

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

## 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pelaksanaan program pembangunan saluran drainase/Gorong-gorong minimal 2.000 M' pertahunnya, realisasinya pada tahun 2011- 2015 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :



**Tabel 3.140**  
**Realisasi Program-program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembangunan drainase/gorong-gorong (Km)	2,000	1,636	4,000	4,900	42.58

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

### 3) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Pelaksanaan pembangunan turap/talud/bronjong minimal 1.000 M' pertahunnya, realisasinya pada tahun 2011- 2015 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 3.141**  
**Realisasi Program-program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Km)	1,889	13,081	13,500	11,754	64.81

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

### 4) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

**Tabel 3.142**  
**Realisasi Program-program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi /Pemeliharaan periodik Jalan (Km)	319,72	13,071	18,97	4,97	10,57
2	Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jalan(Km)	-	60,374	75,40	24,23	21,28
3	Rehabilitasi /Pemeliharaan periodik Jembatan, Fly over, Underpass (Km)	0,716	0,194	0,190	0,54	0,70

Sumber: Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

### 5) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan.

**Tabel 3.143**  
**Realisasi Program-program Peningkatan Sasaran Perencanaan dan Data Base Jalan, Jembatan serta Pengairan**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyusunan perencanaan jalan, jembatan dan pengairan (paket)	452	1.120	1.540	1.884	2.487
2	Pembangunan system informasi/database jalan, jembatan dan pengairan (paket)	-	7	12	-	2
3	Penyusunan DED perencanaan fisik tertentu (paket)	-	23	47	20	32

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

## 6) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

**Tabel 3.144**  
**Pembangunan Infrastruktur Pedesaan**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pembangunan jalan poros desa (Km)	-	77,25	81,76	74,44	108,92
2	Pemeliharaan jalan poros desa (Km)	-	-	-	-	

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

Tahun 2015 penanganan infrastruktur jalan tetap menjadi salah satu prioritas utama pembangunan. Tidak hanya pembangunan infrastruktur jalan, dibangun juga infrastruktur jembatan di ruas jalan yang membutuhkan jembatan dan didalamnya



termasuk pembangunan gorong-gorong/box culvert. Pada prinsipnya pembangunan jalan harus sebanding atau diikuti dengan jembatan pada ruas yang ditangani, karena merupakan satu kesatuan ruas jalan.

Pemerintah Kabupaten Karawang juga membangun infrastuktur dalam bidang pengairan irigasi yang di dalamnya adalah pembangunan/rehabilitasi/normalisasi sejumlah saluran dari mulai saluran sekunder, tersier dan saluran penunjang lainnya, di samping itu juga membangun bangunan lainnya seperti pintu air, embung/dam mini yang semuanya adalah untuk menunjang system pertanian, khususnya padi sawah yang sangat erat hubungannya dengan produktivitas petani secara menyeluruh.

**Tabel 3.145**  
**Analisa Perbandingan Kinerja Sasaran Dinas Bina Marga dan Pengairan**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten minimal 80 Km	100,48 Km	173,79 Km	199,50 Km	134,98 Km	202,28 Km
2	Terlaksananya rehabilitasi jalan dan bahu jalan kabupaten minimal sepanjang 40 Km	21,18 Km	93,575 Km	55,50 Km	4,97 Km	3,24 Km



No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
3	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan kabupaten minimal 350 Km	319,72 Km	73,445 Km	46,50 Km	24,23 Km	21,28 Km
4	Terlaksananya pembangunan jalan desa (penyirtuan dan Rigid) minimal 100,00 Km	44,07 Km	20,13 Km	49,88 Km	74,44 Km	108,92 Km
5	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan / pelebaran/penggantian jembatan minimal 4 Unit	4 unit/ 716 M'	8 unit/ 230,30 M'	26 unit/ 152 M'	37 unit/ 728 M'	36 unit/ 532,8 M'
6	Terlaksananya pembuatan turap/talud/bronjong	1.889 M'	13.081 M'	13.500 M'	11.754 M'	89.518,76 M'
7	Terlaksananya pembuatan/perbaikan assainerring/drainage minimal 2000 M	2.000 M'	1.636 M'	4.000 M'	4.900 M'	23.025,55 M'
8	Terlaksananya pembangunan jembatan minimal 8 unit	119 M'	16 unit/ 404 M'	772 M'	3 unit/147 M'	53 unit/1.094,3 M'
9	Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi minimal 100,00 Km	20,00 Km	19,50 Km	17,30 Km	30,91 Km	68,55 Km
10	Terlaksananya rehabilitasi/perbaikan jaringan irigasi minimal 25 Km	13, 88 Km	13,327 Km	14,00 Km	15,87 Km	2,92 Km
11	Terlaksananya pengerukan dan normalisasi jaringan irigasi minimal 10 Km	-	69,001 Km	15,00 Km	4,45 Km	202,16 Km
12	Terlaksananya pembuatan turap, talang air, pintu air, bangunan bagi, bending, saluran minimal 1 Km/ 6 unit dan pembinaan pengelolaan jaringan irigasi	6 unit	38 unit pintu air	25 unit pintu air	20 unit pintu air	16 unit pintu air
13	Terlaksananya rehabilitasi, pengerukan dan normalisasi sungai, saluran pembuang dan muara minimal 10 Km	10,77 Km	69,001 Km	15,00 Km	32,684 Km	71,470 Km
14	Terlaksananya pembangunan pengaman daerah abrasi pantai minimal 800 M'	-	600 M'	300 M'	-	697,5 M'
15	Terlaksananya rekrutmen waker sebanyak 400 orang ; terlaksananya pembinaan waker sebanyak 400 orang	400 orang	400 orang	450 orang	-	400 orang
16	Terlaksananya pengadaan alat berat (Excavator dan Mesin Gilas)	-	-	-	9 unit	2 unit

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

Secara kuantitatif data kondisi infrastruktur jalan, jembatan, pengairan/jaringan irigasi hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3.140 berikut ini.

**Tabel 3.146**  
**Kondisi Jalan, Jembatan dan Pengairan/Jaringan Irigasi**  
**di Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2015**

STATUS	VOLUME (KM)	KELAS (TONASE)	BAIK (KM)	SEDANG (KM)	RUSAK (KM)	KET.
- Jalan Negara	69,516	I	51,22	10,97	7,32	
- Jalan Provinsi	47,927	III	33,55	9,59	4,79	
- Jalan Kabupaten	1.582,8	III	1.028,82	316,56	237,42	
-Jalan layang(Fly over)	2,8	III	2,52	0,28	-	
- Jalan Tol	37,495	Tol	36,37	1,12	-	
- Jalan Desa	1.057,23	-	475,75	264,31	317,17	
- Jembatan Negara	2,19		2,19	-	-	
- Jembatan Provinsi	0,16		0,16	-	-	
-Jembatan Kabupaten	2,55		1,61	0,61	0,33	
- Bendung	2,55		1,53	0,62	0,4	
-Bangunan Bagi/sadap dan bangunan lainnya	382		95	137	150	
- Saluran Induk	120		25	40	55	
- Saluran Sekunder	289,6		145,77	219,94	223,89	
STATUS	VOLUME (KM)	KELAS (TONASE)	BAIK (KM)	SEDANG (KM)	RUSAK (KM)	KET.
- Citarum	60		51	6	3	
- Cibeet	35		-	-	-	
- Cigentis	20		-	-	-	
- Kali Cilamaya	30		-	-	-	
- Situ	12 buah		-	-	-	
- Saluran pembuang	912		182,40	456,00	273,60	
- Muara	27 buah		5	15	7	
- Pantai	76,42		1,31	30,00	45,1	

Sumber: Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

## 12. Tersedianya infrastruktur sumberdaya air dan irigasi.

Indikator kinerja startegis : Prosentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik.

### 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan Lainnya.

Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi jawa barat bahkan nasional memiliki peran yang vital dalam program ketahanan pangan. Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap sektor pertanian, dilaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa



dan jaringan pengairan lainnya minimal 40,00 km dan pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya minimal 40 km.

Beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga status Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat diantaranya adalah pengembangan, pengelolaan pada daerah irigasi sesuai kewenangan kabupaten yaitu dengan uasan dibawah 1.000 ha.

**Tabel 3.147**  
**Realisasi Program-program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Km)	13,88	13,327	14,00	15,87	2,92
2	Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Km)	20,00	19,50	17,30	30,91	68,55

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

## 2) Program Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Jaringan Irigasi Pengairan.

**Tabel 3.148**  
**Penyusunan dan Pemutakhiran Data Base Jaringan Irigasi Pengairan Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyusunan dan Pemutakhiran data base jaringan pengairan (paket)	-	1	1	-	-

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

## 3) Program Pengendalian Banjir dan Penanganan Pantai

**Tabel 3.149**  
**Pengendalian Banjir dan Penanganan Pantai Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Wilayah Pengendalian Banjir (Km)	-	-	-	-	-
2	Wilayah penanganan Abrasi di pantai (Km)	-	0,600	0,400	-	0,41

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

#### 4) Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai danau dan sumber daya air lainnya diperlukan untuk menjaga kelestariannya dalam rangka menjaga fungsinya untuk menyokong pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan



lingkungan. Hal tersebut sangat penting mengingat Kabupaten Karawang memiliki banyak sungai, situ serta sumber air tanah

**Tabel 3.150**  
**Realisasi Program-program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Normalisasi saluran pembuang (Km)	10,77	69,001	15,00	32,68	4.48
2	Pembangunan pengamanan daerah pantai (Km)	-	0,600	0,400	-	0,41

Sumber: Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang

#### 13. Meningkatnya kualitas keterjangkauan dan kelancaran pelayanan transportasi.

Indikator kinerja strategis : Prosentase jaringan trayek yang tersedia dan prosentase jalan kabupaten yang dipasang rambu.

Perhubungan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. Keberadaan sarana dan prasarana perhubungan yang handal yaitu yang memenuhi aspek keselamatan, kelancaran, keamanan, ketepatan waktu dan menjangkau seluruh wilayah sangat





menunjang pembangunan daerah. Sadar akan pentingnya perhubungan dalam pembangunan, Kabupaten Karawang terus melakukan upaya baik pembangunan maupun peningkatan prasarana dan sarana perhubungan yang sudah ada.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lalulintas antara lain : pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, pengecatan marka jalan dan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

### 1) Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

**Tabel 3.151**  
**Realisasi Kinerja Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	FS Terminal Tipe A berlokasi di Cikampek	-	1 Kajian	-	-	-
2.	Shelter / Halte	-	1 Unit (Jl. Pangkal Perjuangan)	1 Unit (SMAN 1 Karawang)	1 Unit (SMAN 4 Karawang)	-
3.	Kajian Angkutan Masal Trans Karawang	-	1 Kajian	-	-	-
4.	Kajian Potensi PAD Parkir dan Penentuan Lokasi Wilayah Tempat Parkir	-	1 Kajian	1 Kajian	-	-
5.	Papan Sosialisasi dan Penetapan Retribusi Parkir	-	-	5 Buah	-	-
6.	Survey O/D Asal Tujuan Kabupaten Karawang	-	-	-	1 Kajian dan 45 Buku	-
7.	Pengadaan dan Pemasangan Papan Sosialisasi Lintas Trayek	-	-	-	10 Buah	-
8.	Pengadaan dan Pemasangan Alat Komunikasi Radio dan Penerus Pancar Frekuensi di 4 Lokasi Terminal Wilayah I, II, III dan Kantor Dishubkominfo	-	-	-	4 Lokasi	-
9.	FS Kajian Pembangunan dan Pemasangan Variabel Messege Sign dan Jembatan Penyebrangan Orang	-	-	-	2 Kajian	-
10.	Pembuatan Pagar Depan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	-	-	1 Lokasi	-
11.	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Tambahan	-	-	-	24 Unit	60 buah
12.	Pengadaan Alat Uji Emisi Bensin dan Uji Asap Solar	-	-	-	2 Set Alat Uji Bensin 2 Set Alat Solar dan 2 Buah Genset	-
13.	Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan (Halte/RPPJ/Portal/Papan Sosialisasi Trayek/Deliniator/Guardrail/ Road Stud)	-	-	-	-	7 macam
14.	Pendataan KAPal dan Pembuatan	-	-	2 Tempat	-	5 Tempat



No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Tanda Pas Kecil Kapal 7 GT			Pevelangan Ikan		Pevelangan Ikan
15.	Master Plan Transportasi	-	-	-	-	1 kajian
16.	DED JPO (Jembatan Penyeberangan Orang)	-	-	-	-	1 kajian
17.	DED VMS (Variabel Message Sign)	-	-	-	-	1 kajian
18.	DED Dermaga (Kapal) 7 GT Lokasi TPI Muara Mina Cilamaya	-	-	-	-	1 kajian
19.	Amdal Lalin Terminal dan Pasar Kaliwangi/ Rengasdengklok	-	-	-	-	1 kajian
20.	FS Terminal Type C	-	-	-	-	1 Kajian Tegalwaru/ Pangkala
21.	FS Terminal Depo Container	-	-	-	-	1 kajian
22.	Kajian Lalulintas One Way Rekyasa Lalu Lintas Johar - Lamaran	-	-	-	-	1 kajian
23.	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (Zebra Cross)	-	-	-	-	30 lokasi disekolah dan 30 lokasi ditempat umum
24.	Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu terpasang pada Zebra Cross	-	-	-	-	30 unit di sekolah dan 30 unit ditempat umum
25.	Alat Uji Brake Tester	-	-	-	-	1 set lengkap
26.	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	-	-	-	-	1 set lengkap
27.	Andalalin Underpass Pawarengan	-	-	-	-	1 kajian
28.	Pengadaan Papan Visual/Running Text LED Display	-	-	-	-	1 set lengkap

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang

## 2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

**Tabel 3.152**  
**Realisasi Kinerja Peningkatan Pelayanan Angkutan Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumah Jaringan Trayek yang dioperasikan - Angkutan Perkotaan	28	28	29	30	30
2.	Sosialisasi TIBLANTAS terhadap Siswa dan Siswi Pelajar	-	-	95 Siswa/Siswi SLTA Di Kab. Karawang	300 Siswa/Siswi SLTP di Kab. Karawang	-
3.	Pembuatan Peraturan Bupati yang terkait dengan Pelaksanaan Perda Penyelenggaraan Perhubungan	-	-	-	1 Perda dan 16 Perbup	-
4.	Pemilihan Pelajar Pelopor	-	-	-	40 Orang	20 orang



No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat kabupaten Karawang				Pelajar (SLTA)	Pelajar (SLTA)
5.	Pemasangan Palang Pintu Perlindungan Kereta Api beserta Rambu Perlindungan Kereta Api	-	-	-	14 Set Perlindungan tanpa Palang Pintu	-
6.	Pembinaan Masyarakat Peduli Lalu Lintas	-	-	125 Orang Peserta	45 orang Peserta Petugas Palang Pintu	-
7.	Legal Opinion Peraturan Bupati	-	-	-	-	1 kegiatan
8.	Pemantauan Pelaksanaan Tarif Penumpang Lokal	-	-	-	-	1 kegiatan
9.	Kajian Pengembangan Jaringan Trayek	-	-	-	-	1 kegiatan
10.	Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalulintas dan Angkutan	-	-	-	-	1 kegiatan 3 orang
11.	Pengiriman Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi	-	-	-	-	3 orang pelajar (SLTA)
12.	Pendataan Angkutan Barang	-	-	-	-	1 kegiatan

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang

**Tabel 3.153**  
**Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor	21.941 unit	24.535 unit	27.930 unit	29.762 unit	29.246 Unit
2.	Pemeriksaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor					
a.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji (Mobil Barang/Bis/Kendaraan Tempelan/Gandengan dan Kendaraan Khusus)	-	-	-	23.112 unit	29.161 Unit
b.	Non Kendaraan Wajib Uji Mobil Penumpang/ Sepedamotor	-	-	-	1.805 unit	158 unit

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Karawang (data dari Januari s.d. Desember 2015)

- Pengujian Emisi terhadap Non Kendaraan Wajib Uji, mulai dilaksanakan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Terhitung mulai Bulan April 2014;
- Untuk Kendaraan Wajib Uji, Uji Emisi tidak berikutan Buku Uji Emisi, karena wajib uji untuk Non Kendaraan Wajib Uji dengan mendapat legalitas ambang batas gas buang (Buku Uji Emisi).



**Tabel 3.154**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Dihasilkan dari Bidang Perhubungan Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pengujian Kendaraan Bermotor	819.175.100,00	1.255.132.500,00	2.127.036.400,00	1.258.156.500,00	1.998.605.000,00
2.	Emisi Gas Buang	-	-	-	476.800.000,00	586.020.000,00
3.	UPTD Terminal	225.451.300,00	225.226.000,00	272.466.000,00	242.578.000,00	229.528.000,00
4.	UPTD Parkir	987.534.556,00	919.116.000,00	887.581.000,00	1.258.156.500,00	1.105.418.500,00
5.	Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	4.473.760,00	1.170.181.839,00	2.973.623.207,00	1.356.530.473,00

Sumber : Dishubkominfo Kabupaten Karawang (data dari Januari s.d. Desember 2015)

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

### 3) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

**Tabel 3.155**  
**Realisasi Kinerja Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Fasilitas dan Rambu jalan					
	a. <i>Traffic Light</i>	1 Paket (tiga kaki) Ciranggon	1 Paket (empat Kaki) Talagasari	1 Paket Simpang Tiga Karasak	1 Paket Simpang Telukjambe	-
	b. Rambu Lalu Lintas					
	- Rambu Peringatan	38 buah	4 buah	28 buah	85 buah	8 buah
	- Rambu Larangan	13 buah	-	93 buah	19 buah	12 buah
	- Rambu Perintah	-	-	111 buah	31 buah	8 buah
	- Rambu Petunjuk	21 buah	8 buah	10 buah	-	9 buah
	- Papan Rambu Tambahan	-	-	64 buah	4 buah	-
	- RPPJ Portal	-	-	1 buah (Jl.Tuparev)	-	10 unit



No	Uraian	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
	c. Marka Jalan	1.865 ml	-	10.714,4 ml	42.837,29 ml	21.747 ml
	d. Marka Jalan ZoSS (Zona Selamat Sekolah)	-	-	7.137 ml Depan SMAN 1 Karawang & SMPN 5 Karawang	-	-
	e. <i>Guard Rail</i>	80 m	-	-	-	260 m (PON XIX)
	f. Paku Jalan ( <i>Road Stud</i> )	-	497 buah	913 buah	-	-
	g. Deliniator	-	185 buah	-	-	-
	h. Water Barrier	-	-	10 buah	70 buah	100 buah
	i. Mobile Concrete Barrier (MCB)	-	-	10 buah	70 buah	80 buah
	j. Traffic Cone	-	-	10 buah	73 buah	100 buah
	k. Kunci Gembok Parkir Sembarangan	-	-	10 buah	-	-
	l. Timbangan Kendaraan Portable 10-80 Ton	-	-	1 unit	-	-
	m. Warning Light	-	-	-	4 unit	6 unit
	n. Cermin Tikungan	-	-	-	-	2 unit
2	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Karawang	4 triwulan/16 kali	4 triwulan/16 kali	4 triwulan/16 kali	4 triwulan/16 kali	4 triwulan/16 kali
3	Pengendalian Gatur Lantas Anggota Dalops	366 hari	366 hari	366 hari	366 hari	366 hari
4	Pemeriksaan Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor	-	-	-	14 Hari (Angkutan Lebaran=36 unit) dan 2 Hari (Natal dan Tahun Baru=108 unit)	14 Hari (Angkutan Lebaran=36 unit) dan 2 Hari (Natal dan Tahun Baru=108 unit)
5	Pengendalian dan Penindakan Operasi Uji Emisi Gas Buang	-	-	-	4 Triwulan / 20 kali	4 Triwulan / 20 kali

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang

## MISI KEEMPAT : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH.

### 14. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Indikator kinerja strategis : Prosentase kesesuaian program/kegiatan dengan perencanaan tahunan/RKPD, Prosentase Peningkatan PAD, Prosentase proporsi PAD terhadap seluruh pendapatan, Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah.

## **1) Program Perencanaan pembangunan daerah**

Evaluasi Pembangunan Kabupaten Karawang juga merupakan amanat dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana merupakan bagian-bagian dan fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi tahunan ini diarahkan kepada penilaian hasil pelaksanaan rencana pembangunan tahun yang berkenaan dibandingkan target tahunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan jangka menengah.

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 280 Ayat 5 dan Pasal 281 Ayat 4, setiap triwulan Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup kabupaten dan melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kabupaten tersebut. Untuk tahun 2014 Mendagri mengatur secara lebih spesifik pelaksanaan evaluasi hasil RKPD tahun 2014, melalui Permendagri nomor 23 tahun 2013.

Pelaporan yang dilaksanakan setiap triwulan (tiga bulan) sekali ini untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan.

## 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan tabel 3.146, Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2013 sebesar 0,36 % disebabkan karena. Persentase realisasi penerimaan PAD tahun 2013 lebih kecil bila dibandingkan dengan Persentase penerimaan realisasi tahun 2012 yaitu adanya kenaikan capaian realisasi penerimaan yang besar pada BPHTB secara keseluruhan, sejak tahun 2011-2014 terjadi penurunan prosentase PAD. Prosentase peningkatan proporsi PAD terhadap seluruh pendapatan cenderung stabil namun memperlihatkan proporsi yang masih rendah.

Pada indikator kinerja strategis Prosentase Peningkatan PAD mencapai angka 16,19% melebihi target yaitu 15%. Prosentase proporsi PAD terhadap seluruh pendapatan mencapai angka 29,11% melebihi target 20%, Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah tahun 2014 mendapatkan predikat WDP.

**Tabel 3.156**  
**Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**  
**Tahun 2011-2015**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>				
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan tahun Sebelumnya	80,04 %	73,95%	0,36 %	37,52%	16,19%
2.	Persentase peningkatan proporsi PAD terhadap seluruh pendapatan daerah	18,72%	26,76%	24,55%	28,41	29,11%
3.	Jumlah SKPD yang telah menyusun laporan asset susai peraturan	100,00%	100,00%	50 %	100%	100%
4.	Tercapainya pengamanan asset daerah berupa tanah	24,00%	35,83%	40 %	40%	40%
5.	Tercapainya pengamanan asset daerah berupa bangunan	60,00%	80,00%	80 %	80%	80%

6.	Tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran /Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WDP	WDP	WDP	WDP	Belum diaudit BPK
7.	Persentase Realisasi terhadap target pendapatan lain-lainnya yang sah	95,99%	96,79%	92,63 %	100,48%	99,64%

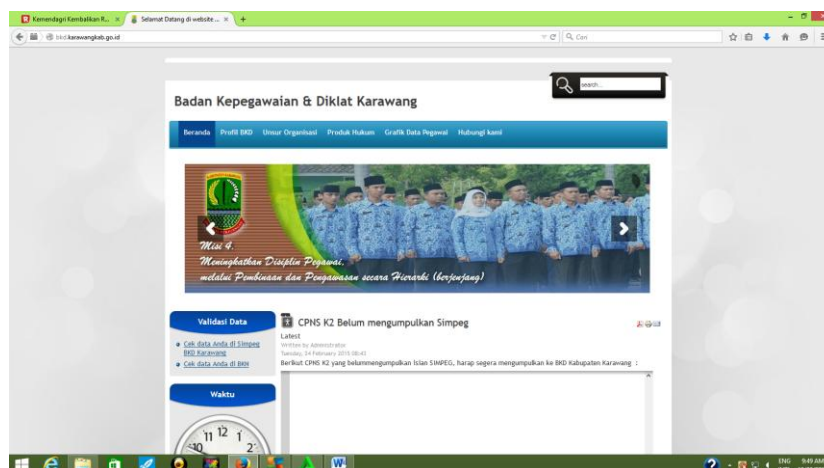
Sumber: DPPKAD Kabupaten Karawang

## 15. Terwujudnya birokrasi daerah yang profesional dan proporsional.

Indikator kinerja strategis : Prosentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi.

### 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun 2013, 2014,



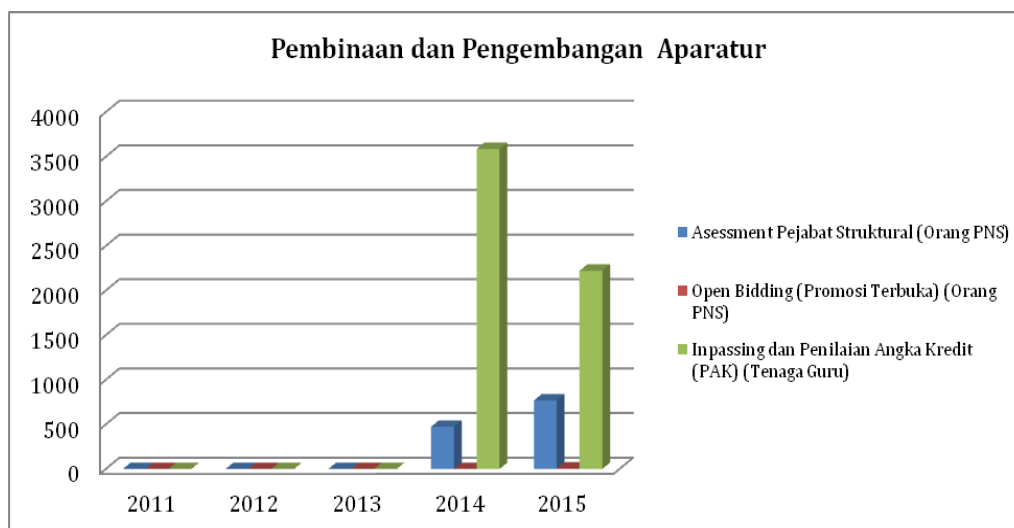
dan 2015 dimulai dengan pelaksanaan Tes CPNS dari tenaga honorer kategori II terlaksana pada tahun 2013 dan Tes CPNS dari pelamar umum terealisasi pada tahun 2014. Pada tahun 2013-2015 telah terselenggara orientasi tugas bagi CPNS yang dimaksudkan agar CPNS mengetahui dan memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagai aparatur. Kegiatan Bezeting formasi pegawai dari tahun 2011-2015 relatif tetap dan menjadi kegiatan rutin. Untuk peningkatan status CPNS menjadi PNS pada tahun 2013-2015 tidak ada realisasi dikarenakan diklat prajabatan baru dimulai pada tahun 2015, sedangkan syarat pengangkatan ke PNS terlebih dahulu CPNS tersebut harus sudah mengikuti diklat Prajabatan.

Terbitnya SK pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian jumlahnya menurun pada tahun 2014 dan tahun 2015, ini dikarenakan pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana salah satu turunannya mengatur tentang tambahan batas usia pensiun. Perpanjangan dan pemutusan tenaga kontrak kerja juga jumlahnya menurun pada tahun 2015, karena ada beberapa tenaga kontrak kerja yang mengundurkan diri. Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah relatif meningkat sejak tahun 2011-2015. Peserta seleksi calon praja IPDN jumlahnya sedikit mengalami penurunan dikarenakan system seleksi yang semakin ketat.

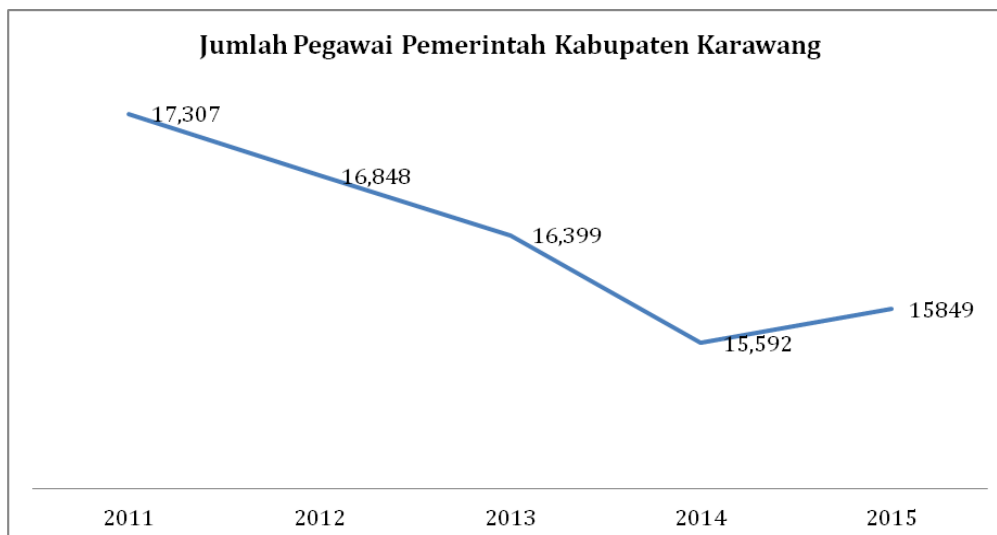
**Tabel 3.157**  
**Perkembangan Pegawai Pemerintah Daerah Kab. Karawang**  
**Tahun 2011-2015**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	14.267	13.865	13.522	13.304	13.566
2.	Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	202	202	96	93	87
3.	Tenaga Honorer Kategori II	2.838	2.781	2.781	2.196	2.196
<b>J U M L A H</b>		<b>17.307</b>	<b>16.848</b>	<b>16.399</b>	<b>15.592</b>	<b>15.849</b>

Sumber: BKD Kabupaten Karawang



**Gambar 3.9**  
**Gambaran Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**  
**Tahun 2011-2015**



**Gambar 3.10**  
**Jumlah Pegawai di Lingkungan Pemkab Karawang**  
**Tahun 2011-2015**

Berdasarkan gambar diatas, jumlah pegawai Kabupaten Karawang baik PNS, TKK dan Honorer Katagori II menurun setiap tahunnya. Selama periode 2011-2015 jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Karawang berkurang hingga 1.458 orang. Hal ini dikarenakan jumlah tidak seimbangnya jumlah penerimaan CPNS dengan jumlah pegawai yang Pensiun, formasi yang didapatkan dari Pemerintah Pusat selalu menurun walaupun ajuan Pemerintah Kabupaten Karawang sudah disesuaikan dengan kebutuhan di Kabupaten Karawang. Untuk mengatasi masalah kurangnya pegawai dilakukan dengan terus mengusulkan formasi pegawai berdasarkan data bezetting pegawai Kabupaten Karawang dan meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta terus memperbaiki system penilaian kinerja pegawai dengan harapan walaupun jumlah pegawai terus menurun tetapi pelayanan terhadap masyarakat tetap maksimal.

**Tabel 3.158**  
**Perkembangan PNS yang Mengikuti Tugas Belajar Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pendidikan D.1	-	-	-	-	-
2.	Pendidikan D.2	-	-	-	-	-
3.	Pendidikan D.3	-	-	-	-	-
4.	Pendidikan S.1	6	-	-	-	-
5.	Pendidikan S.2	13	2	5	6	2
6.	Pendidikan S.3	-	-	-	-	2
<b>J U M L A H</b>		<b>19</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

Sumber: BKD Kabupaten Karawang

Berdasarkan tabel 3.148, dalam periode tahun 2011-2015, Pegawai yang mengikuti tugas belajar jenjang S1 hanya pada tahun 2011 sebanyak 6 orang, selanjutnya tugas belajar lebih banyak untuk jenjang S2. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar jenjang S2 tidak ada peningkatan setiap tahunnya dan cenderung menurun. Penurunan ini dikarenakan kurang menariknya tunjangan biaya pendidikan untuk tugas belajar oleh karena itu untuk meningkatkan minat dalam mengikuti tugas belajar Badan Kepegawaian dan Diklat mengupayakan untuk meningkatkan tunjangan dan kesejahteraan bagi pegawai yang mengikuti tugas belajar, dengan harapan akan lebih banyak pegawai yang mengajukan tugas belajar.

**Tabel 3.159**  
**Jenis Diklat yang Dilaksanakan di Kabupaten Karawang**  
**Tahun 2011-2015**

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>
<b>A.</b>	<b>Diklat Struktural</b>					
1.	Diklat Kepemimpinan Tk. II	4	3	4	2	-
2.	Diklat Kepemimpinan Tk. III	31	20	20	-	30
3.	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	40	80	160	90	60
<b>B.</b>	<b>Diklat Prajabatan</b>	<b>241</b>	<b>-</b>	<b>112</b>	<b>-</b>	<b>573</b>
<b>C.</b>	<b>Diklat Teknis Fungsional</b>					
1.	Bintek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	40	40	40	40	-
2.	Bintek Analisis Beban Kerja	75	-	-	-	-
3.	Bintek Penyusunan Renstra	68	-	-	-	-
4.	Diklat Analisis Jabatan	40	-	-	-	-
5.	Diklat Pengelolaan Perpustakaan bagi Pengelola Perpustakaan Sekolah	40	-	-	-	-
6.	Diklat Teknis Satuan Polisi Pamong Praja	40	-	-	-	-
7.	Workshop Manajemen ESQ	-	40	-	-	-
8.	Diklat Pengelola Arsip	-	30	-	-	-
9.	Diklat Fungsional Pembentukan Pengawas	-	17	-	-	-
10.	Diklat Manajemen Puskesmas	-	-	30	-	-
11.	Bintek Pengelolaan Barang/Asset Daerah	-	-	40	-	-
12.	Bintek Penatausahaan Keuangan	-	-	40	40	-
13.	Pelatihan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	-	-	-	60	-
14.	Bintek SAP Berbasis Akrual	-	-	-	144	-

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
15.	Diklat AKIP/LAKIP	-	-	-	-	40
<b>D.</b>	<b>Bantuan Pelatihan dan Kursus Keterampilan, Lokakarya Seminar dan Sejenisnya (pengiriman)</b>	<b>146</b>	<b>68</b>	<b>139</b>	<b>75</b>	<b>40</b>
	<b>J U M L A H</b>	<b>765</b>	<b>298</b>	<b>585</b>	<b>451</b>	<b>743</b>

Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Karawang (data s.d. Desember 2014)

## 16. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik

Indikator kinerja Strategis : Cakupan Pelayanan Administrasi kependudukan, KTP, KK dan Akta Kelahiran.

### 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program penataan administrasi kependudukan bertujuan untuk menertibkan database kependudukan agar valid dan akuntabel, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat. Tertib Nomor



Induk Kependudukan (NIK), mewajibkan penduduk untuk memiliki satu NIK, yang merupakan nomor identitas diri penduduk bersifat unik dan tunggal, berlaku seumur hidup serta sangat diperlukan untuk instrumen multifungsi dalam pelayanan publik. Tertib dokumen kependudukan tersebut, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari tahun 2011 sampai dengan 2015 telah mengeluarkan dokumen kependudukan sebagai berikut :

**Tabel 3.160**  
**Jumlah Dokumen Kependudukan yang Dikeluarkan**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No	Jenis Dokumen Kependudukan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	KTP WNI	284.000	234.278	58.280	122.051	<b>79.222</b>
2.	KTP WNA	5	3	0	0	<b>0</b>
3.	KK WNI	108.000	121.759	83.427	191.121	<b>247.147</b>
4.	KK WNA	0	0	0	0	<b>0</b>
5.	Surat Ket. Tempat Tinggal (SKTT)	803	798	687	1.175	<b>837</b>
6.	Surat Ket. Tinggal Sementara (SKTS)	1.663	1.488	2.129	3.096	<b>807</b>

No	Jenis Dokumen Kependudukan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
7.	Surat Ket. Pindah Luar Daerah (SKPLD)	6.865	13.069	8.073	11.329	<b>14.598</b>
8.	Surat Ket. Datang Luar Daerah (SKDLD)	9.856	12.435	10.696	19.929	<b>26.466</b>
9.	Surat Ket. Pindah Luar Negeri (SKPLN)	-	-	1	0	<b>0</b>
10.	<b>Surat Ket. Datang Luar Negeri (SKDLN)</b>	<b>278</b>	<b>126</b>	<b>212</b>	<b>285</b>	<b>255</b>

Sumber: Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang



Penerapan KTP elektronik (KTP-el) adalah Program Strategis Nasional yang mulai dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari awal bulan April 2012 sampai dengan Desember 2013. Jumlah Penduduk Wajib KTP berdasarkan data per bulan Juli 2011 sebanyak 1.525.478 jiwa yang tersebar di 30 Kecamatan, dan KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi Penduduk yang belum mendapatkan KTP-el sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Sampai dengan bulan Desember 2013, dari target Penduduk Wajib KTP-el sebanyak 1.525.478 jiwa, telah terekam sebanyak 1.350.865 jiwa dan sampai dengan 31 Desember 2014 (data WKTP dari DKB semester II 2014) hasil perekaman KTP-el Bidang Kependudukan mencapai 1.272.130. Pelaksanaan Perekaman KTP-el di Kabupaten Karawang dari Tahun 2012 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.161**  
**Pelaksanaan Perekaman KTP-el di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penerbitan SP NIK (KK)		682.542	-	-	-
2.	Jumlah Penduduk Wajib KTP (yang telah melakukan perekaman KTP-el)		1.302.955	1.350.865	*)1.272.130	1.251.835
	a. Laki-laki (orang)		661.210	686.528	648.943	632.670
	b. Perempuan (orang)		641.745	664.337	623.187	619.165

Sumber: \*) Data WKTP s.d 31 Desember 2014 dari DKB Semester II 2014 dengan hasil perekaman KTP-el Bidang Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang



## 2) Program Pencatatan Sipil

Salah satu produk unggulan dari Program Pencatatan Sipil yang sudah dimulai dari bulan Oktober 2011 sampai sekarang adalah Pelayanan Akta Kelahiran *one-day service*, pelayanan akta kelahiran di



tempat/desa, yaitu berupa Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran satu hari selesai. Jumlah Akta yang dikeluarkan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.162**  
**Jumlah Akta yang Dikeluarkan pada**  
**Tahun 2011 s.d. 2015**

No	Jenis Akta	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Pelayanan Akta Di Kantor	80.865	36.116	94.386	36.482	<b>44.515</b>
2.	Pelayanan Akta Di Desa/Kecamatan (Paten)	11.004	2.051	1.728	24.623	<b>23.999</b>
3.	Akta Kawin	216	185	152	158	<b>287</b>
4.	Akta Cerai	12	18	18	14	<b>19</b>
5.	Akta Kematian	97	115	92	113	<b>164</b>
6.	Akta Pengakuan & Pengesahan Anak	24	8	14	19	<b>8</b>
7.	Akta Pengangkatan Anak	5	0	0	0	<b>0</b>
8.	Legalisasi Akta	4.857	2.878	2.302	2.944	
9.	<b>Surat Keterangan Catatan Pinggir</b>	<b>9</b>	<b>845</b>	<b>540</b>	<b>476</b>	<b>693</b>

*Sumber: Bidang Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang*

Untuk capaian indikator kinerja strategis bidang administrasi kependudukan Cakupan KTP, realisasi penerbitan KTP el pada tahun 2015 mencapai 5,5% (target 5%), yaitu terealisasi 79.222 KTP. Untuk pelayanan KK telah mencapai 247.147 KK dari 717.909 KK (34,43%), sedangkan akta kelahiran untuk tahun 2015 telah diterbitkan 68.514 akta, sehingga cakupan akta kelahiran telah mencapai 54,42%.

## 17. Terciptanya kondisi aman lingkungan masyarakat

Indikator kinerja strategis : Cakupan Penegakan Perda dan Perbup serta Cakupan rasio Petugas Linmas.

### 1) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini dilaksanakan untuk mempererat jalinan kemitraan antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan melalui kegiatan Sarasehan Tomas, Toga dan Topa dengan Muspida dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Tatanan dan Solidaritas di kalangan masyarakat.

**Tabel 3.163**  
**Rekapitulasi Tenaga Inti Linmas se-Kabupaten Karawang**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kasatlinmas Kecamatan	30	30	30	30	<b>30</b>
2.	<b>Anggota Linmas Inti Desa/Kelurahan</b>	<b>3.090</b>	<b>3.090</b>	<b>3090</b>	<b>3090</b>	<b>3090</b>

Sumber: Kantor polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang

Jumlah anggota Linmas inti di Kabupaten Karawang mencapai 3.090 Linmas, sedangkan jumlah RT di Kab. Karawang 6.541 RT, sehingga rasio anggota Linmas 47,2 % (target 50%).

### 2) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal

**Tabel 3.164**  
**Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal se-Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah unjuk rasa	63	78	93	63	<b>51</b>
2.	Rasio jumlah polisi pamong praja per jumlah penduduk	2.000.000/34	2.000.000/332	2.000.000/328	2.000.000/323	<b>2.273.579/350</b>
3.	Jumlah penanganan pelanggaran perda	65	80	118	154	<b>220</b>
4.	<b>Jumlah penegakan Perda Yustisial</b>	<b>42</b>	<b>345</b>	<b>219</b>	<b>75</b>	<b>126</b>

Sumber: Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang

### 3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dimaksudkan untuk mencegah ataupun memberantas tindakan/perbuatan yang muncul dan dapat meresahkan anggota masyarakat sehingga dapat tercipta situasi yang aman, kondusif dan terkendali di wilayah Kabupaten Karawang. Program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan berupa Penertiban/Operasi Penyakit masyarakat (pekat).

**Tabel 3.165**  
**Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penertiban/operasi penyakit masyarakat (Pekat)	8 kali; 61 PSK	40 kali: 384 PSK, 350 VCD/DVD Porno	40 kali: 124 PSK, 102 Praktek mesum 890 VCD/DVD Porno	40 kali: 147 PSK/asusila, 785 VCD/DVD Porno	50 kali: 195 PSK/asusila, 943 VCD/DVD Porno, 214 dus miras

Sumber: Kantor polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang

### 4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

**Tabel 3.166**  
**Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**  
**Tahun 2011-2015**

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah penegakan perda	96	178	219	229	220

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Karawang

## 18. Meningkatnya kemandirian desa.

Indikator kinerja strategis : Prosentase peningkatan Alokasi Dana Desa

### 1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Hasil-hasil yang dicapai Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa pada tahun 2015 adalah pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar perdesaan. Bagi Hasil kepada



pemerintah desa (ADD) pada tahun 2014 diberikan kepada 297 desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan total alokasi sebesar Rp. 44.688.684.000,- (Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan untuk Biaya Umum sebesar 57,5% atau sebesar Rp. 25.695.993.300,- (Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan Honorarium dan Perjalanan Dinas sebesar 47,5% atau sebesar Rp. 21.227.124.900,- (Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pada tahun 2015 diberikan kepada 297 desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan total alokasi sebesar Rp. 154.717.000.000,- .Anggaran tersebut dialokasikan untuk Fisik sebesar 52,5% dan Non Fisik sebesar 47,5%.

Dengan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan pengelolaan PKK yang semakin baik disertai insentif secara tepat ke RT dan RW maka partisipasi masyarakat akan lebih terarahkan dalam membangun desa dan meningkat, dalam upaya menuju administrasi desa yang semakin tertib pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan monitoring ke 297 desa di Kabupaten Karawang.

**MISI KELIMA : MENINGKATKAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.**

**19. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan sumberdaya air, fungsi lahan dan kualitas udara**

Indikator Kinerja Strategis : Prosentase jumlah eco industrial.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang yang menyangkut kehidupan manusia. Pembangunan dalam prosesnya tidak terlepas dari penggunaan sumberdaya alam, baik sumberdaya alam yang terbarukan maupun sumberdaya alam tak terbarukan. Seringkali di dalam pemanfaatan sumberdaya alam tidak memperhatikan kelestariannya, bahkan cenderung memanfaatkan dengan sebanyak-banyaknya. Di sisi lain pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan dampak terhadap sumberdaya alam.

Pembangunan di Kabupaten Karawang masih memerlukan perhatian untuk mengantisipasi semakin meningkatnya aktivitas di segala bidang, agar manfaat yang diperoleh dari pembangunan tersebut dapat optimal dan dampak negatif yang timbul dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan salah satu jawabannya, merupakan upaya sadar dan terencana dalam menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana untuk mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan.

**1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.



**Tabel 3.167**  
**Capaian Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Tersedianya peta rawan bencana	-	-	1	-	-
2	Jumlah penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan (kasus)	8 kasus	11 kasus	26 kasus	26 kasus	30 kasus
3	Terlaksananya koordinasi adipura	12 OPD/46 titik pantau adipura	12 OPD/46 titik pantau adipura	12 OPD/46 titik pantau adipura	12 OPD/46 titik pantau adipura	38 OPD/47 titik pantau adipura
4	Tersedianya PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	-	-	3	-	-
5	Tersedianya Perda Lab Lingkungan	-	-	Prolegda 2014	Tahap pembahasan Kemenkeu	Tahap pengesahan (Bag. Hukum)
6	Jumlah industri yang menerapkan produksi bersih	50 perusahaan teridentifikasi	3 UKM	20 perusahaan teridentifikasi	-	-
7	Jumlah industri yang taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	6	8	10	14	26
8	Jumlah pedoman teknis/kebijakan pengelolaan B3 dan Limbah B3	-	-	1	-	-
9	Jumlah perusahaan pengangkut, pengumpul, pemanfaat dan pengelola limbah B3 terpantau	-	Pengangkut B3 : 13 Pengumpul B3 : 6 Pemanfaat B3 : 10 Pengelola B3 : 0	Pengangkut B3 : 17 Pengumpul B3 : 8 Pemanfaat B3 : 18 Pengelola B3 : 6	Pengangkut B3 : 17 Pengumpul B3 : 8 Pemanfaat B3 : 18 Pengelola B3 : 6	Pengangkut B3 : 17 Pengumpul B3 : 10 Pemanfaat B3 : 18 Pengelola B3 : 6
10	Jumlah Perusahaan yang berpotensi besar memberikan cemaran limbah terhadap badan air	76	145	76	80	94
11	Jumlah industri yang telah melaksanakan EPCM ( <i>Environmental Pollution Control Management</i> )	9 perusahaan terverifikasi	37 perusahaan terverifikasi	30 perusahaan terverifikasi	-	-
12	Jumlah kader lingkungan	30 orang	30 orang	10 orang	10 orang	15 orang
13	Jumlah pengujian kualitas air limbah industri	34	83	60	60	116
14	Tersedianya dokumen mitigasi bencana	-	-	-	-	-
15	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan hidup di perusahaan	160 perusahaan	108 perusahaan	120 perusahaan	104 perusahaan	88 perusahaan
16	Pengambilan sampel uji air sungai	36 titik	44 titik	44 titik	44 titik	43 titik
17	Pengambilan sampel uji air limbah industri	34 titik	83 titik	60 titik	60 titik	116 titik
18	Pengambilan sampel uji udara emisi cerobong industri (Pengambilan uji udara ambien)	20 titik	3 titik	38 titik	38 titik	6 titik
19	Verifikasi TPS limbah B3 dari perusahaan di kawasan dan zona industri	92 lokasi	71 lokasi	89 lokasi	98 lokasi	87 lokasi
20	Jumlah LSM lingkungan Hidup	12 LSM	-	2 LSM	-	9 LSM
21	Produk hukum bidang pengelolaan LH					
a	Peraturan Daerah	1 buah	1 buah	1 buah	-	2 buah
b	Peraturan Bupati	3 buah	-	-	5 buah	4 buah
c	Keputusan Bupati	5 buah	-	-	4 buah	-
d	Keputusan Kepala Badan	-	-	-	-	29 buah
22	Laboratorium Lingkungan Hidup	11 jenis alat	1 gedung + 5 jenis alat	16 jenis alat	8 jenis alat + mobil lab	15 alat penunjang
23	Alat Telemetry air	-	-	-	4 statis + 2 portable	-
24	Stasiun Pengukur Kualitas Udara Ambien /ISPU	-	-	-	1 titik	-
25	Penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan	-	-	-	21 perusahaan	29 perusahaan
26	<b>Evaluasi Kinerja dan Pembinaan Perusahaan dalam Penataan Peraturan</b>	-	-	-	-	<b>150 perusahaan</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

## Program

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan memiliki 26 capaian kinerja, dimana capaian kinerja tahun 2015 dari ke 26 capaian kinerja tersebut bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 menunjukkan peningkatan, kecuali capaian kinerja Alat Telemetri Air dan Stasiun Pengukur Kualitas Udara Ambien penurunan, karena kewajiban pemasangan kedua alat pengukur tersebut diwajibkan kepada pengelola kawasan.



Dokumen lingkungan yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan, baik dalam bentuk dokumen AMDAL, UKL/UPL ataupun SPPL adalah sebagaimana Tabel 2 di bawah ini. Adapun dokumen lingkungan yang dimiliki pada tahun 2015, untuk AMDAL sebanyak 3, UKL/UPL sebanyak 229 dan SPPL sebanyak 65.

**Tabel 3.168**  
**Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang Dimiliki oleh Industri di Kab. Karawang Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Industri yang memiliki AMDAL	16	2	3	0	3
2	Industri yang memiliki UKL/UPL	459	106	170	172	229
3	<b>Industri yang memiliki SPPL</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>65</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Karawang

## 2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

**Tabel 3.169**  
**Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Dokumen Informasi SDA	1	1	4	3	2
2	<b>Jumlah Dokumen Informasi LH (SLHD)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Karawang

Program ini memiliki 2 kinerja, yaitu berupa penyusunan dokumen Informasi SDA dan dokumen Informasi Lingkungan Hidup atau SLHD, pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah dokumen Informasi SDA yang disusun, sedangkan untuk dokumen Informasi Lingkungan Hidup atau SLHD, memang hanya disusun 1 dokumen setiap tahunnya.

### 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Program ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.

**Tabel 3.170**  
**Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah potensi sungai yang ada di wil. Kab. Karawang	4	4	4	4	4
2	Sumber pencemaran sungai (titik)	-	69 titik	76 titik	80 titik	94 titik
3	<b>Jumlah tanaman di sepanjang sempadan DAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

### 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program ini bertujuan untuk mengelola RTH yang merupakan bagian Sistem Tata Ruang Kota. Adapun bentuk RTH pada suatu kabupaten tergantung pada fungsi, lokasi maupun pengelolaannya. Pengadaan RTH Kabupaten sangat bergantung pada kebijakan lingkungan yang dimiliki oleh kabupaten tersebut.

**Tabel 3.171**  
**Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah/luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	-	-	-	-
2	Jumlah industri atau kawasan yang menerapkan <i>eco-industrial park</i>	-	-	-	-	-
3	<b>Penanaman Pohon</b>	-	-	-	-	<b>2.500 batang + 24.085 batang dari perusahaan</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Karawang

Program ini memiliki 3 capaian kinerja, namun sampai dengan tahun 2014 program ini belum memiliki capaian kinerja. Untuk tahun 2015 capaian kinerja dari program ini adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di atas.

### 5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian pencemaran udara agar berada pada kualitas baku mutu udara ambien sehingga dapat bermanfaat dengan sebaiknya terhadap makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan), bangunan/harta benda dan estetika.



**Tabel 3.172**  
**Peningkatan Pengendalian Polusi**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	<b>Jumlah kualitas sample udara ambien</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>6</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Karawang

Kinerja dari program ini adalah pelaksanaan pengambilan sample kualitas udara ambien, yang pada tahun 2015 dilaksanakan di 6 titik, berarti lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2014 dimana dilakukan pengambilan sample di 38 titik.

## 20. Berkurangnya volume dan dampak akibat timbunan sampah

Indikator Kinerja Strategis : Prosentase volume sampah yang mampu diangkut

### 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang bertujuan untuk mengendalikan dampak timbunan sampah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup selain dilaksanakan oleh BPLH Kabupaten Karawang juga dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang.

**Tabel 3.173**  
**Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**  
**Tahun 2011-2015**

No	Uraian	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Volume sampah terangkut	480 M <sup>3</sup>	595 M <sup>3</sup>	595 M <sup>3</sup>	672 M <sup>3</sup>	732M <sup>3</sup>
2	Jumlah kecamatan yang menerapkan sistem komposting	2 Kecamatan : Telukjambe Timur & Karawang Barat	2 Kecamatan : Telukjambe Timur & Karawang Barat	2 Kecamatan: Telukjambe Timur & Karawang Barat	3 Kecamatan 1. Telukjambe Timur 2. Telukjambe Barat 3. Ciampel	4 Kecamatan : 1. Telukjambe Timur, 2. Karawang Barat 3. Ciampel 4. Telagasari

Sumber: Dinas Cipta Karya Kab. Karawang

Capaian kinerja untuk volume sampah terangkut, pada tahun 2015 adalah sebanyak 732 M<sup>3</sup>, berarti pelayanan pengangkutan volume sampah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 672 M<sup>3</sup>, atau meningkat sebesar 84 M<sup>3</sup>.

Untuk kecamatan yang menerapkan sistem komposting pada tahun 2015 berjumlah berdasarkan data dari Dinas Cipta Karya Kab. Karawang dan BPLH Kab. Karawang menjadi 5 kecamatan, yang terdiri atas kecamatan Telukjambe Timur, Karawang Timur, Karawang Barat, Ciampel dan Telagasari.

### **3.4 Akuntabilitas Keuangan**

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah menjabarkan mengenai pelaksanaan kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang pada tahun 2015 dengan memberikan penekanan pada analisis kinerja pengelolaan keuangan, baik pada aspek pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Terdapat sejumlah aspek mendasar dalam uraian Bab III yang perlu mendapat perhatian, sehingga penjabaran yang disusun tentang keuangan daerah tahun anggaran 2015 dapat dipahami dengan kerangka pikir yang sama:

1. Komponen Pendapatan terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya.
2. Komponen belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik, serta Belanja Tidak Terduga; (2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
3. Komponen pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah; (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

### **3.4.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah**

#### 3.4.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat UU Nomor 32 Tahun 2004, maka kebijakan pengelolaan pendapatan diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai barometer tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah. Namun demikian, PAD sebagai penerimaan daerah yang dapat dikendalikan (*controllable*) masih relatif sangat kecil memberikan kontribusi terhadap APBD. Sebagaimana diketahui, porsi dana perimbangan dalam neraca APBD Kabupaten Karawang masih menjadi sumber pendapatan utama dengan rata-rata proporsi terhadap APBD di atas 75 persen. Kondisi kapasitas fiskal kabupaten karawang masih relatif rendah, dimana rata-rata besaran kontribusi yang disumbangkan PAD ditambah Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHPBP) terhadap APBD hanya kurang dari 40 persen dan rata-rata kontribusi PAD sendiri masih sangat kecil hanya sebesar 20 - 23 persen.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi. Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek biaya – manfaat yang dihasilkan, yaitu harus memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan, oleh sebab itu efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh SKPD yang berkompeten harus dilakukan secara akuntabel. Kebijakan lain terkait peningkatan pendapatan asli daerah yang akan dilaksanakan adalah pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.

### 3.4.1.2 Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2015

Rencana pendapatan daerah Kabupaten Karawang tahun anggaran 2015 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Kabupaten Karawang pada anggaran pendapatan tahun 2015 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional, Regional dan lokal serta ekonomi global.

Secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif. Dengan kondisi tersebut tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah. Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya. Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja (USK) terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya, di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti: belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal.

Dalam jangka panjang, pembangunan Kabupaten Karawang berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalty dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah

mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kabupaten Karawang.

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang dikeluarkan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak. Adapun optimalisasi pendapatan daerah melalui :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada :
  - a. Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - b. Pendekatan ekstensifikasi untuk perluasan basis pajak serta intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna peningkatan basis pajak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
  - c. Peningkatan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kelembagaan dan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan

- dalam bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perbaikan sistem dan prosedur kerja.
- d. Perbaikan kinerja dan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah
  - e. Peningkatan tarif retribusi daerah yang dipungut oleh SKPD disertai peningkatan pengawasan pemungutannya.
  - f. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLUD
  - g. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari deviden BUMD sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - h. Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek biaya – manfaat yang dihasilkan, yaitu harus memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan, oleh sebab itu efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh SKPD yang berkompeten harus dilakukan secara akuntabel melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan high cost economy terhadap perkembangan investasi.
  - i. Kebijakan lain terkait peningkatan pendapatan asli daerah yang akan dilaksanakan adalah pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang idle baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Konsep revenue sharing atas perimbangan keuangan Pusat dan Daerah memerlukan langkah-langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Karawang dalam:
- a. Melakukan pemantauan, pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Propinsi.
  - b. Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.

3. Upaya untuk *memperoleh* alokasi DAK diarahkan pada meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Berdasarkan kebijakan DAK, terdapat beberapa bidang yang memiliki potensi memperoleh alokasi DAK meliputi : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Keluarga Berencana; (4) Infrastruktur Jalan; (5) Infrastruktur Irigasi; (6) Infrastruktur Air Minum; (7) Infrastruktur Sanitasi; (8) Prasarana Pemerintahan Daerah; (9) Kelautan dan Perikanan; (10) Pertanian; (11) Lingkungan Hidup; (12) Kehutanan; (13) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal; (14) Sarana Perdagangan; (15) Transportasi Perdesaan; (16) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; (17) Listrik Perdesaan; (18) Perumahan dan Permukiman; serta (19) Keselamatan Transportasi Darat.
4. Kebijakan Dana Otonomi Khusus *dan* Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008, yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk tunjangan profesi guru (TPG), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana Insentif Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dana tambahan untuk TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, yang dialokasikan mulai tahun 2010. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.
5. Kebijakan Dana *Desa* yang merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dialokasikan untuk Desa dengan komposisi perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

### 3.4.2 Pengelolaan Belanja Daerah

#### 3.4.2.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2015 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang tahun 2015, akan meliputi : :

#### **I. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

1. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pembangunan pendidikan menengah untuk semua dan kualitas layanan kesehatan melalui Kartu Karawang Sehat;
2. Pemantapan pembangunan infrastruktur wilayah melalui pembangunan berkeadilan dengan fokus penyelesaian 5 batang 12 cabang;
3. Pertumbuhan ekonomi regional yang kuat berbasis komoditas lokal melalui pendekatan manajemen *one village one product*;
4. Pembukaan kesempatan kerja, Penanganan pengangguran, Penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan;

#### **II. Aspek Pelayanan Publik**

1. Pemantapan pembangunan infrastruktur wilayah melalui pembangunan berkeadilan dengan fokus penyelesaian 5 batang 12 cabang dan penyediaan pelayanan air bersih perpipaan dan non perpipaan;
2. Penguatan antisipasi bencana alam beserta dampaknya melalui Penanganan yang komprehensif dari hulu sampai hilir
3. Penguatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, konservasi alam dan penanganan persampahan;

4. Penguatan kelembagaan desa pada aspek sarana dan prasarana serta penguatan SDM dan masyarakat termasuk pengarusutamaan gender;
5. Penguatan kapasitas kelembagaan sebagai optimalisasi tata kelola pemerintahan yang *good governance*;

### **III. Aspek Daya Saing**

1. Memantapkan infrastruktur dasar yang mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkeadilan, serta sarana prasarana dasar perkotaan dan perdesaan;
2. Mempersiapkan SDM yang handal guna mengoptimalkan tata guna, tata kelola dan tata produksi pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan sumberdaya alam berperspektif pertumbuhan ekonomi rendah karbon dan reduksi bencana;
3. Mendorong pengembangan pariwisata yang mengakomodir konsep-konsep pariwisata berkelanjutan berdasarkan potensi budaya lokal dan teknologi informasi.
4. Mempercepat reformasi birokrasi meliputi tiga aspek yang menjadi pilar, yaitu: kelembagaan, tatalaksana dan SDM melalui pemerintah yang memiliki kelembagaan yang kuat, kepemimpinan yang *capable* dan *responsible*, SDM yang kompeten dan profesional, sistem yang memungkinkan *check and balances*, pemerintahan yang berdasarkan prosedur dan keteraturan serta mekanisme yang transparansi dan akuntabilitas dapat menuju *good governance* dengan efektif.

#### 3.4.3.2 Rencana dan Realisasi Belanja Tahun 2015

##### I. Belanja Tidak Langsung

Kebijakan umum anggaran 2015 tetap mengalokasikan anggaran untuk:

1. Belanja program rutin dalam rangka dukungan administrasi dan logistik bagi pelaksanaan Tupoksi SKPD dialokasikan secara terukur dan terarah sesuai kebutuhan, yaitu : belanja pelayanan administrasi perkantoran, belanja peningkatan sarana prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur serta peningkatan disiplin aparatur.

2. Dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah pedesaan, dialokasikan kepada seluruh desa dana bagi hasil kepada pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
3. Terkait dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dianggarkan dana bantuan keuangan kepada 178 Desa untuk biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015
4. Alokasi anggaran pendampingan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah, maupun anggaran yang bersifat sinergi antara Program Prioritas Nasional dan Daerah.
5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dialokasikan dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, termasuk di dalamnya, Belanja Hibah untuk Lembaga Pendidikan (BOPF) bagi sekolah swasta dan madrasah. Selain itu, terkait dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, dianggarkan dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015
6. Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang didukung dengan bukti-bukti yang sah

## II. Belanja Langsung

Kebijakan belanja daerah secara umum diarahkan dalam rangka pelaksanaan agenda prioritas RPMD Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2015 khususnya pada tahun 2015, meliputi :

1. Pengalokasian belanja wajib mengikat yaitu besaran belanja tidak langsung kelompok belanja pegawai dengan memperhitungkan antisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, pensiun dengan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 3,1 persen dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Dalam rangka peningkatan kinerja PNS, diberikan penghasilan tambahan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan APBD yang pro rakyat maka besaran belanja pegawai dibatasi tidak boleh melebihi 50 persen dari total belanja daerah;
2. Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan dialokasikan minimal 20 persen, yang diarahkan pada :
  - a. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakat melalui:
    - 1) Alokasi Biaya Operasional, Perawatan dan Fasilitas (BOPF) pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang sinergi dengan dana BOS bersumber APBN dan APBD Provinsi;
    - 2) Alokasi anggaran BOPF disesuaikan dengan proporsi dana BOS Pusat dan Provinsi sesuai dengan standar biaya penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing jenjang;
    - 3) Menu BOPF diarahkan pada :
      - Biaya Operasional, digunakan untuk membiayai operasional penunjang proses belajar mengajar baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di seluruh satuan pendidikan formal dan informal seperti : honorarium mengajar guru,

honorarium/ transport kegiatan dan pengadaan bahan penunjang proses belajar mengajar.

- Biaya Perawatan, digunakan untuk membiayai perawatan ruangan dan pemeliharaan sarana pendidikan formal dan nonformal seperti: pemeliharaan ruang kelas, ruang laboratorium, kursi, meja, peralatan laboratorium, dan lain-lain.
  - Biaya Fasilitas, Digunakan untuk membiayai pengadaan peralatan penunjang proses belajar mengajar baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler diseluruh satuan pendidikan formal dan non formal seperti : mesin dan peralatan praktek siswa, peralatan laboratorium, meja, kursi, dan lain-lain.
- 4) Khusus pendidikan menengah, alokasi BOPF mencakup seluruh siswa sekolah menengah umum dan kejuruan berstatus Negeri, sedangkan Sekolah Swasta dialokasikan secara bertahap, yang pada tahun 2013 mencakup siswa kelas X dan pada tahun 2014 mencakup Siswa Kelas X dan XI, dan pada tahun 2015 mencakup seluruh siswa kelas X, XI dan XII
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan diarahkan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru/tambah lokal, serta rehabilitasi ruang kelas dan ruang penunjang pembelajaran dengan kategori berat sedangkan Belanja rehabilitasi ruang kelas ringan dan sedang, belanja investasi mesin dan peralatan praktek siswa, peralatan laboratorium, meja, kursi, dan lain-lain dianggarkan melalui dana BOPF.
  - c. Penyediaan Dana Bantuan biaya pendidikan jenjang Perguruan Tinggi bagi masyarakat tidak mampu berbasis data PPLS 2011 dan sarana dan prasarana pendidikan tinggi.
  - d. Peningkatan mutu dan manajemen tata kelola pelayanan pendidikan, antara lain perbaikan sistem penerimaan siswa baru melalui sistem *online* dan pengawasan proses belajar mengajar.

- e. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan;
  - f. Peningkatan pelayanan perpustakaan.
3. Alokasi anggaran urusan wajib kesehatan, dialokasikan minimal 10 persen yang diarahkan pada :
- a. Penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan terstandar;
  - c. Pengadaan dan pemerataan obat serta perbekalan kesehatan;
  - d. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - e. Penanganan masalah gizi masyarakat;
  - f. Penanganan Penyakit Menular, serta
  - g. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD.
4. Alokasi anggaran urusan wajib pekerjaan umum diarahkan antara lain :
- a. Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer penghubung antar pusat kegiatan/ jalan batang (PKW - PKL, dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten;
  - b. meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah/ jalan cabang (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten;
  - c. Peningkatan jalan perkotaan dengan fokus penataan ruas jalan di pusat ibukota kabupaten.
  - d. meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa;
  - e. pembangunan Jembatan Penghubung Strategis;
  - f. meningkatkan koordinasi pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan; Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi masyarakat;
  - g. penanganan abrasi pantai dan sistem pengendali banjir;
  - h. koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
  - i. penataan Gedung Kantor Pemerintah dan fasilitas publik dengan fokus penataan kantor SKPD dan penyediaan Ruang Publik (Public Space) dalam bentuk taman kota dan sarana olahraga dan rekreasi

- masyarakat (Kecamatan Kota Baru mewakili PKL Cikampek dan Kecamatan Batujaya mewakili PKL Rengasdengklok);
- j. Peningkatan pelayanan persampahan.
5. Alokasi anggaran urusan wajib perumahan, antara lain :
- a. Peningkatan sarana dan prasarana dasar permukiman dan perumahan;
  - b. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Rumah Layak Huni, Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan);
6. Alokasi anggaran urusan wajib penataan ruang, diarahkan antara lain:
- a. Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah, standar dan pedoman bidang penataan ruang ( Peraturan Zonasi, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan);
  - b. Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang serasi dengan pola dan struktur ruang wilayah;
  - c. Penyediaan sarana air bersih perpipaan dan non perpipaan
7. Alokasi anggaran urusan wajib perencanaan pembangunan, diarahkan:
- a. Pengembangan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
  - b. Meningkatkan koordinasi perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan serta penyediaan data dan informasi pembangunan.
8. Alokasi anggaran urusan wajib perhubungan diarahkan :
- a. Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana prasarana lalu lintas, angkutan dan jalan serta moda transportasi;
  - b. Penegakan peraturan dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan.
9. Alokasi anggaran urusan wajib lingkungan hidup diarahkan:
- a. Peningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan udara dengan membangun laboratorium dan kelengkapan fasilitasnya;
  - b. meningkatkan upaya-upaya koordinasi dan penegakan hukum serta pengawasan AMDAL, UPL/UKL;

- c. Pengembangan sistim data basis dan pelaksanaan kajian Bidang lingkungan hidup
  - d. Pengembangan regulasi dan penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan;
10. Alokasi anggaran urusan wajib kebudayaan diarahkan:
    - a. Pengembangan kapasitas pelaku budaya;
    - b. Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan local;
    - c. Pelestarian situs sejarah dan budaya ;
  11. Alokasi anggaran urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  12. Alokasi anggaran urusan wajib pemberdayaan perempuan diarahkan untuk meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dan penyediaan pelayanan rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi terhadap tindak kekerasan dan trafficking.
  13. Alokasi anggaran urusan wajib keluarga berencana diarahkan untuk penyediaan, pelayanan, rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
  14. Alokasi anggaran urusan wajib sosial diarahkan untuk meningkatkan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui fasilitasi, pendampingan, bimbingan dan pelatihan, penanggulangan kebencanaan dan dampak sosial masyarakat korban bencana, serta sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
  15. Alokasi anggaran urusan wajib tenaga kerja diarahkan untuk peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja, penyediaan informasi dan layanan ketenagakerjaan, pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi bidang ketenagakerjaan, serta fasilitasi, koordinasi dan pelayanan masyarakat peserta program transmigrasi.

16. Alokasi anggaran urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan UMKM dan sistem kelembagaan koperasi dan meningkatkan skala usaha KUMKM melalui fasilitasi pembiayaan, pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk
17. Alokasi anggaran urusan wajib pemuda dan olahraga diarahkan untuk pembinaan kelembagaan dan aktifitas kepemudaan serta peningkatan prestasi olahraga dan atlet daerah
18. Alokasi anggaran urusan wajib kesatuan politik dan politik dalam negeri diarahkan untuk pembinaan, pendidikan politik dan bela Negara serta koordinasi dan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
19. Alokasi anggaran urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas SDM aparatur, penataan ketatalaksanaan dan sistem prosedur kerja, pengembangan kebijakan dan pengelolaan pendapatan dan pembiayaan daerah, persiapan penerapan kebijakan akuntansi keuangan daerah, peningkatan ketersediaan sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan dan standarisasi yang ditetapkan, pengembangan kebijakan dan pengelolaan barang milik daerah, penataan sistem kearsipan, pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD serta peningkatan peran dan fungsi kelembagaan DPRD.
20. Alokasi anggaran urusan wajib pemberdayaan dan masyarakat desa diarahkan untuk pengembangan kebijakan, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa, pengembangan kebijakan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan pembiayaan pembangunan desa.

21. Alokasi anggaran urusan wajib Penanaman modal diarahkan untuk Operasionalisasi kelembagaan yang menangani penanaman modal termasuk pengelolaan urusan perizinan, Promosi dan pengembangan potensi daerah dalam rangka menarik minat investasi pengembangan kerjasama antar daerah maupun dengan pihak swasta dalam rangka pengelolaan potensi daerah
22. Alokasi anggaran urusan pilihan pertanian diarahkan untuk pengembangan potensi dan peningkatan produksi hasil pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, pemberdayaan kelembagaan, penerapan inovasi dan teknologi pertanian, pengembangan sistem dan sumberdaya penyuluh pertanian, peningkatan skala produksi peternakan dan pengendalian penyakit ternak
23. Alokasi anggaran urusan pilihan pariwisata diarahkan untuk pengembangan potensi dan arus masuk wisatawan melalui penyediaan fasilitasi, regulasi iklim usaha dan promosi kepariwisataan daerah, pengembangan sarana dan prasarana objek daya tarik wisata (ODTW) serta pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha sektor pariwisata daerah
24. Alokasi anggaran urusan pilihan kelautan dan perikanan diarahkan pada pengembangan potensi dan peningkatan hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan melalui fasilitasi, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha sektor perikanan, pengembangan sentra-sentra produksi perikanan menuju pengembangan kawasan minapolitan serta peningkatan sarana prasarana perikanan.
25. Alokasi anggaran urusan pilihan industri diarahkan untuk pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha bagi masuknya investasi sektor industri serta pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal dan keterkaitan rantai nilai industri, pengembangan sentra IKM, pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha serta pelatihan kewirausahaan IKM

26. Alokasi anggaran urusan pilihan perdagangan diarahkan pengembangan regulasi, fasilitasi serta sarana prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi barang produksi dan konsumsi, pengembangan kerjasama perdagangan dalam rangka mendukung promosi produk unggulan daerah serta perlindungan konsumen.

### 3.4.3 **Pengelolaan Pembiayaan Daerah**

Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari (a) pendapatan daerah, (b) belanja daerah, dan (c) pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Penetapan defisit APBD berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sesuai dengan PP Nomor 23 tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Karawang kepada publik atas pelaksanaan mandat konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD Kabupaten Karawang 2011-2015. Tahun 2015 merupakan tahun ke 5 periode pengukuran implementasi Renstra dimaksud melalui 20 Sasaran Strategis (SS) dan 49 Indikator Kinerja.

Laporan ini memberikan gambaran atas segenap upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK), pencapaian skor kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2015 dari 20 (dua puluh) sasaran strategis dan 49 indikator kinerja, 1 indikator tidak dihitung karena masih dalam proses penilaian Pemerintah Pusat, yaitu indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) belum dapat terealisasi karena masih dalam proses audit pendahuluan. Sehingga ada 48 indikator sasaran strategis yang diukur capaian kinerjanya yaitu ada 34 indikator kinerja telah mencapai kategori berhasil baik (70, 83%), 6 indikator kinerja telah mencapai kategori baik ( 12,50%), 1 indikator kinerja mencapai kategori sedang (2,08%) dan 7 indikator kinerja mencapai kategori kurang baik (14,58%). Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.603.924.144.290,97 atau 89,11% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 4.044.463.925.063,00.

Berdasarkan pengukuran atas 49 indikator kinerja yang diukur pada periode 2015 ini, tidak semua indikator mencapai target. Akan tetapi capaian target kinerja selama tahun 2011-2015 menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk meningkatkan capaian target yang telah ditetapkan antara lain dengan memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja, meningkatkan SDM pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam RPJMD Kabupaten Karawang 2011-2015, Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan perhatian yang lebih terhadap inisiatif strategis yang signifikan dengan mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang masih signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan strategis Pemerintah Kabupaten Karawang.

Akhirnya Laporan Kinerja Tahun 2015 diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan Pemerintah Kabupaten Karawang, baik dalam aspek format penyajian maupun aspek akuntabilitasnya.

**PENGUKURAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN 2015**

No	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Program			
1	2	3	4	5	6	7			
1	Menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun.	1	Angka Partisipasi Kasar				Program wajar dikdas		
		a.	SD sederajat	119.10%	107.24%	<b>90.04</b>			
		b.	SMP sederajat	110%	96.72%	<b>87.93</b>			
				c.	SMA Sederajat	85%	68.36%	<b>80.42</b>	Program Pendidikan Menengah
		2	Angka Partisipasi Murni	a.	SD sederajat	96.85%	96.02%	<b>99.14</b>	Program wajar dikdas
				b.	SMP sederajat	76%	69.81%	<b>91.86</b>	
				c.	SMA sederajat	60%	53.13%	<b>88.55</b>	Program Pendidikan Menengah
		3	Prosentase guru berkualifikasi S1	a.	Guru SD	75%	69%	<b>92.00</b>	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				b.	Guru SMP	50%	42%	<b>84.00</b>	
				c.	Guru SMA	35%	29%	<b>82.86</b>	
2	Tersedianya layanan pendidikan non Formal	1	Angka Melek Huruf	90%	93.45%	<b>103.83</b>	Program Pendidikan Non Formal		
		2	Prosentase PKBM yang terakreditasi	50%	82%	<b>164.00</b>			
3	Berkembangnya perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1	Jumlah Desa Siaga Aktif	100%	100% (309 desa/kel)	<b>100</b>	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		
		2	Prosentase Poskesdes aktif	60%	100% (102 poskesdes)	<b>166.67</b>			
		3	Prosentase posyandu aktif	60%	Posyandu aktif 2.271 posyandu (100%) kategori posyandu 656 purnama, 136 mandiri (35%)	<b>166.67</b>			
		4	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	90%	80.60%	<b>89.56</b>	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
		5	Prosentase K4	80%	Realisasi 54.175 (89,20)%	<b>111.50</b>	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		
		6	Prosentase Puskesmas DTP PONE D	100%	Puskesmas DTP+PONE D 12 dari 13 puskesmas (92,3%)	<b>92.30</b>			
				7	Prosentase Balita gizi kurang yang tertangani	90%	7.477 kasus (100%)	<b>111.11</b>	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
4	Peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian PMKS penerima Manfaat pelayanan Kesejahteraan Sosial	1	Prosentase PMKS penerima manfaat yang mampu mandiri	10%	3,16% (70,04% Tahun 2015 dari 66,88% tahun 2014)	<b>31.60</b>	Program Peningkatan Pelayanan Sosial		

No	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Program
1	2	3	4	5	6	7
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kepesertaan KB dan penyelenggaraannya	1 Prosentase Peningkatan Peserta KB PUS	50%	74,55% (jumlah peserta KB 375.606 jumlah PUS 503.809)	<b>149.10</b>	Program keluarga berencana
6	Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai tradisi, budaya dan kearifan lokal karawang	1 Cakupan Organisasi seni yang dibina dan difasilitasi	50%	37,5% (8 kelompok budaya 2014 menjadi 11 kelompok budaya 2015)	<b>75.00</b>	Program Pengembangan Nilai budaya
7	Meningkatnya nilai produksi ekonomi daerah	1 Prosentase Peningkatan Produksi :				
		a. Padi	3%	Realisasi 2.20% produksi 2015 : 1.531.104,5 ton, 2014 : 1.498.502 ton Produktivitas naik 5% dari 76.05 menjadi 79,95 Kw/ha	<b>73.33</b>	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi
		b. Palawija	5%	Realisasi : turun - 36.70%, 2014 : 12.651 ton, 2015 : 8.004,04 ton Produktivitas menurun dari 51,13 menjadi 27,11 Kw/ha	<b>-734</b>	Program Pengembangan Palawija
	c. Hortikultura	30%	Realisasi 31,50% Sayuran naik 36,72%, jamur naik 1,36% Produktivitas jamur naik 4% dari 2.3 menjadi 2,4 kw/kubung	<b>105</b>	Program Pengembangan sentra jamur merang dan sayuran dataran rendah	

		2 Prosentase Peningkatan Produksi Peternakan				Program Peningkatan Produksi dan pemasaran hasil peternakan
		a. Daging	5%	Realisasi turun: -1,40% Menurun dari 9.116,25 ton menjadi 8.988 ton	<b>-28</b>	
		b. Telur	5%	Menurun -1,20% dari 4.023 ton menjadi 3.974 ton	<b>-24</b>	
		3 Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan				

No	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Program	
1	2	3	4	5	6	7	
		a. Perikanan Tangkap	1%	Menurun 1% (174,56 ton) dari 8.766,55 menjadi 8.591,99 ton	<b>-100</b>	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
		b. Perikanan Budi Daya	4%	Naik 3% (1.326,15 ton) dari 41.157 menjadi 42.483,15 ton	<b>75</b>	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
		4 prosentase peningkatan pendapatan					Program Peningkatan Produksi dan pemasaran hasil pertanian
		a. Petani	30%	Naik 47% dari 18,532 menjadi 27,275 jt	<b>156.67</b>		
		b. Peternak	15%	Peternak turun 9,5% Pembudidaya ikan naik 13,28%, Nelayan Naik 8,15%, petani garam naik 5,60%	<b>98.03</b>		
		5 Prosentase peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah	1%	Naik 1,01% dari 9.528 (2014) menjadi 9.624 (2015)	<b>101.00</b>	Program Pengembangan Industri kecil, menengah dan besar	
8 Mendorong peningkatan Investasi	1 Prosentase peningkatan investasi PMDN	5%	Turun -1.05% dari 25,722 Trilyun (2014) menjadi 25,453 Trilyun (2015)	<b>-21.00</b>	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		

9	Perluasan Kesempatan Kerja dan menurunkan angka pengangguran	1 Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri	30%	Naik 31% dari 12.693 menjadi 16.675	<b>103.33</b>	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
		2 Prosentase Penurunan angka pengangguran	2%	-0,29 % (Angka pengangguran naik dari 9,86% menjadi	<b>-14.50</b>	
		3 Prosentase penyelesaian Kasus PHI dan Pemogokan	90%	Terselesaikan 58 dari 112 kasus (51,79%)	<b>57.54</b>	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
10	Meningkatnya Peran kelembagaan dan akses koperasi dan UMKM	1 Prosentase peningkatan koperasi sehat	5%	Naik 4% dari 125 (2014) menjadi 130 koperasi (2015)	<b>16.00</b>	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
		2 Prosentase peningkatan UMKM yang memiliki sertifikasi SP Kesehatan	12%	Naik 11.19% dari 268 (2014) menjadi 298 UMKM (2015)	<b>55.95</b>	

No	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Program	
1	2	3	4	5	6	7	
11	Meningkatnya kualitas sistem infrastruktur jaringan jalan	1	Prosentase Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik	50%	Kondisi baik 1.028 km, jalan kab 1.582,8 km (64%)	<b>128</b>	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
							Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		2	Prosentase peningkatan pemeliharaan jembatan	30%	56,5% (23 unit Tahun 2014, menjadi 36 unit tahun 2015)	<b>188</b>	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
12	Tersedianya Infrastruktur sumberdaya air dan irigasi	1	Prosentase Saluran irigasi dalam kondisi baik	50%	Saluran sekunder kondisi baik 145,77 km, panjang saluran 289,6 km (50%)	<b>100</b>	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan Lainnya
13	Meningkatnya keterjangkauan dan kelancaran pelayanan transportasi	1	prosentase jaringan trayek tersedia	50%	55% (dari 55 trayek yang harus ada baru 30 trayek)	<b>110</b>	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		2	Prosentase jalan kabupaten yang dipasang rambu	50%	150% (24 unit menjadi 60 unit)	<b>300</b>	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
							Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
14	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah	1	Capaian prosentase target kinerja SKPD dengan dokumen perencanaan tahunan/RKPD	80%	61.76%	<b>77.20</b>	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		2	prosentase peningkatan PAD	15%	16.19%	<b>107.93</b>	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		3	Prosentase Proporsi PAD terhadap seluruh pendapatan	20%	29.11%	<b>145.55</b>	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

No	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Program	
1	2	3	4	5	6	7	
		4	Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP	Proses audit pendahuluan		Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
15	Terwujudnya birokrasi daerah yang profesional dan proporsional	1	Prosentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	60%	100% (1.221 jabatan struktural)	<b>166.67</b>	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
16	Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan publik	1	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan				Program Penataan Administrasi Kependudukan
		a.	KTP elektronik	5%	Terealisasi penerbitan KTP el 79.222 sehingga adanya peningkatan cakupan 5,50%	<b>110</b>	Program Pencatatan Sipil
		b.	KK	30%	Terealisasi cakupan KK 247.147 KK (34,43%)	<b>114.77</b>	
		c.	Kutipan Akta Kelahiran	50%	Terealisasi penerbitan akta 68.514 sehingga cakupan akta kelahiran 54,42%	<b>108.84</b>	
17	Terciptanya Kondisi aman lingkungan masyarakat	1	Cakupan Penegakan Perda dan Perbup	80%	Rencana 60 kegiatan dilaksanakan 60 kegiatan (100%)	<b>125.00</b>	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
		2	Cakupan Rasio Petugas Linmas	50%	10 orang setiap desa/kel. Jumlah 3090 anggota linmas. Jumlah RT 6.541, Rasio : 47,24%	<b>94.48</b>	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
18	Meningkatnya Kemandirian desa	1	Prosentase peningkatan Alokasi Dana Desa	5%	2014 : 44.68 milyar 2015 : 154,717 milyar (capaian 246%)	<b>4920.00</b>	Program Pembangunan Desa/Kelurahan
19	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan sumberdaya air, fungsi lahan dan kualitas udara	1	Prosentase penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan (kasus)	20%	15,38 % (26 kasus menjadi 30 kasus)	<b>76.90</b>	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

No	Sasaran Strategis RPJMD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Program
1	2	3	4	5	6	7
20	Berkurangnya Volume dan dampak akibat timbunan sampah	1 Prosentase volume sampah yang mampu diangkut	60%	2014 : 672M <sup>3</sup> meningkat 2015 : 732 M <sup>3</sup> total volume sampah 960 M <sup>3</sup> . Capaian 76%	<b>126.67</b>	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>						

**BUPATI KARAWANG**

**dr. CELLICA NURRACHADIANA**